



INDEKS KERENTANAN & Profil Rumah Tangga Miskin

Thung Ju Lan | Soewarsono | Aulia Hadi
Wasisto Raharjo Jati | Azzahra Ulya
Irene M. Nadhiroh | Mia Amelia

**INDEKS
KERENTANAN
& Profil Rumah
Tangga Miskin**

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

INDEKS KERENTANAN & Profil Rumah Tangga Miskin

Thung Ju Lan | Soewarsono | Aulia Hadi
Wasisto Raharjo Jati | Azzahra Ulya
Irene M. Nadhiroh | Mia Amelia

LIPI Press

© 2018 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Indeks Kerentanan & Profil Rumah Tangga Miskin/Thung Ju Lan, Soewarsono, Aulia Hadi,
Wasisto Raharjo Jati, Azzahra Ulya, Irene M. Nadhiroh, Mia Amelia. –Jakarta: LIPI Press 2018.

xx hlm. + 136 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN: 978-979-799-961-2 (cetak)
978-979-799-962-9 (e-book)

1. Kemiskinan
3. Perkotaan

2. Ketahanan Sosial Budaya
4. Perdesaan

362.5

Copyeditor : Tantrina Dwi Aprianita
Proofreader : Fadly Suhendra dan Martinus Helmiawan
Penata isi : Erna Rumbiati dan Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul : Rusli Fazi
Cetakan pertama : Mei 2018
Sumber Gambar Sampul : www.pixabay.com



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp: (021) 314 0228, 314 6942. Faks.: (021) 314 4591
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

 LIPI Press
 @lipi_press

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
PENGANTAR PENERBIT	xi
KATA PENGANTAR	xiii
PRAKATA	xvii
BAB I KEMISKINAN, KERENTANAN, DAN KETAHANAN	
SOSIAL BUDAYA	1
A. Posisi Penelitian <i>vis-á-vis</i> Kebijakan Kemiskinan	5
B. Ketahanan Sosial Budaya	12
C. Kerangka Berpikir dan Operasionalisasi Konsep	14
D. Pengumpulan Data	26
BAB II RUANG SOSIAL	29
A. Kota, <i>Slum Area</i> , dan Sejarah	31
B. Urbanisasi Perdesaan	40
C. Korelasi Urbanisasi dan Kemiskinan di Perkotaan	46
D. Nelayan dan Kemiskinan	48
E. Pertanian dan Kemiskinan	49

F. Sektor Informal dan Kemiskinan	52
G. Kemiskinan Desa dan Kemiskinan Kota: Temuan Sementara.....	67
BAB III INDEKS KERENTANAN	71
BAB IV <i>LIFE HISTORY</i>—PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN.....	95
BAB V PENUTUP: MODEL TENTATIF MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA	111
DAFTAR PUSTAKA	121
INDEKS	127
BIOGRAFI PENULIS	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Alat Ukur Kerentanan Sosial Rumah Tangga Miskin	19
Tabel 2.	Penduduk Miskin di Pulau Jawa	23
Tabel 3.	Penduduk Miskin di Provinsi Banten	24
Tabel 4.	Distribusi Kuesioner di Provinsi DIY dan Banten.....	27
Tabel 5.	Sektor Informal di Kota Serang dan Kota Yogyakarta.....	62
Tabel 6.	Sektor Informal di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Gunungkidul	65
Tabel 7.	Temuan Variabel Kerentanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul.....	73
Tabel 8.	Temuan Variabel Kerentanan Di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang	74
Tabel 9.	Variabel Kerentanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul	76
Tabel 10.	Lima Faktor Kerentanan	79
Tabel 11.	<i>Factor Leading Matrix</i>	82
Tabel 12.	Batas Minimum dan Maksimum Skor Setiap Faktor	82
Tabel 13.	Matriks Sebaran Responden Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Indeks Kerentanan.....	83
Tabel 14.	Klasifikasi RT Miskin berdasarkan Indeks Kerentanan Sosial	84
Tabel 14a.	Indikator Rumah Tangga Miskin (RTM) Tidak Rentan.....	85

Tabel 14b. Indikator RTM Cukup Rentan	88
Tabel 14c. Indikator RTM Rentan.....	90
Tabel 14d. Indikator RTM Sangat Rentan.....	92
Tabel 15. <i>Life History Mapping</i> di Provinsi DIY dan Banten	97
Tabel 16. Survei Motivasi.....	113
Tabel 17. KK Template untuk Rumah Tangga Miskin	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Grafik Kelompok Masyarakat Miskin di Indonesia	2
Gambar 2.	Kerangka Konseptual <i>Community Resilience & Family Resilience</i>	15
Gambar 3.	Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 4.	Peta Kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta	24
Gambar 5.	Bagan/Skema Operasional	25
Gambar 6.	Model Tentatif Membangun Ketahanan Sosial Budaya.....	26
Gambar 7.	Bagan Lokasi Kemiskinan di Kota Serang.....	33
Gambar 8.	Bagan Lokasi Kemiskinan di Kota Yogyakarta	36
Gambar 9.	Skema Lima Faktor Kerentanan dari Indeks Kerentanan Sosial (<i>Social Vulnerability Index</i>).....	80
Gambar 10.	Grafik Frekuensi Sebaran dari Indeks Kerentanan Kemiskinan	83
Gambar 11.	Posisi Hasil Penelitian dalam Konteks Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	119

PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku ini menawarkan perspektif sosial-budaya sebagai alternatif dalam mengkaji kemiskinan di Indonesia. Gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia, khususnya pada era Reformasi digunakan sebagai konteks untuk memahami serangkaian kebijakan pemerintah. Beragam program untuk menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah, perlu dievaluasi dan disikapi dengan lebih tepat sehingga ke depan tidak hanya mengimitasi program-program yang ada untuk sekadar memperluas cakupan penerima bantuan.

Persoalan kemiskinan tidak dapat diasumsikan sebagai entitas tunggal yang berdiri sendiri. Untuk itu, buku ini menekankan perlunya penggunaan dan pemahaman konsep ketahanan sosial

budaya guna meningkatkan daya lenting masyarakat miskin sehingga mereka dapat bertahan bahkan keluar dari perangkap kemiskinan. Buku ini juga menunjukkan bahwa isu kemiskinan perlu diletakkan dalam sebuah ruang sosial sehingga pemetaan aktor dengan dinamika relasi kekuasaannya lebih mudah dipahami.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan yang akan datang.

LIPI Press

KATA PENGANTAR

Sebagai Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, saya sangat gembira menyambut terbitnya buku *Indeks Kerentanan dan Profil Rumah Tangga Miskin* karya peneliti-peneliti lintas disiplin yang dipimpin oleh Dr. Thung Ju Lan. Buku ini merupakan publikasi kegiatan riset unggulan subprogram Ketahanan Sosial yang didanai LIPI.

Buku ini menawarkan perspektif sosial-budaya sebagai alternatif dalam mengkaji kemiskinan di Indonesia. Seperti diketahui, berbagai parameter yang berkembang di Indonesia, termasuk parameter yang digunakan pemerintah Indonesia dalam mengukur kemiskinan, lebih menekankan aspek-aspek ekonomi, seperti pengeluaran kebutuhan makanan sehari-hari dan kelayakan hunian. Faktanya, parameter-parameter tersebut belum mampu menyelesaikan isu kemiskinan yang masih menjerat Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga September 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang atau 10,70% dari total penduduk. Kendati studi-studi kemiskinan sudah menggarisbawahi perlunya penggunaan alat

ukur nonekonomi, seperti kapasitas manusia, kapabilitas politik, dan modal sosial-budaya, alat ukur tersebut masih diabaikan karena banyak yang belum dioperasionalisasikan dalam tataran empiris. Melengkapi parameter-parameter ekonomi yang sudah sering digunakan, buku ini menyajikan parameter-parameter sosial-budaya untuk memahami kemiskinan, seperti liabilitas rumah tangga (RT) dan investasi sosial dilengkapi indikator-indikatornya.

Bagian awal buku ini memberikan gambaran kemiskinan di Indonesia, khususnya pada era Reformasi. Gambaran ini memberikan konteks untuk memahami kemiskinan di Indonesia terlebih dengan serangkaian kebijakan pemerintah. Tidak dipungkiri bahwa pemerintah pusat sudah merancang beragam program untuk menanggulangi kemiskinan yang dilakukan serentak di Indonesia, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Alih-alih melakukan inovasi di tingkat lokal, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, cenderung hanya mengimitasi program-program yang ada untuk memperluas cakupan penerima bantuan. Pada bagian ini, para penulis menekankan perlunya penggunaan dan pemahaman konsep ketahanan sosial budaya untuk meningkatkan daya lenting masyarakat miskin sehingga mereka dapat bertahan atau bahkan keluar dari perangkap kemiskinan yang ada.

Sementara itu, bab dua buku ini menekankan bahwa persoalan kemiskinan tidak dapat diasumsikan sebagai entitas tunggal yang berdiri sendiri. Para penulis menunjukkan bahwa isu kemiskinan perlu diletakkan dalam sebuah ruang sosial sehingga pemetaan aktor dengan dinamika relasi kekuasaannya lebih mudah dipahami. Ruang ini juga menggambarkan tiga sektor utama yang menjadi ruang bergelut bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup, yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor informal. Dengan demikian, penulis pun mencoba untuk mengajukan sebuah model

tentatif untuk membangun ketahanan sosial budaya masyarakat miskin.

Indeks kerentanan dan profil rumah tangga miskin menjadi bahan diskusi utama yang dipaparkan pada bab tiga dan bab empat. Berawal dari 12 variabel kerentanan yang diujikan, tim peneliti menyusun indeks kerentanan dengan hanya menggunakan delapan variabel yang relevan. Kedelapan variabel tersebut dikategorikan dalam lima dimensi, yaitu liabilitas, investasi sosial, nilai ekonomi, remitansi, dan kesehatan. Keberadaan indeks kerentanan ini memberikan kesempatan untuk mengklasifikasikan masyarakat miskin, baik dari aspek ekonomi maupun nonekonomi. Dimensi investasi sosial, misalnya, memberikan gambaran tentang potensi sebuah RT untuk diberdayakan, baik dilihat dari anggota rumah tangga (ART) putus sekolah maupun jejaring sosialnya untuk melunasi utang. Jika data kuantitatif memudahkan pemetaan dan klasifikasi masyarakat miskin maka tim peneliti menyuguhkan data kualitatif untuk memberikan kedalaman informasi tentang RT miskin. Data kualitatif yang disajikan adalah variasi pekerjaan dan pendapatan serta jejaring sosial.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan dan menawarkan perspektif lintas disiplin, baik ekonomi maupun sosial-budaya, untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Terpulang kepada kita sebagai pembaca dan juga penerus bangsa untuk memanfaatkan atau bahkan mengkritisi dan mengembangkannya untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera pada masa yang akan datang.

Jakarta, 20 April 2017

Dr. Sri Sunarti Purwaningsih
Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

PRAKATA

Penelitian “Strategi Membangun Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Miskin Perdesaan dan Perkotaan” difokuskan untuk menyusun indeks kerentanan dan profil rumah tangga miskin. Data yang digunakan merupakan hasil penelitian lapangan dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif (kuesioner) dan kualitatif (*life history*). Melalui pengukuran indeks kerentanan sosial, buku ini mengklasifikasikan RT miskin dalam empat kelompok dengan karakteristiknya masing-masing, yaitu kelompok tidak rentan, cukup rentan, rentan, dan sangat rentan. Pengukuran indeks kerentanan sosial ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam melihat dan menyelesaikan isu kemiskinan di Indonesia.

Melalui buku ini, dapat dilihat bahwa dari seluruh RT responden yang menerima bantuan sosial dari pemerintah, ada 17% RT yang seharusnya menjadi prioritas utama karena mereka sangat rentan terhadap kemiskinan, dan pada hakikatnya mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan. Dalam hal ini, upaya yang perlu dilakukan bukan pengentasan kemiskinan, melainkan pemeliharaan fakir

miskin sebagaimana dicanangkan dalam konstitusi kita; walaupun tentu saja upaya pemberdayaan secara bertahap—terutama pada anak-anak mereka—harus terus dilakukan agar suatu saat mereka dapat juga keluar dari kemiskinan.

Data *life history* menunjukkan bahwa perbedaan antara perkotaan dan perdesaan diperjelas oleh perbedaan jenis pekerjaan/sumber pendapatan dan kepemilikan aset rumah yang dalam hal ini bervariasi karena adanya bantuan anak yang sudah menikah dan tinggal terpisah, bantuan pemerintah atau sebagai harta warisan, baik dari orang tua maupun mertua. Kondisi rumah juga menentukan. Rumah berlantai tanah di perdesaan tidak selalu lebih buruk daripada rumah diperkotaan yang sebagian berlantai keramik. Menarik pula untuk dicatat bahwa rumah tangga yang kehilangan kepala rumah tangga atau kepala rumahnya sedang sakit parah adalah rumah tangga yang ada di perkotaan, bukan di perdesaan. Membandingkan Kota Yogyakarta dengan Kota Serang, dan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Pandeglang, secara garis besar kita bisa melihat perbedaan antara kemiskinan kota dan kemiskinan desa. Kemiskinan kota selalu terkait dengan pendatang dan perkembangan kota itu sendiri. Kemiskinan kota selalu bisa diidentifikasi sebagai daerah kumuh di kota karena penduduk miskin selalu menempati “ruang yang marginal”, yaitu ruang yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti pasar, terminal atau pertokoan, tetapi sesungguhnya ruang tersebut bukanlah ruang yang layak ditempati karena ruang yang sudah berpenduduk itu “dipaksa” dibagi lagi dengan mereka yang bekerja di pusat-pusat kegiatan ekonomi itu, namun berasal dari tempat lain yang jauh sehingga memerlukan tempat tinggal sementara (ikut/menumpang di keluarga, atau kost/sewa kamar). Sementara itu, kemiskinan desa lebih banyak terkait dengan masalah prasarana dan sarana atau infrastruktur, terutama jalan yang tidak memadai.

Kemiskinan desa juga cenderung terkonsentrasi pada mereka yang bekerja atau menjual jasa di bidang pertanian sebagai tenaga/buruh harian karena tidak banyak jenis pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan di desa.

Perbedaan ini diperkuat dengan hasil penelitian memakai kuesioner. Jika dilihat dari dimensi pendidikan, tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga miskin dipedesaan lebih rendah daripada mereka yang ada di kota. Rendahnya tingkat pendidikan ini bisa dikaitkan dengan kurangnya prasarana dan sarana pendidikan di desa. Seperti kita tahu, fasilitas pendidikan berupa sekolah di desa hanya ada untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan seringkali lokasinya pada satu desa, tetapi melayani kebutuhan beberapa desa yang berdekatan sekaligus. Sekolah menengah atas umumnya terdapat di ibu kota kecamatan yang seringkali jarak tempuhnya cukup jauh dengan kondisi jalan yang buruk.

Dari hasil penelitian pada 2015 dan 2016 ini, diharapkan bisa disusun suatu strategi membangun ketahanan sosial budaya masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan pada tahun terakhir (2017). Untuk itu, diharapkan buku ini bisa menjangkau masukan untuk perbaikan pada tahap penelitian selanjutnya, khususnya untuk penyusunan strategi yang dimaksud.

Penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan berbagai pihak, yaitu warga masyarakat miskin di lokasi penelitian (Kota Yogyakarta, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Gunungkidul); institusi pemerintah yang bertugas menangani masalah kemiskinan, seperti TNP2K, Bappeda, Dinas Sosial; dan TKPKD, LSM yang menangani masalah-masalah sosial di masyarakat, termasuk masalah kemiskinan; serta akademisi pemerhati persoalan kemiskinan. Untuk itu, tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan, baik

berupa data, kritik, masukan, maupun bantuan lainnya. Akhir kata, apabila ada kesalahan pada buku ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab tim penulis.

Jakarta, 15 Desember 2016

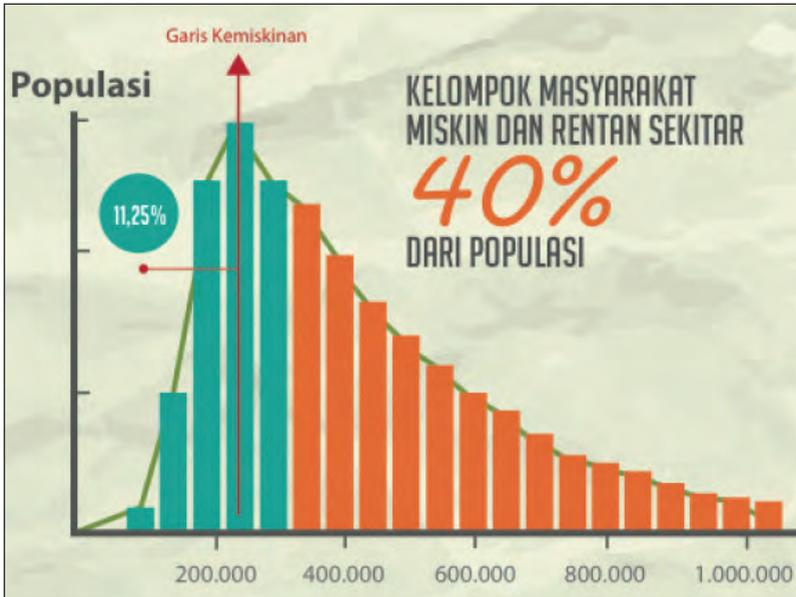
Tim Penulis

BAB I

KEMISKINAN, KERENTANAN, DAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA

Persoalan kemiskinan bukan hal yang baru di Indonesia. Oleh sebab itu, sudah banyak yang melakukan penelitian dan atau mengajukan usulan menanggulangi kemiskinan, tepatnya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga membahas masalah kemiskinan, tetapi tujuan utamanya mengurangi angka kemiskinan melalui pencarian model pemberdayaan rumah tangga miskin—agar mampu keluar dari perangkap kemiskinan. Dengan kata lain, sasaran penelitian ini adalah penyusunan model pemberdayaan masyarakat miskin.

Dari hasil penelusuran literatur dan juga dari program penanggulangan kemiskinan pemerintah, tampak bahwa sebagian besar penelitian dan program yang telah dilakukan pada dasarnya bertolak dari perspektif garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia. Perspektif garis kemiskinan ini diukur dari dua variabel, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) (Ruslan 2016). Jika GKM mengacu pada pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan



Sumber: Susenas (2014)

Gambar 1. Grafik Kelompok Masyarakat Miskin di Indonesia

dengan 2100 kkal, GKNM merujuk pada kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (Ruslan 2016). Berdasarkan cara pengukuran ini, disepakati bahwa, hingga Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28.280.010 jiwa (11,25%) yang tersebar sebanyak 17.772.810 jiwa (14,17%) di perdesaan dan 10.507.200 jiwa (8,34%) di perkotaan (BPS 2014a). Perlu dicatat bahwa angka-angka tersebut adalah relatif terhadap kategori daerahnya (perkotaan dan perdesaan).

Pada Gambar 1 ditunjukkan data mutakhir yang diperoleh tim peneliti ketika merancang penelitian pada awal 2015. Data kemiskinan BPS per Maret 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per

bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64%). Jumlah ini bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70%). Selama periode September 2016–Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017). Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (2016), di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang (dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 2017).”

Tidak ada yang salah dengan hasil penelitian atau cara pengukuran kemiskinan tersebut. Namun, bila mengamati jumlah kemiskinan di lapangan yang tidak banyak berkurang,¹ sepertinya perlu pendekatan lain untuk membantu mengurangi jumlah orang miskin. Selain itu, dalam pandangan tim peneliti, pendekatan tersebut hanya tepat untuk penanganan kemiskinan secara makro.² Pendekatan pemberdayaan yang lebih bersifat mikro memerlukan data yang mikro pula. Saat ini, sudah ada data mikro *by name by address*³ yang dipergunakan pemerintah untuk memberikan

¹ Bank Dunia dan BPS menyatakan bahwa baik angka kemiskinan relatif maupun absolut menunjukkan penurunan secara perlahan. Dari 17,8% (39 juta) tahun 2006 menurun menjadi 13,3% (31 juta) tahun 2010 dan 11% (28 juta) tahun 2014. Namun pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan dan kondisi yang tidak ketat dalam definisi garis kemiskinan sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Lihat “Kemiskinan di Indonesia,” *Indonesia Investments*, diakses pada 3 November 2016 dari <http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>.

² Secara makro, BPS (Susenas) sudah memiliki alat ukur untuk membedakan rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Setidaknya, terdapat enam indikator yang digunakan BPS, yaitu (a) rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang); (b) persentase kepala rumah tangga perempuan (%); (c) rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun); (d) rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun); (e) tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%); (f) sumber penghasilan utama rumah tangga (%).

³ Empat belas kategori miskin yang dipakai TNP2K dan Dinas Sosial untuk

program-program bantuan, seperti bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan tunai langsung, dan lainnya. Namun pada praktiknya, data mikro tersebut masih kurang tepat untuk program pemberdayaan. Karena walaupun disebutkan sebagai pendataan rumah tangga, nyatanya pendataan yang dilakukan adalah berdasarkan KK (kartu keluarga atau kepala keluarga). Buku ini mengajukan proposisi bahwa (1) beberapa KK miskin cenderung membentuk satu rumah tangga atau satu dapur sehingga perlu melihat rumah tangga sebagai suatu unit analisis; (2) ada perbedaan kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan karena perbedaan lingkungan, jenis pekerjaan, dan fasilitas yang tersedia; (3) ada proses adaptasi dan daya tahan yang berbeda antara keluarga miskin di perdesaan dengan keluarga miskin di perkotaan sehingga ketahanan sosial budaya mereka dalam menghadapi kesulitan hidup pun berbeda; (4) ada perspektif dan kebijakan pemerintah yang berbeda terhadap wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan.

menyusun data mikro *by name by address* pada prinsipnya lebih berdasarkan ciri-ciri fisik rumah (1-7) dan kemampuan ekonomi/finansial (9-12 dan 14), yaitu (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang; (2) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; (3) jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; (5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; (6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; (7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tana; (8) hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu; (9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; (10) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; (11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; (12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,- per bulan; (13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; (14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,- seperti sepeda motor kredit/nonkredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Buku ini diarahkan untuk mencari strategi membangun ketahanan sosial budaya masyarakat miskin perdesaan dan perkotaan yang diperkirakan memiliki kesamaan—walaupun terdapat banyak perbedaan berdasarkan pertimbangan di atas. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan metode alternatif dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan dan di perkotaan agar program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan efektif serta agar penduduk miskin dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

A. Posisi Penelitian *vis-á-vis* Kebijakan Kemiskinan

Terdapat dua terminologi penting dalam membaca kebijakan kemiskinan yang berlangsung di Indonesia, yakni penanggulangan dan percepatan. Kedua istilah tersebut secara langsung mengimplementasikan kebijakan kemiskinan secara substantif dari level pusat sampai ke level daerah. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pemahaman begitu jelas perihal pelaksanaan kebijakan kemiskinan tersebut. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat ditelusuri dari Peraturan Presiden (PP) 54/2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Presiden 13/2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Presiden 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berbagai uraian mengenai peraturan penanggulangan kemiskinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. PP 54/2005 lebih banyak membahas mengenai koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas lembaga dalam memutuskan program penanggulangan kemiskinan. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) disertai tanggung jawab sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan tersebut.

Penanggulangan daerah dilakukan sepenuhnya oleh gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. PP 13/2009 mengatur secara lebih teknis dan substantif dibandingkan dengan PP sebelumnya yang teknis-administratif. Menurut PP 13/2009, penanggulangan kemiskinan dimaknai sebagai “kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat” yang sesuai dengan arahan dalam RPJMN/RPJMD. Secara lebih praktis, kebijakan penanggulangan kemiskinan ini diturunkan dalam tiga kluster utama, yakni 1) program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial; 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; 3) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Selain itu, relasi antara tim koordinasi penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pengesahan PP 15/2010 menandai adanya akselerasi kebijakan kemiskinan yang semula berbasis penanggulangan kini beralih pada percepatan. Jika merujuk pada PP 13/2009, penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan pemberdayaan sosial dilakukan secara kolektif. Kini, percepatan penanggulangan kemiskinan lebih menyoroti pendapatan dan pengeluaran sebagai masalah dasar kemiskinan. Selain itu, istilah masyarakat miskin berbasis keluarga sebagai unit mikro diperkenalkan untuk menggantikan istilah masyarakat dalam peraturan pemerintah sebelumnya. Secara spesifik, percepatan penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada kelompok sasaran (*targeted groups*), yakni dengan menyebut secara langsung keluarga dan masyarakat miskin sebagai sasaran kebijakan. Perubahan orientasi ini kemudian berdampak pada

variasi program percepatan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada tiga kelompok penting, yakni 1) kelompok program bantuan sosial berbasis keluarga; 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; 3) program penanggulangan kemiskinan berbasis pada pemberdayaan usaha UKM; serta 4) program-program lain yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Paradigma “percepatan” yang digunakan dalam PP 15/2010 lebih melihat kebijakan kemiskinan bertumpu pada usaha peningkatan penghasilan bagi masyarakat miskin dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Kedua dimensi pemikiran tersebut melihat pemenuhan unsur material adalah esensial dalam kebijakan kemiskinan tersebut sehingga perlu ditangani secara khusus dan bersifat lintas sektoral. Dengan kata lain, perspektif “percepatan” melihat kemiskinan sebagai masalah kebijakan yang sifatnya *ad-hoc* dan strategis sehingga implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, pembentukan tim *task force* bernama TNP2K di tingkat nasional dan TKPK provinsi, kabupaten/kota menjadi penting dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan. TNP2K di tingkat nasional lebih bersifat mengoordinasi dan mengawasi pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektoral. Karena sifatnya sebagai pengendali dan pengawas, TNP2K tidak mempunyai kuasa melakukan penindakan dan eksekusi program kebijakan. TNP2K bertindak sebagai koordinator dan sebagai penyuplai data bagi setiap kementerian/lembaga untuk melakukan penindakan dan eksekusi program kebijakan terhadap sasaran kelompok masyarakat dan keluarga dalam basis data terpadu (PBDT) yang diperbarui berbasis data BPS sebagai acuan.

Adanya institusionalisasi kebijakan itulah yang menandai pergeseran besar dari penanggulangan menuju percepatan

kebijakan kemiskinan. Penanggulangan sifatnya lebih pada forum administratif bagi kementerian/lembaga untuk merumuskan sendiri dengan data masing-masing dalam mengeksekusi kebijakan. Percepatan lebih pada masalah sinergi data dan pengendalian kebijakan penanggulangan kemiskinan. Perbedaan lain adalah Wakil Presiden ditempatkan sebagai ketua TNP2K, sebelumnya di bawah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Perbedaan lainnya yang cukup signifikan adalah TNP2K bersifat independen dan melakukan fungsi koordinasi dengan TKPK Kabupaten/Kota yang memiliki sifat independen pula. Hal inilah yang menimbulkan peluang secara konstitusional bagi TKPK Kabupaten/Kota untuk melakukan diskresi kebijakan sendiri terhadap masalah penanggulangan kebijakan kemiskinan di daerah masing-masing.

Analisis lain dalam melihat pergeseran pola pikir dari penanggulangan menjadi percepatan sebenarnya lebih berpijak pada akselerasi penurunan nominal angka penduduk miskin secara kuantitatif. Pada era SBY, transisi tersebut diikuti kebijakan penambahan materi sebagai titik tekan utama, baik itu dalam penambahan angka bantuan sosial maupun meningkatnya jumlah pembiayaan program pemberdayaan sosial. TNP2K diposisikan sebagai lembaga yang mengawasi dan redistribusi material tersebut. Secara garis besar, angka penurunan kemiskinan pada era pemerintahan SBY berjalan secara fluktuatif. Pada 2005, angka kemiskinan sebesar 15,9%; tahun 2006 sebesar 17,6%; tahun 2007 sebesar 16,4%; dan pada Maret 2008 sebesar 15,4% (*Kompas.com* 2008). Pada periode kedua, dalam prospek penurunan kemiskinan 2009–2014, tercatat tren positif penurunan orang miskin dari tahun 2009 mencapai 14,15%; 2010 mencapai 13,33%; 2011–2013 mencapai 12%; dan 2014 tinggal 11,25% saja persentase penduduk miskin dari populasi penduduk Indonesia (Safrezi 2014). Jika

ditinjau secara kuantitatif, terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dalam populasi masyarakat Indonesia. Jika ditinjau secara kualitatif, makna percepatan dalam penanggulangan kebijakan kemiskinan tidak berdampak terhadap perbaikan kualitas orang miskin. Di sinilah posisi penelitian ini menjadi penting.

Narasi penting yang perlu dikaji adalah pemberian bantuan berupa materi yang belum tentu memperbaiki kualitas diri (masyarakat). Masyarakat malah menjadi tergantung terhadap bantuan tersebut. Pola pikir *trickledown effect* belum menjadi akar pemecah yang solutif dan kuratif bagi perbaikan kualitas hidup orang miskin. Berbagai permasalahan mengenai kualitas hidup orang miskin dianalisis sebagai berikut. *Pertama*, masalah data menjadi krusial dalam kebijakan kemiskinan karena terdapat berbagai versi data, baik di tingkat pusat, pemerintah daerah, maupun komunitas masyarakat sendiri. Kesenjangan data membuat banyak kebijakan kemiskinan hanya berpijak pada penyaluran dana dan bantuan, namun tidak mengurai masalah peningkatan kualitas diri masyarakat. Secara garis besar, penyaluran bantuan dan dana sosial secara teknis berhasil mengurangi angka kerentanan sosial di masyarakat, namun tidak dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial di masyarakat tersebut. *Kedua*, masalah koordinasi menyebabkan kebijakan penanggulangan kemiskinan memang berimplikasi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, namun menimbulkan permasalahan koordinasi dalam implementasi program. Masalah utama kebijakan, seperti tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) dan tumpang tindih implementasi (*overlying*) dalam kebijakan kemiskinan, membuat banyak sasaran kelompok masyarakat ataupun keluarga miskin tidak terkena dampak kebijakan. *Ketiga*, masalah pemberdayaan sosial, misalnya penguatan usaha ekonomi UKM, tidak sepenuhnya berhasil diterapkan. Kendala terbesar adalah minimnya fasilitas

pelatihan yang disediakan pemerintah secara simultan bagi masyarakat dan penyediaan pasar untuk menampung hasil olahan mereka. Hal ini berdampak pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, percepatan penanggulangan kemiskinan diatur dalam dua regulasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) 7/2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dan PP166/2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kedua regulasi tersebut cukup berbeda dengan regulasi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan pada era Presiden Susilo Bambang (SBY). Pada era Presiden Jokowi, program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program bantuan sosial yang terbagi atas tiga program penting, yakni Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ketiga bentuk program bantuan sosial tersebut didistribusikan secara menyeluruh dan merata melalui setiap kementerian/lembaga sebagai fungsi koordinator. Ketiga produk penanggulangan kemiskinan tersebut berupaya memfokuskan penyaluran bantuan tepat terarah kepada mereka yang membutuhkan. Dengan adanya tabungan PSKS, pemerintah berupaya agar masyarakat mengembangkan aset sebagai nilai ekonomi dan nilai tambah. Adanya perubahan paradigma dari semula berbasis peningkatan daya produksi dan konsumsi menuju pendekatan aset ini menarik untuk dicermati. Terlebih lagi, hal itu terjadi dalam perubahan strategi TNP2K dalam melihat kemiskinan bukan sebagai masalah, namun sebagai realita sosial. Hal mendasar yang perlu dilihat adalah kemunculan orang miskin bukan disebabkan keterbatasan finansial, namun lebih pada keterbatasan faktor produksi dan aset yang dimiliki sehingga sulit mendapatkan nilai tambah pendapatan. Kondisi tersebut

berpengaruh terhadap kondisi perekonomian subsisten yang masih tumbuh di kalangan penduduk desa. Selain pendekatan aset yang menjadi titik masalah, premis lain yang perlu diperhatikan dari perubahan strategi penanggulangan kemiskinan adalah tabungan PSKS. Dalam pendekatan sebelumnya, kemiskinan diatasi dengan terus menghasilkan pendapatan untuk menyeimbangkan angka konsumsi agar terjadi keseimbangan produksi ataupun konsumsi. Hal itu justru menimbulkan kecenderungan konsumtif karena masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun tersier daripada primer. Adanya tabungan PSKS diharapkan memperkecil peluang konsumsi tersebut.

Menyadari ketiga permasalahan yang timbul dalam percepatan pengentasan kemiskinan pada era pemerintahan sebelumnya, pembangunan kemudian diarahkan pada penduduk desa agar mampu berdaya, baik secara individu maupun kolektif. Pada era sebelumnya, percepatan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan pasar untuk menciptakan semangat kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Namun hal ini belum berhasil diterapkan untuk masyarakat miskin desa-kota. Ketika dihadapkan pada realita pasar, produk yang dihasilkan tidak mampu bersaing dengan aktor pasar lainnya. Kondisi ini kerap terjadi lantaran penetrasi swalayan modern tidak terkontrol sampai wilayah perdesaan.

Perbedaan penanganan kebijakan kemiskinan antara pemerintahan SBY dengan Jokowi yang mendasar adalah eksistensi dan posisi lembaga TNP2K. TNP2K pada era pemerintahan SBY berfungsi sebagai koordinator berbagai kebijakan di setiap kementerian/lembaga. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dilaksanakan secara *top-down* kepada TKPKD selaku mitra TNP2K di daerah. Berbeda halnya dengan TNP2K pada era Pemerintahan Joko Widodo yang menyederhanakan berbagai

program kebijakan menjadi tiga program saja. Selain itu, relasi TNP2K dan TKPKD tidak lagi diatur dalam hubungan yang sifatnya *top down*, namun lebih sebagai mitra. TKPKD bertindak independen dalam mengeluarkan inovasi kebijakan kemiskinan. Hal ini berbeda dengan posisi TNP2K sebelumnya yang memiliki kekuatan untuk menekan pemerintah daerah dalam hal kebijakan lokalnya. Hal penting lain yang perlu diingat dalam membahas masalah kemiskinan adalah ketidaksamaan informasi data yang diperoleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan LSM. Ketidaksamaan tersebut berkaitan dengan upaya pemutakhiran data yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Seperti yang telah diulas sebelumnya, sering terjadi masalah *overlapping* dan *overlaying* dalam kebijakan. Dalam hal ini, kepemilikan data kolektif selalu menjadi masalah dalam perumusan sasaran kebijakan kemiskinan.

Buku ini tidak dimaksudkan untuk menjawab persoalan *overlapping* atau *overlaying* data tersebut, tetapi untuk mencari cara atau model perbaikan kualitas orang miskin, khususnya meningkatkan ketahanan sosial dalam masyarakat.

B. Ketahanan Sosial Budaya

Konsep ketahanan sosial budaya yang dimaksud dalam penelitian ini berasal dari konsep *social resilience* yang berarti daya lenting sosial. Pengertian itu dikaitkan dengan kondisi seseorang atau kelompok yang berhasil kembali ke situasi normal setelah mengalami tekanan yang besar, seperti bencana alam. Aspek tekanan dalam penelitian ini tidak mengacu pada tekanan yang dramatis, seperti bencana alam, tetapi pada tekanan-tekanan yang dialami hampir semua keluarga, seperti anggota keluarga tertimpa sakit berat yang membutuhkan biaya besar atau biaya pengobatan jangka panjang, kematian anggota keluarga yang berpotensi sebagai pencari nafkah,

pencari nafkah kehilangan pekerjaannya, dan sebagainya. Konsep ketahanan sosial budaya dalam penelitian merupakan kondisi ideal di mana rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinannya dan bertahan untuk tidak jatuh ke dalam perangkap kemiskinan lagi. Kemampuan ini bukan sesuatu yang sudah dimiliki sejak awal.

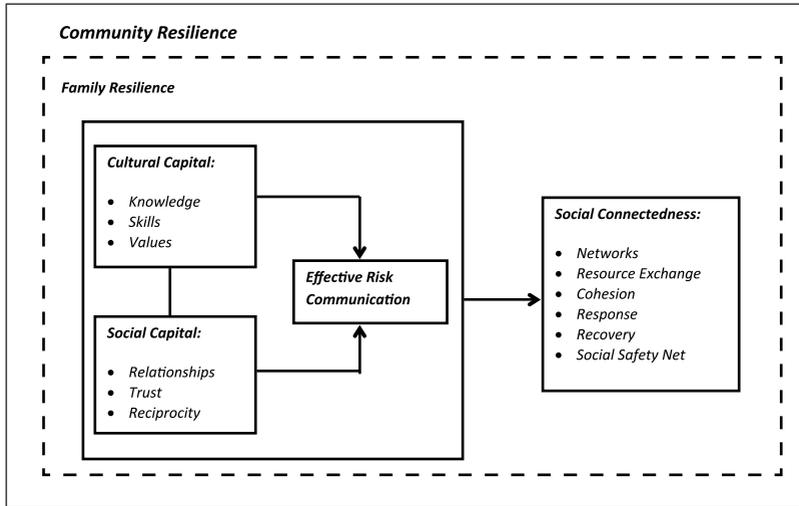
Ada banyak faktor yang memengaruhi kemampuan setiap rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Salah satunya adalah jumlah pencari nafkah di dalam satu rumah tangga. Semakin banyak pencari nafkah maka semakin besar pendapatan yang dibawa masuk. Kedua, jenis pekerjaan yang dilakukan para pencari nafkah. Semakin rutin pendapatan yang diperoleh atau semakin besar pendapatan yang diterima, semakin mudah bagi rumah tangga dimaksud untuk mengatur keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran serta melakukan *savings*. Artinya, semakin tinggi kemampuan rumah tangga tersebut untuk menghadapi dan mengatasi salah satu krisis yang disebutkan tadi.

Buku ini diarahkan untuk melihat kemampuan keluarga miskin di perdesaan dan di perkotaan dalam mengatur keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta melakukan *savings* yang terefleksikan pada aset yang dimiliki, seperti rumah, kendaraan bermotor, dan barang-barang berharga lainnya. Kemampuan atau ketidakmampuan ini diasumsikan dapat dideteksi melalui berbagai **dimensi kerentanan**, seperti jumlah pencari nafkah yang lebih sedikit *vis-à-vis* jumlah anggota keluarga yang menjadi beban tanggungan; ketiadaan aset penting, seperti kepemilikan rumah, kendaraan bermotor dan sebagainya; adanya anggota keluarga yang berfungsi atau berpotensi sebagai pencari nafkah yang sakit berat atau meninggal dunia; jenis pekerjaan yang dilakukan tidak memberikan pendapatan yang rutin atau cukup besar, seperti bekerja serabutan; tidak adanya anggota keluarga yang dalam waktu dekat akan mampu menjadi pencari nafkah atau pendidikan calon

pencari nafkah tidak memadai untuk pekerjaan yang menghasilkan pendapatan rutin, dan seterusnya.

C. Kerangka Berpikir dan Operasionalisasi Konsep

Sebelum membicarakan *social resilience* masyarakat miskin, kita perlu terlebih dahulu membahas *family resilience* karena keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat mana pun di dunia ini. *Social resilience* masyarakat miskin—yang secara konseptual merupakan *community resilience*—secara sederhana didefinisikan sebagai penjumlahan *family resilience* setiap rumah tangga yang menjadi bagian dari suatu komunitas. Konsep *family resilience* sebagaimana diperkenalkan oleh Martin-Breen dan Anderies (2011) mencakup beberapa aspek penting, seperti *cultural capital* yang meliputi *knowledge*, *skills*, dan *values*; dan *social capital* yang mencakup *relationships*, *trust*, dan *reciprocity*. Semua itu ditambah *effective risk communication* akan menghasilkan *social connectedness* yang terjabarkan atas *networks*, *resource exchange*, *cohesion*, *response*, *recovery*, dan *social safety net*. Menurut mereka, “a scale-based rating” adalah cara yang paling sederhana untuk melakukan “resilience assessment”, tetapi “[a]ssessing the resilience of a non-linear or complex adaptive system” membutuhkan pendekatan yang berbeda, karena tidak ada angka yang bisa dikalkulasikan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mencoba mengukur tingkat *resilience* rumah tangga miskin karena tidak mungkin mendapatkan data longitudinal yang dibutuhkan untuk itu. Namun pendekatan Martin-Breen dan Anderies (2011) ini menjadi *theoretical construct*, yang berguna bagi tim peneliti dalam memahami kerentanan rumah tangga miskin yang diteliti, yakni rumah tangga menjadi rentan ketika unsur-unsur yang membentuk *family resilience* tidak ada atau tidak lengkap.

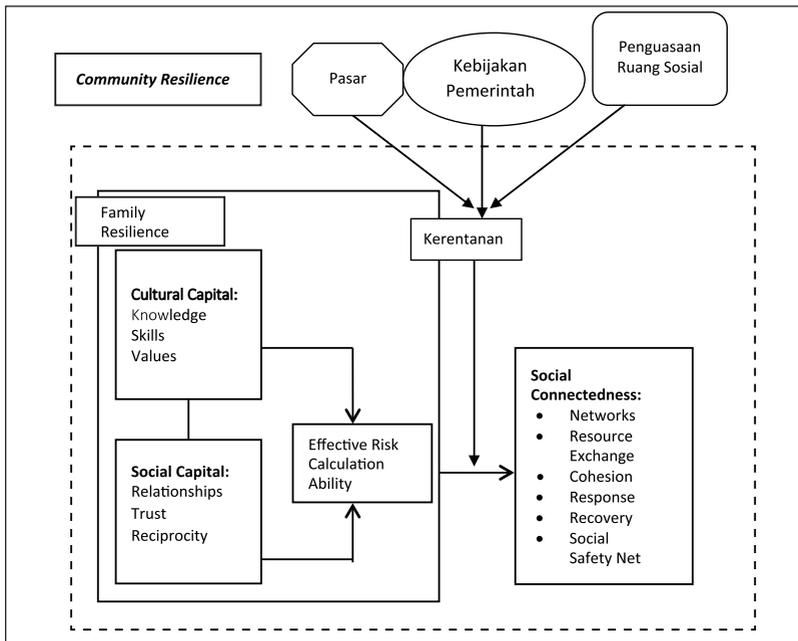


Gambar 2. Kerangka Konseptual *Community Resilience & Family Resilience*

Penting untuk dicatat bahwa konstruksi teoretis Martin-Breen dan Anderies (2011) ini mempunyai kelemahan dalam hal konteks padahal konteks sangatlah penting. Seperti kita tahu, setiap keluarga tidak tinggal di ruang kosong, tetapi di sebuah ruang sosial yang penuh dinamika hubungan antarkelompok. Setidaknya, kita bisa membedakan dua ruang sosial berdasarkan proses urbanisasi, yaitu ruang perkotaan dan ruang perdesaan. Secara umum, kita membedakan ruang perkotaan dan ruang perdesaan melalui jenis produksi utama yang dihasilkan, yaitu industri untuk ruang perkotaan dan pertanian untuk ruang perdesaan. Selain itu, perlu diperhitungkan keberadaan pasar, baik pasar tenaga kerja maupun pasar konsumtif terkait kegiatan ekonomi dan kehidupan keluarga. Tentu saja peran pemerintah pun tidak bisa diabaikan karena keluarga adalah bagian dari komunitas warganegara yang berada di bawah pengaturan negara. Untuk rumah tangga miskin, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun pada tingkat komunitas (lokal kelurahan/desa), merupakan faktor utama yang diamati dan dibahas dalam buku ini.

Mempertimbangkan kesulitan untuk melakukan *assessment* terhadap *family resilience*, sebagaimana telah dikemukakan, tim peneliti memilih melakukan *vulnerability assessment* atau mengukur kerentanan rumah tangga miskin. Kerentanan mempunyai banyak definisi, misalnya kemiskinan, kelemahan fisik, keterisolasian, kerentanan sendiri, dan ketidakberdayaan. Kelima hal ini membentuk apa yang disebut Chambers (2006) sebagai *poverty*



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

trap. Dalam melakukan *vulnerability assessment*, Shubham, Jalan, dan Suryahadi (2002) menyatakan:

An assessment of vulnerability is... innately a more difficult task than assessing who is poor and who is not. To assess a household's vulnerability to poverty we need to make inferences about its future consumption prospects. And in order to do that, we need a framework for thinking explicitly about both the inter-temporal aspects and cross-sectional determinants of consumption patterns at the household level.

Oleh karena itu, menurut Chaudhuri (2003), “Assessment kerentanan ini harus dilakukan secara *multiple levels* dan diarahkan pada *multiple issues*, dengan struktur pertanyaan yang secara hierarkis berhubungan (setiap tahap semakin progresif dan terfokus).” Chaudhuri (2003) menambahkan, contoh pertanyaan awal adalah sejauh mana kerentanan pada populasi yang diteliti. Rincian pertanyaannya, yaitu (1) Seberapa meluas kerentanan terhadap kemiskinan tersebut? (2) Apakah rumah tangga rentan terhadap kemiskinan terutama karena pemanfaatan mereka labil/tidak stabil sehingga membahayakan (*their consumptions are volatile*)? Jika ya, mengapa pemanfaatan mereka labil dan membahayakan; (3) Apakah karena mereka menghadapi risiko tingkat tinggi; atau (4) karena kemampuan mereka yang terbatas bahkan untuk menghadapi risiko tingkat sedang? (5) Bagaimana penyebab kerentanan tersebut bervariasi di antara berbagai segmen populasi? Pertanyaan kemudian meningkat menjadi: (6) Siapa yang dianggap rentan? (7) Bagaimana konsentrasi kerentanan di dalam segmen populasi yang berbeda? (8) Jika diperlukan intervensi, kepada siapa intervensi itu harus diarahkan? Selanjutnya, (9) tipe-tipe intervensi seperti apa yang harus dilakukan? Akhirnya, (10) kita perlu mengidentifikasi sumber risiko di mana rumah tangga paling terekspos, serta alat-alat untuk menanggulangi risiko

tersebut yang dimiliki, baik yang merupakan akses pribadi maupun akses publik.

Jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan itu terbagi atas dua bagian atau dua tahapan. Bagian pertama diarahkan untuk mengetahui penyebab kerentanan itu sendiri dikaitkan dengan risiko yang dihadapi. Pada tahap berikutnya, bagian kedua diarahkan untuk pengidentifikasian siapa yang dianggap rentan dan bagaimana intervensi dilakukan untuk mengurangi kerentanan tersebut merupakan ide utamanya. Buku ini ditujukan untuk tahap yang pertama, dan untuk mengetahui penyebab kerentanan, tim peneliti menyebarkan kuesioner yang disusun berdasarkan contoh kuesioner Susenas yang dimiliki BPS dan gambaran detail dari keluarga miskin di Meksiko dalam buku Oscar Lewis yang berjudul *Five Families: Mexican Case Studies in The Culture of Poverty*. Penggabungan tersebut menghasilkan kuesioner yang pertanyaan-pertanyaannya mencakup 12 dimensi kerentanan yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Dengan mengambil orang miskin sebagai fokus, buku ini sejak awal diarahkan untuk melihat masalah kerentanan pada keluarga-keluarga miskin yang telah diidentifikasi negara melalui daftar *by name by address* yang dibuat BPS (Badan Pusat Statistik untuk TNP2K-Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). TNP2K (2016) menyatakan bahwa definisi daftar atau disebut basis data terpadu (BDT) untuk program perlindungan sosial adalah:

“Sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 24,5 juta rumah tangga atau 96 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Sumber utama basis data terpadu adalah hasil kegiatan pendataan program perlindungan sosial yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli–Desember 2011 (PPLS 2011).”

Tabel 1. Alat Ukur Kerentanan Sosial Rumah Tangga Miskin

No.	Variabel	Indikator
1.	<i>Tingkat Beban Rumah Tangga</i> Kondisi demografi yang dianggap dapat membebani sebuah rumah tangga sehingga dapat memengaruhi kerentanan sosial RT tersebut.	<i>Jumlah anggota rumah tangga (ART)</i> Jumlah orang yang biasanya bertempat tinggal dalam sebuah rumah tangga dan makan dari satu dapur yang ada pada waktu pendataan atau sementara tidak ada. <hr/> <i>Jenis kelamin kepala rumah tangga (KRT)</i> Indikator ini pada hakikatnya menekankan pentingnya persepsi gender untuk mengkaji rumah tangga dengan menggarisbawahi peran-peran yang melekat pada kepala rumah tangga laki-laki (KRTL) maupun kepala rumah tangga perempuan (KRTP). Keberadaan KRTP atau KKP dianggap dapat meningkatkan beban RT karena akan menjalankan lebih banyak peran, seperti KRT, ibu dari seluruh ART, pencari nafkah, maupun perwakilan RT dalam komunitas. <hr/> <i>Produktivitas KRT berdasarkan usia</i> KRT yang berada dalam kisaran usia produktif, yaitu 15–60 tahun, dianggap memiliki kemungkinan untuk menyumbangkan produktivitas yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi tingkat beban rumah tangga.
2.	<i>Tingkat Pendidikan</i> Kondisi pendidikan dari seluruh ART yang dianggap dapat berkontribusi terhadap kerentanan sosial RT tersebut.	<i>Tingkat pendidikan KRT</i> Indikator ini mengukur pengalaman pendidikan dari KRT, mulai dari tidak pernah sekolah hingga Perguruan Tinggi (PT).
3.	<i>Tingkat Produktivitas</i> Kondisi keikutsertaan ART untuk berpartisipasi aktif untuk menghidupi sebuah RT. Semakin sedikitnya ART yang produktif diasumsikan dapat meningkatkan kerentanan sebuah RT.	<i>Jumlah pencari nafkah dalam RT</i> Seluruh ART yang bekerja untuk menafkahi RT.

No.	Variabel	Indikator
4.	<i>Tingkat Kesehatan</i> Kondisi kerentanan RT dilihat dari pengalaman sakit berat ataupun peristiwa kematian yang terjadi dalam sebuah RT.	<i>Jumlah ART sakit</i> Jumlah seluruh ART yang sedang sakit berat, seperti stroke, diabetes, dan kanker dalam sepuluh tahun terakhir.
		<i>Jumlah ART wafat</i> Jumlah seluruh ART yang wafat dalam sebuah RT dalam sepuluh tahun terakhir.
5.	<i>Tingkat Pendapatan</i> Kondisi kerentanan RT ditinjau dari pendapatan yang diperoleh untuk menghidupi seluruh ART	<i>Jumlah pendapatan yang diterima RT</i> Seluruh pendapatan yang diterima dari seluruh ART yang bekerja setiap minggu.
		<i>Jumlah remitansi yang diterima RT</i> Seluruh remitansi yang diterima dari ART yang merantau, baik di luar kota maupun luar negeri setiap bulan.
6.	<i>Efektivitas Migrasi</i> Kondisi yang menggambarkan seberapa jauh migrasi dapat berkontribusi untuk mengurangi kerentanan sebuah RT.	<i>Jumlah ART merantau dan mengirimkan remitansi</i> Seluruh ART yang merantau dan mengirimkan remitansi sebagai kontribusi nafkah bagi RT.
7.	<i>Tingkat Kepemilikan Aset</i> Kondisi yang menggambarkan aset-aset minimal yang dimiliki sebuah RT.	<i>Kepemilikan 25 aset</i> Indikator ini menanyakan kepemilikan 25 aset terpenting, yaitu (a) rumah; (b) kebun/sawah; (c) ternak; (d) motor; (e) sepeda; (f) perahu motor; (g) perahu tidak bermotor; (h) perhiasan; (i) meja; (j) kursi; (k) lemari; (l) televisi; (m) radio; (n) kipas angin; (o) kulkas; (p) tungku kayu bakar; (q) kompor minyak tanah; (r) kompor gas; (s) rak dapur; (t) tempat tidur; (u) mesin jahit; (v) setrika; (w) sepatu; (x) perkakas pertukangan; (y) alat usaha (gerobak, dokar, becak, dan lain-lain.)

No.	Variabel	Indikator
8.	<p><i>Tingkat Pengeluaran</i> Kondisi yang menunjukkan kerentanan sebuah RT berdasarkan jumlah pengeluarannya, baik pengeluaran makanan maupun pengeluaran bukan makanan.</p>	<p><i>Pengeluaran Makanan</i> Jumlah pengeluaran makanan yang dikeluarkan oleh sebuah RT dalam kurun waktu seminggu. Pengeluaran makanan ini mencakup makanan pokok, lauk-pauk ikan/daging/ayam, telur dan susu, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak dan lemak, minuman, jajanan, serta tembakau, dan sirih.</p> <hr/> <p><i>Pengeluaran Rutin Bukan Makanan</i> Jumlah pengeluaran rutin bukan makanan yang dikeluarkan RT dalam jangka waktu sebulan terakhir. Pengeluaran ini meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga serta aneka barang dan jasa.</p> <hr/> <p><i>Pengeluaran Tidak Rutin Bukan Makanan</i> Jumlah pengeluaran tidak rutin bukan makanan yang dikeluarkan sebuah RT dalam kurun waktu setahun terakhir. Pengeluaran ini mencakup pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; barang tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; serta keperluan pesta dan upacara/kenduri tidak termasuk makanan dengan mengikutsertakan partisipasi RT untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri di komunitasnya.</p>
9.	<p><i>Pengalaman Berutang</i> Kondisi yang menggambarkan strategi RT untuk bertahan hidup dengan berutang.</p>	<p><i>Kemampuan melunasi utang</i> Indikator ini mencoba untuk memahami kerentanan sosial RT melalui kemampuan sebuah RT dalam melunasi utangnya, mulai dari (a) tidak bisa membayar; (b) mencicil; hingga (c) membayar sekaligus dalam satu waktu.</p>

No.	Variabel	Indikator
10.	<p><i>Pengalaman Menjual Aset</i> Kondisi yang menggambarkan strategi RT untuk bertahan hidup dengan menjual asetnya, baik yang penting maupun aset yang lebih kecil.</p>	<p><i>Pengalaman menjual dan membeli kembali aset penting yang dimiliki, seperti rumah, sawah, kebun, ternak, motor.</i> Melihat kerentanan dengan mengkaji pengalaman RT bertahan hidup dengan menjual aset pentingnya yang diukur dari (a) tidak mampu membeli kembali aset yang telah dijual; (b) mampu membeli kembali sebagian dari aset yang telah terjual; (c) mampu membeli kembali sebagian dari aset yang telah terjual; hingga (d) tidak pernah menjual aset.</p> <hr/> <p><i>Pengalaman menjual dan membeli kembali aset, seperti perabot rumah dan peralatan elektronik.</i> Melihat kerentanan dengan mengkaji pengalaman RT bertahan hidup dengan menjual asetnya yang diukur dari (a) tidak mampu membeli kembali aset yang telah dijual; (b) mampu membeli kembali sebagian dari aset yang telah terjual; (c) mampu membeli kembali sebagian dari aset yang telah terjual; hingga (d) tidak pernah menjual aset.</p>
11.	<p><i>Persepsi Menghadapi Kesulitan</i> Pandangan RT tentang kemampuannya dalam menghadapi kesulitan.</p>	<p><i>Pandangan RT tentang kemampuannya dalam menghadapi kesulitan.</i> Melalui indikator ini, hendak diketahui cara RT memandang kemampuannya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi masa-masa sulit, mulai dari (a) tidak mampu menghadapi; (b) mampu menghadapi dengan perubahan pendapatan atau sumber makanan; hingga (c) mampu menghadapi tanpa kendala.</p>
12.	<p><i>Persepsi tentang Hidup</i> Pandangan RT tentang makna hidup.</p>	<p><i>Pandangan RT terhadap makna hidup</i> Pandangan RT tentang makna hidup sebagai sebuah usaha atau justru hanya takdir yang telah ditetapkan.</p>

Tabel 2. Penduduk Miskin di Pulau Jawa

Provinsi	Penduduk Miskin						Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Kota		Desa		Total		Kota	Desa	Total
	Jumlah (000)	(%)	Jumlah (000)	(%)	Jumlah (000)	(%)			
DKI Jakarta	393,98	3,92	-	-	393,98	3,92	447797	-	447797
Jawa Barat	2578,36	8,4	1748,71	11,35	4327,07	9,44	288742	277645	285013
Banten	375,69	4,73	247,14	6,67	622,84	5,35	315239	281925	304636
Jawa Tengah	1945,29	12,68	2891,17	15,96	4836,45	14,46	279036	267991	273056
DI Y	333,03	13,81	211,84	17,36	544,87	15,00	327273	286137	313452
Jawa Timur	1535,81	8,35	3250,98	16,13	4786,79	12,42	287582	278429	282796
Indonesia	10507,20	8,34	17772,81	14,17	28280,01	11,25	318514	286097	302735

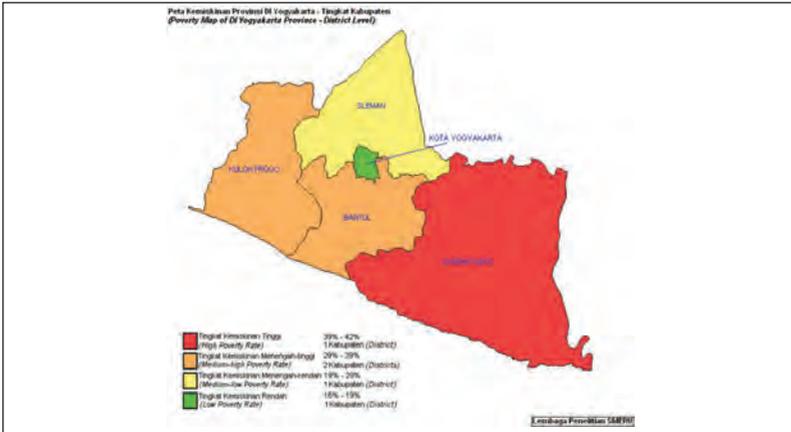
Sumber: BPS (2016)

Provinsi Banten dan DIY dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data kemiskinan per wilayah di Pulau Jawa, kedua provinsi tersebut merupakan wilayah yang tingkat kemiskinannya terendah⁴ dan tertinggi, sebagaimana tergambar pada Tabel 2.

Berdasarkan peta kemiskinan Provinsi DIY, Kota Yogyakarta dipilih untuk merepresentasikan daerah perkotaan. Kabupaten Gunungkidul dipilih untuk merepresentasikan daerah perdesaan.

Kabupaten Gunungkidul dipilih di antara empat kabupaten di Provinsi DIY karena berdasarkan peta kemiskinan tersebut, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut adalah yang tertinggi (39–42%). Kota Yogyakarta memperlihatkan tingkat kemiskinan rendah (16–19%), tetapi kota Yogyakarta adalah satu-satunya kota di Provinsi DIY, dan merupakan ibu kota provinsi.

⁴ Tim peneliti tidak mengambil Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah karena tidak ada daerah perdesaan di Provinsi DKI Jakarta.



Sumber: Lembaga Penelitian SMERU (2000)

Gambar 4. Peta Kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta

Tabel 3. Penduduk Miskin di Provinsi Banten

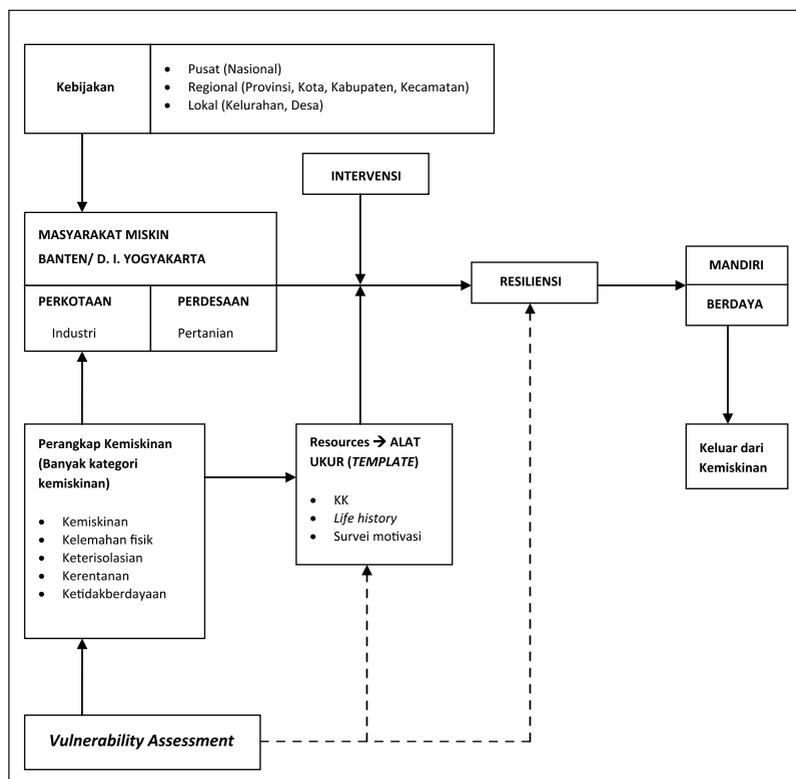
Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin Tahun 2010	
	Jumlah	Persen (%)
Pandeglang	127562	11,14
Lebak	124840	10,38
Tangerang	203683	7,18
Serang	88965	6,34
Kota Tangerang	123608	6,88
Kota Cilegon	16692	4,46
Kota Serang	40501	7,02
Kota Tangerang Selatan	21748	1,67
Banten	747598	7,16
Indonesia	31023390	13,33

Sumber: BPS (2011) dalam TNP2K (2011)

Berdasarkan Tabel 3, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang dipilih untuk merepresentasikan daerah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Banten. Jika melihat tabel tersebut, jumlah penduduk miskin di Kota Serang bukan yang terbesar di antara empat kota

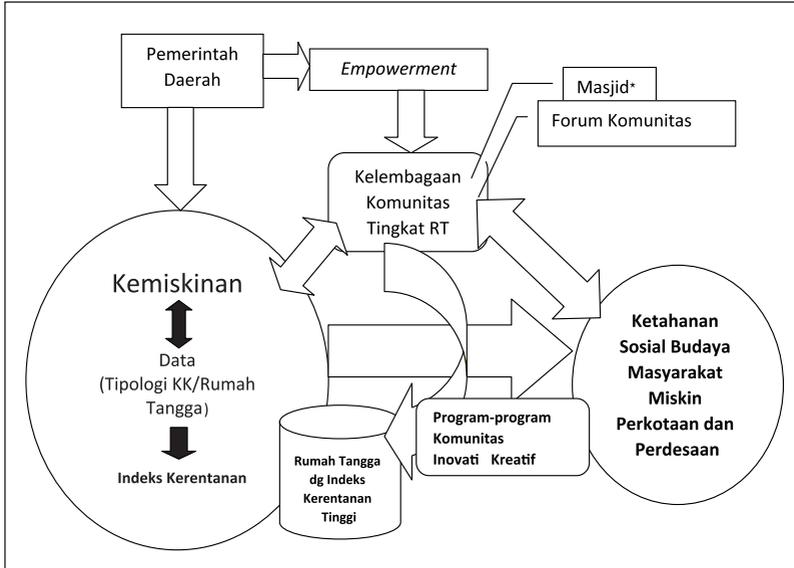
yang ada di Provinsi Banten (Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan), namun Kota Serang adalah ibu kota provinsi dan sekaligus kota tertua di Provinsi Banten. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang memiliki penduduk miskin terbanyak di antara empat kabupaten di Provinsi Banten (Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang).

Dengan menempatkan kerangka pikir tersebut dalam sebuah skema operasional, alur pembahasan dalam buku ini dapat disketsakan sebagai berikut:



Gambar 5. Bagan/Skema Operasional

Secara spesifik, buku ini diarahkan untuk menyusun model tentatif ketahanan sosial budaya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6.



Catatan: *Kelembagaan komunitas RT dieksplicitkan Masjid karena dari hasil observasi di dua lokasi penelitian, Masjid menjadi pusat kegiatan masyarakat miskin.

Gambar 6. Model Tentatif Membangun Ketahanan Sosial Budaya

D. Pengumpulan Data

Kuesioner yang disebar di berjumlah 1.200, sebanyak 600 kuesioner disebar di Provinsi DIY dan sebanyak 600 kuesioner disebar di Provinsi Banten. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Kota Yogyakarta dan Kota Serang dipilih untuk merepresentasikan daerah perkotaan, sedangkan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Pandeglang dipilih untuk merepresentasikan daerah perdesaan. Dari setiap lokasi kemudian dipilih empat kecamatan yang jumlah keluarga prasejahtera (KPS)-nya terbanyak. Jumlah

kuesioner di masing-masing kecamatan disesuaikan dengan jumlah KPS di kecamatan tersebut. Distribusi kuesioner di Provinsi DIY dan Banten dapat dilihat pada Tabel 4.

Sebelum membahas indeks kerentanan sebagai alat untuk membedakan kemiskinan di perdesaan dan di perkotaan, pada Bab II terlebih dahulu kita akan membahas ruang sosial sebagai faktor pembeda perdesaan dan perkotaan.

Tabel 4. Distribusi Kuesioner di Provinsi DIY dan Banten

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)						
No.	Kabupaten Gunungkidul			Kota Yogyakarta		
	Kecamatan	Σ KPS	Σ Sampel	Kecamatan	Σ KPS	Σ Sampel
1.	Gedangsari	5595	126	Tegalrejo	1566	109
2.	Saptosari	3498	79	Umbulharjo	1029	71
3.	Rongkop	2163	49	Kotagede	863	60
4.	Tanjungsari	2018	46	Wirobrajan	863	60
		13274	300		4321	300
Banten						
No.	Kabupaten Pandeglang			Kota Serang		
	Kecamatan	Σ KPS	Σ Sampel	Kecamatan	Σ KPS	Σ Sampel
1.	Panimbang	6117	93	Serang	5212	119
2.	Angsana	4844	73	Kasemen	5014	114
3.	Cikeusik	4485	68	Taktakan	1663	38
4.	Sukaresmi	4393	43	Cipocok Jaya	1273	29
		19839	300		13162	300

Keterangan: Perlu dicatat bahwa kuesioner yang valid berjumlah 1.199 kuesioner karena ada satu kuesioner yang tidak diisi secara lengkap.

BAB II RUANG SOSIAL

Seperti telah dikemukakan, penduduk miskin bukan hidup di ruang kosong, melainkan di ruang sosial. Ruang sosial dapat dibedakan menjadi ruang sosial perkotaan dan ruang sosial perdesaan. Pembahasan tentang ruang sosial ini sangat penting karena dapat menjelaskan hal-hal di luar rumah tangga miskin yang berdampak pada kemiskinan rumah tangga tersebut; jika kita kembali pada Gambar 3. Kerangka pemikiran pada bab I menyebutkan penguasaan ruang sosial sebagai salah satu variabel yang memengaruhi *family resilience*. Ruang sosial perkotaan dan ruang sosial perdesaan sendiri bukan merupakan dua ruang yang terpisah secara mutlak. Hasil penelitian Lewis (1959) memperlihatkan adanya “perjalanan urban” keluarga-keluarga petani dari perdesaan.

Berangkat dari gagasan dan argumen tentang sebuah antropologi berbeda, antropolog Lewis (1959) melaporkan pengamatan dan partisipasi langsungnya atas kehidupan (dalam sehari) lima keluarga (*family*) di dalam masyarakat Meksiko

kontemporer. Banyak yang dapat dibahas dari laporan Lewis (1959) tersebut. Salah satunya, kesan bahwa selain masuk ke dalam kategori *lower income*, kelima keluarga itu secara bersama-sama membentuk sebuah “perjalanan urban” (dari *peasants* menuju *urban dwellers*) dan memperlihatkan gerak mobilitas sosial ke atas. Menurut Lewis (1959), jika keluarga pertama adalah “*the Martinez family, which lives in a Mexican highland village, Azteca, about sixty miles south of Mexico city.*” Maka keluarga kelima, *the Castro family* adalah “*a nouveau riche family*,” di mana sang ayah, “*David Castro, is self-made post-Revolutionary millionaire who grew up in a slum tenement and who has by no means lost all of his lower-class traits.*” Sementara keluarga kedua, *the Gomez family*, adalah “*a family in transition from village to city life*,” keluarga ketiga, *the Gutierrez family*, “*a more urbanized lower-class family*,” dan keluarga keempat, *the Sanchez family*, “*a family which combines working class and lower middle class traits.*”

Munculnya “perjalanan urban” di Meksiko kontemporer, sebagaimana ditunjukkan Lewis (1959), tidak terlepas dari hubungannya dengan proses sejarah Meksiko yang berlangsung sejak 1901. Menurut Lewis, secara periodisasi, proses sejarah tersebut dapat dibedakan menjadi dua periode, yaitu periode antara 1910 hingga 1940 dan periode sesudah 1940. Pada kurun waktu tersebut, serangkaian perubahan bersifat ekonomi dan sosial berlangsung (Lewis 1959), “*...the transformation of semi feudal agrarian economy, the distribution of land to the peasants through the ejido program, the strengthening of labor’s position, the emancipation of the Indian, and the spread of public education,*” di mana “*industrialization and greater production became the new national slogans*” menyertai pertambahan jumlah penduduk yang signifikan, begitu dikemukakan Oscar Lewis, “*millions of peasants and villagers [move] into the cities.*” Jika “*the cities*” kemudian menampilkan “*the*

juxtaposition of wealthy quarters, middle-class housing, and slums for the majority,” maka gejala tersebut tidak tipikal Meksiko tetapi hasil praktik ekonomi politik dari apa yang disebut *the third world* atau dalam istilah Oscar Lewis *underdeveloped nations*—di mana Indonesia masuk dalam kategori ini, khususnya ketika berada di bawah rezim Orde Baru. *Slums* bukan melulu gejala “*Mexico City,*” yang berpenduduk 1,5 juta pada 1940 menjadi 4 juta pada 1957, atau Jakarta yang penduduknya bertambah dari 4,58 juta pada 1971 menjadi sekitar 10 juta pada 2014 (Murti 2014), tetapi juga di berbagai kota di *underdeveloped nations*. Keterangan Amin (2013) mengenai Tiongkok belakangan ini mungkin dapat memperjelas.

“The practitioners of China bashing are unaware—or pretend to be unaware—of ...[t]he inequality that is apparent from the existence of quarters with luxurious villas, on the one hand, and quarters with comfortable housing for the middle and working classes, on the other, is not the same as the inequality apparent from the juxtaposition of wealthy quarters, middle-class housing, and slums for the majority.”

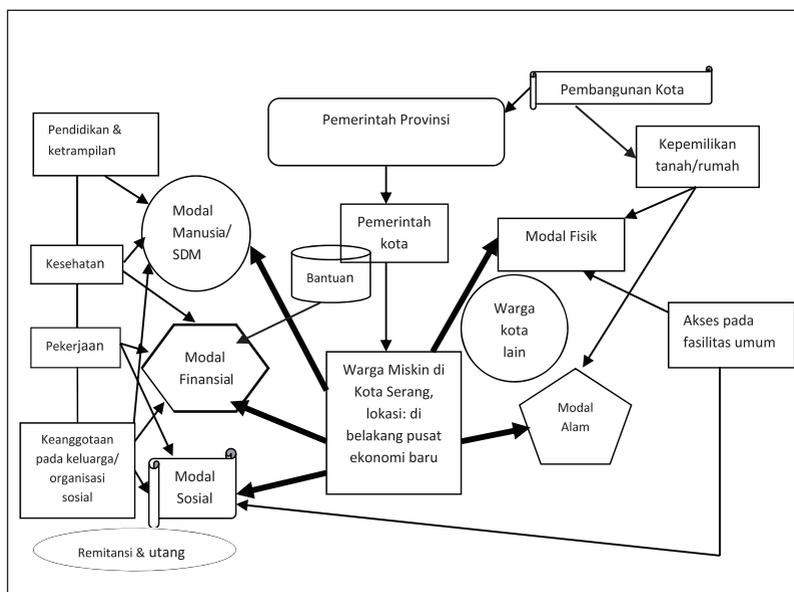
“Perjalanan urban” juga terjadi di dalam masyarakat Indonesia, dan seperti kondisi yang ditemukan di Tiongkok, hal itu dapat diindikasikan melalui keberadaan *slum area*. Akan tetapi, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa perkembangan *slum area* di suatu kota dipengaruhi oleh sejarah kota itu sendiri.

A. Kota, *Slum Area*, dan Sejarah

Slum area mewakili kemiskinan kota dan ketimpangan sosial karena kondisi fisik lingkungannya yang buruk (kumuh; kurangnya fasilitas dasar, seperti air dan sanitasi; struktur rumah yang tidak aman, terletak di lokasi yang tidak semestinya, seperti di pinggir kali atau rel kereta; serta dihuni oleh populasi yang jumlahnya melebihi kapasitas ruang yang ada). Tidak mudah mendeteksi

slum area di satu kota. Di Kota Serang, misalnya, *slum area*-nya tidak sejelas *slum area* di Kota Yogyakarta yang terkonsentrasi di pinggir Kali Code dan Winongo. Jika kita menelusuri sungai di Kota Serang (Ciwaka, Cikadueun, dan Cibanten), kita bisa menemukan karakteristik yang sama. Jika kita menanyakan di mana lokasi kemiskinan di Kota Serang kepada pemerintah daerah, kita akan ditunjukkan daerah Kasemen yang juga dikenal dengan nama Banten Lama. Hasil observasi pada 2015 menemukan bahwa daerah Kasemen bisa dinilai miskin dan atau terbelakang karena kondisi lingkungannya tidak berkembang sebagaimana bagian kota lainnya, bahkan cenderung masih bersifat semirural. Rumah tangga miskin atau RTM di wilayah Kasemen tercatat sebanyak 5.934 RTM. Jumlah RTM di masing-masing kelurahan berkisar antara 442 sampai 714 RTM. Di daerah yang disebut sebagai lumbung padi Kota Serang ini, selain bertani, hampir tidak ada alternatif pekerjaan lain. Daerah ini cenderung terisolasi dari pusat kota karena transportasi ke dan dari daerah ini terbatas. Satu-satunya jalur angkutan umum yang ada adalah dari Pasar Lama Serang atau Pocis ke arah Masjid Banten dan Karang Antu sebagai situs sejarah dan objek pariwisata. Pasar terdekat (Pasar Rau) pun letaknya di Kaligandu, Kecamatan Serang. Jika ingin pergi ke tempat-tempat lain di Kasemen, kendaraan tidak melewati jalan utama, tetapi harus melalui Pasar Rau. Titik-titik kemiskinan di Kota Serang yang lainnya lebih dikaitkan dengan profesi orang termiskin, yaitu pemulung, misalnya di daerah sekitar tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di Cilowong, Kecamatan Tak-takan. Di belakang Giant (jalan raya Pandeglang), Cipocok Jaya, kita masih bisa menemukan penduduk miskin yang hidupnya bergantung pada hasil memulung plastik dan barang-barang lain. Ada yang berpendapat bahwa orang-orang miskin ini kebanyakan pendatang, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka juga orang lokal. Mereka disebut orang lokal karena menikahi orang

setempat yang disebut jaseng atau Jawa Serang hingga mempunyai anak-anak yang telah dewasa. Sesungguhnya orang-orang tersebut sulit dikatakan sebagai pendatang lagi. Namun mereka masih diidentifikasi dan mengidentifikasi diri sebagai pendatang dari Bandung, Garut, Jawa Tengah, dan lainnya. Daerah Cipare (belakang jalan Ahmad Yani) di Kecamatan Serang yang memang berada di bantaran Kali Srenteng juga dikenal sebagai pemukiman kumuh karena pekerjaan penghuninya pedagang kaki lima dan sopir angkutan umum dengan pendapatan rata-rata per hari hanya sekitar Rp20.000–Rp80.000,-.



Sumber: Thung dkk. (2015)

Gambar 7. Bagan Lokasi Kemiskinan di Kota Serang

Secara historis, “perjalanan urban” yang berakhir di *slums* di Karesidenan Banten, yang kemudian menjadi Provinsi Banten, digambarkan oleh Okamoto dan Hamid (2008) sebagai berikut:

*“The Banten area is largely composed of two parts.... The northern area has been settled mainly by ethnic Javanese and the southern area mainly by ethnic Sundanese. The northern area is where the **jawara** are concentrated, and they supported the communist uprising in 1926. The two areas’ dividing line is around the subdistricts of Ciomas and Pabuaran; these subdistricts are Sundanese-speaking and famous for their **ulama** (Islamic preachers) and **jawara**. [...]”*

“Administratively, Banten province is composed of three cities (Serang, Cilegon, and Tangerang) and four kabupaten, or regencies (Serang, Lebak, Pandeglang, and Tangerang). The northern and eastern parts of the province—that is Cilegon city, Serang city, the northern part of Serang district, and Tangerang city and district—are industrial areas. The southern part of the province that includes Lebak, Pandeglang, and the southern part of Serang district are poor, agricultural areas.”

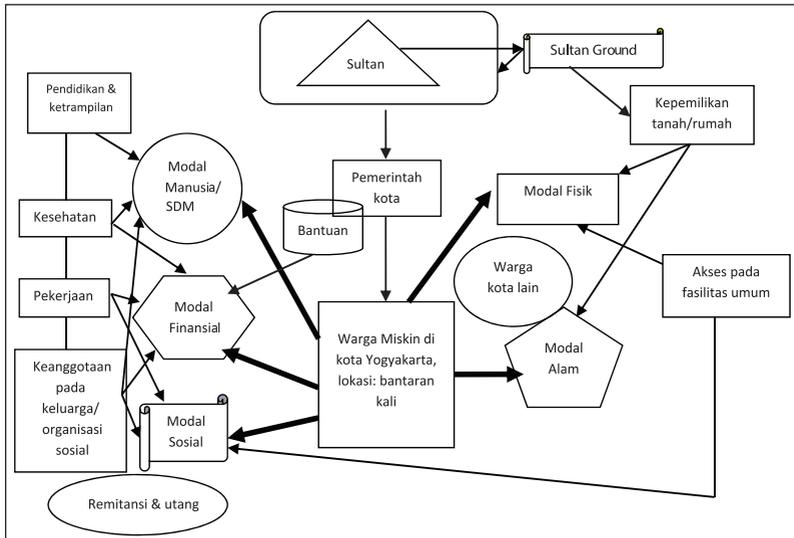
Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika hari ini Kabupaten Pandeglang adalah kabupaten terluas di Provinsi Banten, sekaligus daerah termiskin, di samping Kabupaten Lebak. Menurut Hidayat (2015), Kabupaten Pandeglang bahkan menyandang predikat Kabupaten Tertinggal. Mayoritas penduduk kabupaten Pandeglang adalah petani sawah tadah hujan yang sawahnya hanya bisa ditanami setahun dua kali. Buku *Pandeglang dalam Angka Tahun 2014* menyebutkan bahwa 44.900 ha (89,16%) dari luas Pandeglang (74.689 ha) merupakan persawahan, ladang, kebun, kolam/empang, tambak, perkebunan besar, dan lahan untuk tanaman hutan rakyat dan hutan negara (Supartoyo 2015). Persoalan mendasar di Kabupaten Pandeglang adalah infrastruktur pengairan untuk pertanian yang tidak memadai dibanding dengan

luas lahan pertaniannya. Menurut Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang, Winarno, dari total irigasi yang ada di Pandeglang,⁵ sebanyak 70% di antaranya kurang berfungsi... karena kerusakan pada bangunan fisik, juga terjadi pendangkalan (Ganet 2015).

Seperti telah disebutkan, *slum area* sangat mudah diidentifikasi di Kota Yogyakarta karena berada di bantaran kali, khususnya Kali Code dan Kali Winongo. Persoalan utama yang dihadapi mereka yang tinggal di bantaran kali adalah persoalan ruang. Sulit untuk mengetahui sudah berapa lama bantaran kali tersebut menjadi tempat pemukiman penduduk—yang pada akhirnya berubah menjadi *slum area*. Namun bertahannya bantaran Kali Code sebagai kantong kemiskinan selama beberapa dekade perlu disikapi melalui perspektif sejarah, yakni sebagai fenomena kontinuitas dan perubahan. Hasil observasi memperlihatkan bahwa Kali Code menjadi saksi bisu pergantian generasi ataupun tergantikannya orang-orang yang mampu meninggalkan bantaran sungai tersebut oleh pendatang baru. Jika dilihat dari sejarah pekerjaan, pada umumnya mereka berkutat di pekerjaan-pekerjaan berupah rendah—walaupun jenis pekerjaannya berbeda-beda.

Di samping dua lokasi tersebut, kita bisa juga menemukan warga miskin yang tinggal terhimpit di antara rumah-rumah kelas menengah atau elite. Kemiskinan mereka tidak saja dapat dilihat dari kondisi rumah yang tampak buruk di antara rumah-rumah

⁵ Kabupaten Pandeglang mempunyai areal irigasi seluas 70.225 ha yang mencakup irigasi teknis (17.608 ha), irigasi semi teknis (11.738 ha), dan irigasi desa (40.879 ha). Ada tiga pihak yang berwenang mengelola irigasi tersebut, namun kurang terkoordinasi. Kewenangan Pusat pada seluas 9.711 ha meliputi Daerah Irigasi Ciliman 5.423 ha dan Daerah Irigasi Cibaliung 4.288 ha; kewenangan Provinsi mencakup wilayah seluas 6.029 ha, meliputi Daerah Irigasi Cisata 2112 ha, Daerah Irigasi Pasir Eurih 1.245 ha, dan Daerah Irigasi Cilemer 2.672 ha; kewenangan kabupaten hanya pada wilayah seluas 54.485 ha meliputi 628 Daerah Irigasi dan tersebar di 35 Kecamatan.



Sumber: Thung dkk. (2015)

Gambar 8. Bagan Lokasi Kemiskinan di Kota Yogyakarta

sekitarnya, tetapi juga tampak dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan mereka tidak jauh dari jenis pekerjaan yang umumnya dilakukan warga miskin yang tinggal di bantaran Kali Code dan Kali Winongo, misalnya jasa tukang yang upah hariannya sangat kecil sehingga sebulannya tidak sampai Rp1.000.000,-.

Ferri (2016) menyatakan, hasil observasi tahun 2015 dan data *life history* pada Bab IV menunjukkan adanya sebuah wilayah di perkotaan yang disebut *wedi gengser* atau tanah milik pemerintah. Wilayah ini pada umumnya berada di bantaran kali dan cenderung dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk miskin dengan kondisi tak layak huni. Dari observasi lapangan, diketahui adanya hak pemilikan lahan yang disebut Sultan Ground dan atau Pakualaman Ground (Ferri 2016). Artinya, para penghuni lahan

Sultan Ground atau Pakualaman Ground hanya meminjam tanah tersebut sementara waktu. Jika diperlukan atau diminta pemiliknya, mereka harus meninggalkan tanah tersebut.

Kepemilikan Sultan dan atau Pakualaman atas tanah-tanah di Kota Yogyakarta terkait dengan sejarah pemerintahan Kota Yogyakarta yang berasal dari Kesultanan. Sementara itu, perubahan Kota Yogyakarta dari merkantilisme ke kapitalisme atau sebuah “perjalanan urban” yang berakhir di *slums*, digambarkan melalui kutipan-kutipan berikut:

*“... in 1918, the European Quarter shifted into the Dutch ‘Newtown’ (Kotabaru). Officially, this was a new **kampung**, but it was not identified as such by its inhabitants. For them it was the **Europeesche Wijk**: The European Quarter. The Colonialists tended to interpret **kampung** as “native quarter,” meaning a slumlike settlement with marked rustic characteristics.”*

*“By 1905, **nogoro** population was 80.000, and it covered about 1,484 ha. ...”*

*“**Kampung** were now identified as territorial-residential not functional units. In 1918, the first specifically urban offices were inaugurated within the state system proper: a town administrator (**wedono kota**) with two assistants (**assisten wedono**), one for the northern half of the city (**Tugu**), the other for the south (**Kraton**). Below these officers were the **kampung** leaders, now styled **kepala kampung** (“**kampung** head”). New legislation required them to be approved by the **assisten wedono**, but there were no other changes in their status or responsibilities.”*

*In 1932, another level was introduced, when the two **assisten** territories were divided into **kemantren**. The **assisten Tugu** now had five **mantri kepala kampung** under him, and the **assisten Kraton** four. The **mantri** were professional bureaucrats, hence the ‘proper’ state system deepened. The status of **kampung** and*

their functionaries did not change, but candidates for **kepala kampung** were now approved by the **mantri**. The capitals population had passed 100,000 by 1920 and was above 144,000 in 1932, with average population density around 9,730 persons per square kilometer. The **kemantren** level was added to facilitate administration of this growing urban mass.”

“... January 1944... the Japanese 16th Army revised urban government. There were 190,000 people in the city then and population density was over 12,800 per square kilometer. Yogyakarta’s 100 **kampung** became **aza**, replicating similar-sized administrative units in Japanese cities. These were declared, for the first time, to be units of civil government, even though their functionaries were unpaid and informally selected. They were required to have more functionaries than formerly: their chiefs (now termed **azacho**) were expected to acquire deputies and secretarial assistance. A new level of **kampung** government was introduced, as **aza** were divided into small neighborhood blocks called **tonarigumi**, each with its own chief (**tonarigumiyo**) and secretary.”

“In August 1945, the Japanese surrendered and Indonesia’s independence was proclaimed. Yogyakarta became a Special Region (**Daerah Istimewa**) of the new Republic, while remaining a Sultanate. Its capital city was divided into two **kabupaten**, whose heads (**bupati**) presided over twelve **kemantren**, each containing nine to twelve **kampung** units. Those units were now called **rukun kampung**.”

“In 1947, the Sultan’s capital became an ‘autonomous municipality’—**Haminte** Kota Yogyakarta ... Legislation abolished the two **kabupaten** and united their **kemantren** under a mayor (**walikota**) and People’s Representative Assembly (**Dewan Perwakilan Rakyat Haminte Kota**). Two new **kemantren** were added (Umbulharjo and Kotagede), giving

the city its present complement of fourteen kemandren and area of 3,247 hectares.” (Sullivan 1986)

Dua hal penting perlu dicatat dalam proses pembentukan *Haminte Kota Yogyakarta* adalah munculnya *the Dutch ‘Newtown’* (Kotabaru) dan bertambahnya jumlah penduduk.

D isisi lain, lokasi kemiskinan di pedesaan Kabupaten Gunungkidul tidak mudah dipetakan karena secara fisik pemukiman warga miskin di pedesaan tersebar sehingga tidak tampak ada titik kemiskinan. Identifikasi kemiskinan di pedesaan hanya bisa dilakukan melalui pekerjaan, khususnya buruh tani dengan pendapatan harian sebesar Rp30.000–Rp40.000. Upah tersebut hanya diperoleh pada musim tanam dan musim panen. Pada masa tenggang, mereka menjadi pedagang kaki lima di kota terdekat, yaitu Kota Yogyakarta. Mereka inilah yang dikenal sebagai migran musiman. Persoalan yang dihadapi penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul adalah masalah lingkungan alam. Daerah Gunungkidul adalah wilayah perbukitan yang tanahnya terdiri dari tanah bebatuan kapur yang keras sehingga masyarakat sering menyebutnya batu bertanah. Pertanian yang berkembang di wilayah ini umumnya ladang tadah hujan—yang disebut tegalan—kecuali di Ponjong yang mempunyai sumber mata air. Di tegalan tersebut, petani bertanam padi setahun sekali pada musim hujan; menanam palawija seperti jagung, kacang tanah pada musim kurang hujan; dan menanam ketela pohon pada musim kemarau. Ketela pohon inilah yang menjadi makanan pengganti ketika beras yang dihasilkan tidak mencukupi. Ketela pohon diolah sedemikian rupa sehingga menjadi tiwul. Kondisi tanah bebatuan tersebut ternyata bisa ditanami tanaman jangka panjang, seperti jati, akasia, dan *sonobeling* atau *rosewood*. Tanaman jangka panjang inilah yang menjadi investasi atau tabungan masa depan rumah tangga pedesaan Gunungkidul. Tanaman tersebut bahkan menjadi

tanaman penyelamat ketika terjadi krisis atau ketika ada kebutuhan yang besar, seperti hajatan atau pesta perkawinan.

B. Urbanisasi Perdesaan

Untuk memahami kemiskinan di Kota Serang dan Kota Yogyakarta, kita perlu membahas masalah “urbanisasi perdesaan” terlebih dulu. Menurut Adam (2016), yang mengutip Pounksomlee & Ross (1992) dan Keban (1995), “Urbanisasi harus dipahami dari beberapa pendekatan, yaitu pendekatan demografis, proses ekonomi-politik, modernisasi dan legal administrasi.” Dalam penjelasannya, dikatakan:

“[P]endekatan demografis adalah peningkatan konsentrasi penduduk pada daerah perkotaan sehingga proporsi penduduk perkotaan secara keseluruhan mengalami peningkatan, [sementara] dari sisi pendekatan ekonomi politik, urbanisasi dapat didefinisikan sebagai transformasi ekonomi dan sosial yang timbul sebagai akibat dari pengembangan dan ekspansi kapitalisme.” Kemudian, “[d]alam proses modernisasi, urbanisasi dipandang sebagai perubahan dari orientasi tradisional ke orientasi modern di mana terjadi difusi modal, teknologi, nilai-nilai, pengelolaan kelembagaan dan orientasi politik dari dunia modern ke masyarakat yang lebih tradisional. Tidak hanya proses difusi, tetapi juga proses intensifikasi pada beragam etnis, suku, agama dan mata pencaharian.”

Dengan kata lain, saat ini, kota dan desa sulit dipisahkan secara rigid karena perdesaan pada akhirnya berubah mengikuti perkembangan kota. Oleh sebab itu, istilah yang dipakai di sini adalah “urbanisasi perdesaan.” Hal ini tampak jelas di ibu kota Kabupaten Gunungkidul, Wonosari, yang secara perlahan-lahan berubah menjadi urban—walaupun masih sulit disebut kota seperti Kota Yogyakarta.

Mencermati kriteria keurbanan suatu wilayah yang dipergunakan SP 1961 hingga SP 2000, Setiawan (2016) menemukan adanya klasifikasi yang berubah-ubah, terutama dalam hal memiliki fasilitas kota, seperti rumah sakit atau klinik, sekolah dan listrik, serta persentase penduduk yang bekerja di luar pertanian. Namun, tingkat urbanisasi selalu dihitung dari faktor pertumbuhan alami penduduk daerah perkotaan, migrasi dari daerah perdesaan ke daerah perkotaan, reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan, serta perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan (*Urban Rural Growth Difference/URGD*). Meningkatnya laju urbanisasi dijelaskan dengan adanya faktor-faktor penarik dan pendorong. Berkurangnya lapangan pekerjaan di perdesaan dikatakan sebagai faktor pendorong, sementara peluang atau kesempatan kerja yang ditawarkan kota dianggap sebagai faktor pendorong. Ada satu hal lagi yang disebutkan Adam sebagai penyebab urbanisasi, yaitu kebijakan pemerintah. Dengan mengacu pada Salim (2006), Adam (2016) menemukan bahwa Indonesia menerapkan kebijaksanaan urbanisasi melalui dua pendekatan. Pertama, mengembangkan daerah-daerah pedesaan agar lebih maju dengan memiliki ciri-ciri sebagai daerah perkotaan yang dikenal dengan “urbanisasi pedesaan.” Kedua, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disebut daerah penyangga pusat pertumbuhan. Hal ini mengakibatkan tingginya kepadatan di daerah-daerah tertentu (Jawa-Bali) yang mengindikasikan telah terjadi pergerakan/aliran penduduk menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Adam (2016), “[j]ika kondisi ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada kapasitas tampung wilayah yang akan mengalami kejenuhan”, dan “[s]ecara lebih luas akan sangat mengganggu pertumbuhan kota-kota kecil dan menengah,

terutama di luar Jawa, pertumbuhan akan berjalan lambat dan semakin mengalami ketertinggalan.”

Menarik untuk mencermati pendapat Kepala Disdukcapil Kota Serang Ipiyanto yang mengatakan bahwa, “Kota Serang... bukan merupakan daerah industri [sehingga] diprediksi tidak akan menjadi magnet masyarakat dari daerah lain untuk berpindah” (Zan dan Yul 2015). Menurutnya, para pencari kerja lebih memilih kota yang padat industri, seperti Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, dan Kabupaten Serang (Zan dan Yul 2015). Namun, Sekretaris Disdukcapil Kota Serang, Hudori, mengemukakan bahwa pihaknya tetap akan melakukan operasi yustisi ke rumah-rumah kontrakan untuk memastikan identitas para pendatang. Berdasarkan data terakhir (Zan dan Yul 2015), perpindahan warga yang telah terjadi saat ini mayoritas pekerja yang tinggal di Kota Serang, namun bekerja di Kota Cilegon atau Kabupaten Serang. Artinya, Kota Serang mengalami penambahan penduduk yang cukup signifikan. Berdasarkan data Biro Pemerintahan Provinsi Banten (Ini jumlah penduduk 2016), pada semester II Tahun 2015, penduduk Kota Serang sebanyak 623.429 jiwa. Jelas sekali penduduk Kota Serang selama 15 tahun ini telah bertambah sebesar 43% dari 435.791 jiwa pada tahun 2000. Adhieyatm menjelaskan, pertumbuhan lima tahun terakhir diikuti pertumbuhan supermarket ternama, seperti Carrefour, Lotte Mart, Giant, dan Hypermart yang muncul di Kota Serang dan sekitarnya. Ipiyanto sendiri mengakui bahwa jumlah warga yang urbanisasi ke Kota Serang pada 2009 mencapai 1.000 orang per bulannya karena saat itu banyak lowongan pekerjaan dibuka seiring banyaknya perusahaan baru yang berdiri, seperti Carrefour, Giant, Mall of Serang, dan beberapa hotel (Ibah dan Tohir 2014). Namun, pada 2014, ia melihat bahwa warga yang melakukan urbanisasi didominasi oleh para pelajar yang ingin melanjutkan

pendidikannya. Mereka berasal dari Tangerang, Pandeglang, Lebak, dan Cilegon. Menurut Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Serang, Gema Advaita, mayoritas warga yang melakukan urbanisasi bermukim di Kecamatan Serang (Ibah dan Tohir 2014).

Hal yang hampir sama dikatakan Kepala Seksi Perpindahan Penduduk Disdukcapil Yogyakarta, Dyah Munardhianti, pada 28 Agustus 2012. Ia mengatakan bahwa Yogyakarta bukan daerah tujuan urbanisasi warga luar untuk mencari lapangan pekerjaan pasca-Lebaran karena perpindahan penduduk justru lebih untuk kepentingan pendidikan (Dewi 2012). Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta (2015) menyatakan, data kependudukan Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan sebanyak 21.642 jiwa dari 388.627 jiwa pada 2010 menjadi 410.269 pada 2014. Jumlah tersebut lebih kecil daripada jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 1990 yang sebanyak 412.059 jiwa dan sedikit lebih besar daripada jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2000 yang sebanyak 396.711 jiwa. Kondisi ini memperlihatkan kepadatan Kota Yogyakarta (luas 32,8 km²) lebih tinggi daripada Kota Serang sehingga pertambahan penduduknya tidak sebanyak Kota Serang (luas: 267 km²)—jika tidak mau dikatakan menurun. Tercatat data per Desember 1999 adalah 489.000 jiwa (Kota Madya Yogyakarta 2016).

Perbandingan kedua kota tersebut memperlihatkan ada korelasi yang kuat antara pertambahan penduduk dan luasnya wilayah kota. Kita bisa mengatakan bahwa tidak memadainya ruang Kota Yogyakarta menampung pertambahan penduduk telah menyebabkan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Begitu pula yang terjadi dengan Kota Serang yang pertambahan penduduknya sangat pesat.

Menurut Faturochman (1990), peneliti di Puslit Kependudukan dan dosen di Fakultas Psikologi UGM, perkembangan Kota Yogyakarta tidak lagi bersifat *concentric zone*, yaitu terpusat pada keraton, sebagaimana analisis Soemardjan tahun 1985. Keberadaan beberapa universitas, seperti Universitas Gajah Mada, IKIP Negeri, IAIN, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atmajaya, IKIP Sanata Dharma, di daerah utara di perbatasan antara Kotamadya Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, dilihat Faturochman (1990) sebagai salah satu pusat perkembangan kota yang baru di luar kraton. Hasil pengamatannya memperlihatkan bahwa wilayah pemukiman di utara Yogyakarta sudah berkembang sampai jarak 15 km dari kota padahal 10 tahun sebelumnya hanya sampai jarak sekitar 7 km atau terbatas di sepanjang jalan Kaliurang. Ia juga melihat pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan di sekitar kampus atau di jalan-jalan menuju kampus, misalnya tumbuhnya Jalan Uripsumoharjo sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Yogyakarta. Daerah ini, menurut Faturochman (1990), merupakan titik pertemuan antara perkembangan ke arah utara dan ke arah timur, yang dicirikan dengan dilewatinya kampus Bulaksumur oleh hampir semua angkutan kota.

Broer (2012) mengatakan, perkembangan Kota Serang dari kota berkembang menjadi kota maju teridentifikasi dari adanya pusat keramaian pasar ritel modern atau supermarket (seperti Ramayana atau Carrefour), adanya kawasan perkantoran provinsi, adanya hotel-hotel berbintang yang megah, dan pergeseran pola konsumtif masyarakat kota Serang yang lebih nyaman berbelanja di pasar modern (Ramayana, Carrefour, dan sebagainya) dibandingkan pasar tradisional (pasar lama dan pasar Rau). Perkembangan Kota Serang tersebut mendapat kritikan yang cukup keras dalam diskusi “Penyediaan Ruang Publik sebagai Upaya Mewujudkan Kota Serang Madani” di Rumah Dunia, Cilang, Kota Serang, pada 13 Juli

2015. Pembangunan Kota Serang dikatakan belum mengacu pada penataan kota jangka panjang dan masih seperti kota-kota gagal di Indonesia (Pembangunan Kota Serang 2015). Pada kenyataannya, seperti dijelaskan oleh Sulhi, Wakil Wali Kota Serang, Kota Serang didera kemacetan, khususnya pada pagi dan sore hari (Kemacetan di Kota Serang 2017). Kota Serang yang kecil dan tidak terlampau luas ini sudah memiliki masalah serius: “Pertumbuhan penduduk Kota Serang... sangat pesat, dari semula hanya 400 ribu jiwa, saat ini sudah 700 ribu lebih.” Hasil studi Utami (2011) memperlihatkan bahwa tingkat perkembangan wilayah terbangun dari tahun 2000–2010 di Kota Serang terkonsentrasi di bagian tengah (Kecamatan Serang) ke arah timur Kota Serang (Kecamatan Cipocok Jaya). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa perkembangan itu tidak ada hubungannya dengan perkembangan kerapatan jaringan jalan maupun perkembangan jumlah penduduk. Lebih lanjut, hasil studi menyatakan:

“Pada 2010, dari arah Kecamatan Serang ke arah Kecamatan Cipocok Jaya semakin rapat wilayah terbangunnya, di mana panjang wilayah terbangun meningkat menjadi 6,37 km, dan panjang wilayah tidak terbangunnya berkurang menjadi 7,53 km... karena selama sepuluh tahun [tersebut] terdapat perubahan dari wilayah tidak terbangun menjadi wilayah terbangun yang berupa industri, gedung perkantoran dan pemukiman, khususnya di Kecamatan Serang yang merupakan pusat pemerintahan kota dan provinsi serta Kecamatan Cipocok Jaya yang memiliki sejumlah industri terbesar kedua di Kota Serang.”

Pengembangan Kecamatan Cipocok Jaya sepertinya akan terus berlanjut. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Serang, Ahmad Yani, mengatakan bahwa salah satu kawasan yang ditawarkan sebagai lokasi strategis untuk investor adalah Kota Baru Sukajaya

Banten Mas di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug dengan luas 515 ha. Kota baru itu dirancang sebagai “... kota satelit yang kawasannya terintegrasi secara komprehensif dan dapat dijadikan ikon kegiatan bernilai ekonomi serta sebagai model pembangunan di Banten (Ahmad Yani, Kabid 2015).” Koridor Cipocok Jaya dan Curug sepertinya digadang-gadang sebagai koridor kawasan cepat tumbuh bagi pengembangan potensi perdagangan dan jasa serta pendidikan, termasuk agrowisata buatan.

C. Korelasi Urbanisasi dan Kemiskinan di Perkotaan

Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan telah diteliti oleh Damayanti, Setianingsih, dan Pambudi (2016) di Provinsi Banten dengan menggunakan analisis regresi. Namun, belum ada studi yang secara khusus membahas korelasi urbanisasi dan kemiskinan di Kota Serang atau di Kota Yogyakarta. Secara garis besar, urbanisasi telah menimbulkan masalah kemiskinan di perkotaan. Ada tiga penyebab yang telah dikemukakan oleh Khanafi (2010), yaitu tidak tersedianya lapangan pekerjaan, ketidaksiapan infrastruktur, dan ketidaksiapan perumahan serta layanan publik. Ia melihat bahwa mereka yang melakukan urbanisasi tidak memiliki pekerjaan dan biasanya menggunakan lahan kosong di pusat kota ataupun di pinggiran daerah aliran sungai (DAS) untuk mendirikan bangunan liar, baik untuk pemukiman maupun lahan berdagang. Hal ini kemudian bisa menyebabkan banjir. Selain itu, banyak di antara mereka yang datang ke kota tanpa keterampilan khusus selain bertani. Oleh karena itu, mereka sulit memperoleh pekerjaan yang layak dan terpaksa bekerja sebagai buruh harian, penjaga malam, pembantu rumah tangga, tukang becak, dan pekerjaan lain yang sejenis. Masyarakat yang gagal

memperoleh pekerjaan sejenis itu kemudian menjadi tunakarya, tunawisma, dan tunasusila. Pengamatan Hanafi (2010) ini memang tampak terjadi di Yogyakarta, terkait keberadaan pemukiman di pinggiran daerah aliran sungai (DAS), seperti Kali Code dan Kali Winongo. Survei yang dilakukan Fikri dkk. menggunakan *cluster purposive sampling*—dengan kriteria kepadatan penduduk, luas wilayah, dan jumlah penduduk, serta kantung-kantung (kluster) kemiskinan—pada 121 rumah tangga miskin di Kota Yogyakarta yang tinggal di daerah kumuh, bantaran kali, dan pemukiman padat di sembilan kecamatan (Umbulharjo 42; Danurejan 20, Mergangsan, Ngampilan dan Jetis masing-masing 10; Kotagede 8; sisanya di Gedongtengen, Gondomanan, Gondokusuman) menggambarkan sejumlah karakteristik kemiskinan. Karakteristik tersebut adalah terbanyak penduduk asli dengan tempat tinggal sendiri dan permanen, lalu pendatang yang tidak tinggal di rumah sendiri (sewa rumah, kos, atau tidak perlu bayar uang sewa karena menempati rumah saudaranya), pekerja sektor informal dengan pendapatan tidak tetap antara Rp1.000.000–Rp6.000.000,- sebulan atau Rp33.000,- sehari untuk pekerjaan sebagai buruh, pedagang kecil, tukang becak dan pekerjaan sejenis lainnya. Jumlah terbanyak berpendidikan SMA, lalu SD untuk usia lanjut, dan SMP. Jumlah penduduk terbanyak menempati bantaran kali, lalu pemukiman padat, dan pemukiman kumuh. Kebanyakan penduduk tinggal di rumah kecil dan sederhana, lalu di rumah berukuran sedang, dan hanya sedikit yang di rumah cukup besar. Jumlah terbanyak bekerja serabutan atau berganti-ganti, lalu menganggur, dan pekerjaan tetap. Fikri dkk. (2016) menyatakan, dalam hal kepemilikan aset, jumlah yang memiliki sepeda motor dan mempunyai saluran listrik sendiri sudah cukup banyak. Namun, dalam hal sumber air, masih banyak yang memakai fasilitas MCK umum. Menurut pengamatan Fikri dkk., “... peningkatan kemiskinan banyak terjadi di kecamatan

Gondomanan, sedangkan penurunan terjadi di Kotagede.” Hal ini karena Kecamatan Gondomanan meliputi wilayah Malioboro dan sekitarnya yang banyak terjadi urbanisasi tidak tetap.

Kemiskinan di desa berbeda dengan kemiskinan di kota. Untuk memahami kemiskinan di perdesaan, kita perlu berbicara mengenai beberapa sektor kehidupan utama yang menunjang kehidupan di perdesaan, yaitu perikanan dan pertanian.

D. Nelayan dan Kemiskinan

Kehidupan nelayan di pesisir Banten dan DIY umumnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Mayoritas nelayan di Banten dan DIY adalah buruh yang bekerja di kapal milik juragan dengan sistem bagi hasil. Alasan penduduk berprofesi sebagai nelayan bermacam-macam, termasuk alasan pekerjaan keluarga turun-temurun dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan membuat mereka tidak bisa mencari profesi lain. Hal ini membuat nelayan menjadi sangat rentan kehidupannya, terutama ketika musim paceklik tiba. Permasalahan utama nelayan adalah modal, alat produksi (perahu, mesin, jala ikan, solar) dan musim.

Kehidupan nelayan di Banten dan DIY cukup berbeda karakteristiknya. Di Banten, nelayan umumnya (terutama nelayan buruh) pendatang dari Cirebon dan Jawa Tengah. Mereka tinggal menumpang di tanah milik orang lain di pesisir pantai dengan membayar sewa per tahun. Nelayan di DIY (terutama di Gunungkidul) umumnya penduduk asli dan tinggal di tanah warisan orang tuanya. Oleh karena itu, ikatan kekeluargaan nelayan di Gunungkidul lebih erat dibandingkan ikatan kekeluargaan nelayan di Banten. Saat paceklik tiba, nelayan di Gunungkidul beralih profesi menjadi buruh bangunan, petani di lahan AB (lahan milik pemerintah), atau pencari rumput. Di Banten, variasi pekerjaannya lebih minim, misalnya buruh bangunan. Hal ini

karena di Gunungkidul terdapat perkebunan jati dan lahan kosong milik pemerintah yang boleh dimanfaatkan masyarakat. Berbeda dengan Banten yang sudah cenderung padat sehingga jarang terdapat lahan kosong.

E. Pertanian dan Kemiskinan

Masyarakat miskin di desa, baik di kawasan Banten maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, mayoritas bermukim di daerah pertanian. Ada berbagai alasan yang melatarbelakangi pilihan menjadi petani tersebut, seperti alasan historis keluarga, keterbatasan kemampuan, dan panggilan hidup. Ketiga alasan itulah yang menjadi narasi penting ketika membahas kemiskinan dalam lingkup masyarakat desa. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi masyarakat pertanian di desa yang subsisten. Permasalahan subsisten tersebut lebih karena keterbatasan modal dan alat produksi sehingga tidak mampu menghasilkan nilai lebih (*added value*) dari pekerjaan mereka. Selain masalah keterbatasan modal dan alat produksi, masalah lain yang perlu ditelisik adalah keterbatasan lahan. Mayoritas penduduk petani di desa adalah kalangan petani gurem (*peasant*) memiliki lahan garapan sedikit dan menjadi buruh tani kepada petani kaya (*farmer*) melalui sistem bagi hasil (*maro*). Kondisi itulah yang membuat masalah kemiskinan di desa menjadi sangat pelik. Secara kuantitatif, mereka tergolong miskin dilihat dari minimnya pendapatan dan konsumsinya yang rendah. Namun secara kualitatif, mereka hidup layak dan berkecukupan dengan kondisi seadanya. Adanya gambaran yang saling berlawanan tersebut menunjukkan bahwa paradigma kemiskinan di dalam masyarakat desa tidak berlaku secara absolut, namun relatif. *Cekap* dapat dianggap sebagai nilai kearifan lokal penting dalam membaca kemiskinan di desa.

Secara kultural, masyarakat pertanian di desa memiliki sifat modalitas sosial yang cukup kuat antarsesamanya. Oleh karena itu, kemiskinan dalam kasus pertanian ditanggung secara bersama-sama oleh sesama penduduk desa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem kekerabatan yang berlaku dalam relasi masyarakat desa termasuk tinggi karena ikatan persaudaraan dan silang pernikahan. Mereka saling kenal satu sama lainnya sehingga membentuk ikatan solidaritas kuat. Dalam kasus pertanian di Banten, konteks masyarakat miskin yang berkembang di sana turut dipengaruhi sejarah mobilitas yang cukup kental. Mayoritas petani migran di Banten, khususnya yang berada di Kabupaten Pandeglang, berasal dari Karawang, Indramayu, dan Cirebon. Adanya mobilitas tersebut turut dipengaruhi fakta genealogis bahwa Banten dan Cirebon adalah satu saudara yang dibuktikan melalui hubungan orang tua-anak. Mobilitas warga ketiga daerah tersebut menuju Banten sudah terlegitimasi faktor sejarah “anak berpulang pada orang tua.” Adapun jenis vegetasi pangan yang menjadi andalan masih padi sebagai pangan utama. Mayoritas penduduk desa miskin di Pandeglang jarang melakukan peralihan jenis tanaman padi dengan palawija. Mereka menggunakan sistem tumpang sari dengan menanam berbagai macam vegetasi rambat di pinggiran (*galengan*) sawah, misalnya kacang panjang dan jagung.

Masyarakat pertanian di DIY, khususnya di Kabupaten Gunungkidul, memiliki pengalaman berbeda dengan masyarakat pertanian di Banten. Secara geografis, kemiskinan yang terjadi di Gunungkidul lebih karena masalah air dan tekstur tanah yang tidak mendukung untuk pertanian. Implikasinya, pilihan jenis tanaman yang bisa ditanam pun menjadi terbatas. Tanaman pangan yang memungkinkan ditanam di tanah merah dan perbukitan kapur Gunungkidul adalah ketela dan padi tadah hujan.

Masalah pertanian dalam konteks masyarakat miskin merupakan sesuatu yang pelik untuk dibicarakan dalam bahasa kebijakan. Hal ini karena masalah pertanian tidak lagi termasuk kebijakan strategis pemerintah. Masalah riil yang dihadapi oleh petani miskin di desa lebih bersifat struktural. Adapun yang dimaksudkan dengan masalah struktural adalah ketimpangan kepemilikan lahan pertanian, perubahan faktor produksi pertanian yang berbasis pada pupuk dan mekanisasi, serta penetapan harga beli pemerintah yang tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani. Kondisi itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan biaya produksi dan pendapatan yang diterima petani. Oleh karena itu, banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan permukiman dan pabrik. Hal tersebut dirasa lebih menguntungkan bagi petani daripada harus menanggung biaya produksi yang semakin meninggi.

Berbagai masalah itu menjadi problematika laten di kalangan petani miskin. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan pertanian sebenarnya adalah masalah pembagian lahan yang tidak redistributif. Kondisi itulah yang menciptakan dikotomi kelas petani, yakni petani gurem, petani kaya, dan buruh tani. Adanya perbedaan ketiga kelas itu membuat perbedaan akumulasi kapital dan kepentingan yang berbeda di antara ketiga kelas tersebut. Selain ketersediaan lahan, masalah lain yang perlu dibahas adalah masalah pemasaran, masalah redistribusi, dan masalah proteksi/subsidi. Keempat faktor itulah yang mengindikasikan adanya relasi multikompleks dalam masalah pertanian tersebut.

Pada masa Orde Baru, pertanian merupakan bagian dari simpul penting politik stabilitas yang dibangun rezim. Hal itu terkait pemenuhan pangan sebagai kebutuhan mendasar agar tercipta stabilitas politik dan stabilitas ekonomi dalam ranah masyarakat. Serangkaian kebijakan pertanian kemudian diciptakan, seperti

penguatan fungsi Bulog, kebijakan panca-usaha tani, revolusi hijau, dan revolusi biru. Ketiga kebijakan tersebut termaktub dalam program swasembada pangan.

Badan Urusan logistik (Bulog) dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967 pada 10 Mei 1967 sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND). Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga stabilisasi harga dan ketersediaan pangan di masyarakat. Lembaga ini juga berhak melakukan monopoli pembelian harga pangan di tingkat petani dan melakukan penyeragaman data pertanian. Adanya fungsi monopoli dan monopsoni itulah yang menjadikan pertanian berkembang dalam kerangka strategis politik.

F. Sektor Informal dan Kemiskinan

Sektor informal mulai banyak bermunculan di Indonesia seiring munculnya industri di Indonesia sekitar tahun 1970 hingga 1980-an. Banyak tenaga kerja di perkotaan yang tidak dapat terserap dalam sektor formal, khususnya industrialisasi yang sedang giat dibangun rezim pemerintah masa itu. Industri yang berkembang lebih bersifat padat modal alih-alih padat karya. Akibatnya, banyak penduduk kota dan migran desa-kota yang tidak bisa tertampung. Kebanyakan dari mereka lalu masuk sektor informal atau bahkan menganggur. Sektor informal bahkan semakin menjamur di Indonesia sejak krisis moneter pada 1998. Selain karena meningkatnya jumlah penduduk kota yang masuk angkatan kerja dan migran desa-kota, banyaknya tenaga kerja di kota yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat sektor informal menjadi tumpuan ekonomi utama tenaga kerja, khususnya di perkotaan, untuk bertahan hidup.

Konsep sektor informal ini mulai digunakan pada 1970-an. Keith Hart (1973) menggunakan konsep sektor informal untuk menggambarkan Frafra, sebuah kelompok di Ghana Utara, yang

menjadi migran di Ghana Selatan. Inflasi harga, pendapatan yang tidak memadai, dan meningkatnya surplus tenaga kerja mendorong tingginya tingkat informalitas dalam berbagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan, terutama bagi migran Frafra yang tidak berpendidikan dan tidak punya keterampilan. Lebih lanjut, Hidayat (1978) menyebutkan ciri-ciri sektor informal sebagai berikut.

- 1) Kegiatan usaha tidak terorganisasi secara baik karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal.
- 2) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- 3) Pola kegiatan usaha tidak beraturan, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- 4) Pada umumnya, kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
- 5) Unit usaha keluar masuk dari satu subsektor ke lain subsektor.
- 6) Teknologi yang dipergunakan bersifat tradisional.
- 7) Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasi juga relatif kecil.
- 8) Untuk menjalankan usaha, tidak diperlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
- 9) Pada umumnya, unit usaha termasuk golongan yang mengerjakan sendiri usahanya. Kalau mempekerjakan buruh, pasti berasal dari keluarga.
- 10) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.

- 11) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan kota atau desa yang berpenghasilan rendah, tetapi kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS), melakukan Survei Sektor Informal (SSI) sejak tahun 2014. Dalam survei tersebut BPS membedakan usaha formal dan informal berdasarkan status pekerjaan, yaitu (1) berusaha sendiri; (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; (3) berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; (4) buruh/karyawan/pegawai; (5) pekerja bebas di pertanian; (6) pekerja bebas di nonpertanian; serta (7) pekerja keluarga. Seseorang dikatakan bekerja dalam sektor usaha formal apabila status pekerjaannya:

- 1) Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan pekerja keluarga dengan syarat *usahanya melakukan pembukuan barang dan keuangan secara lengkap*; serta
- 2) Buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian dengan syarat *menerima slip gaji dengan keterangan lengkap*.

Sementara itu, seseorang dikatakan bekerja dalam sektor usaha informal jika status pekerjaannya:

- 1) Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dengan syarat *usahanya melakukan pembukuan barang dan keuangan secara lengkap maupun menjual atau barter sebagian barang dan jasa*;
- 2) Pekerja keluarga dengan syarat *pembukuan barang dan keuangan usahanya tidak lengkap*; serta

- 3) Buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di nonpertanian dengan syarat *tidak menerima slip gaji atau slip gaji dengan keterangan sederhana.*

Dari definisi operasional tersebut, sektor usaha formal diartikan sebagai usaha yang memiliki administrasi barang dan keuangan yang lengkap serta mampu memberikan slip gaji dengan keterangan lengkap. Sektor usaha informal adalah usaha yang tidak memiliki pembukuan yang lengkap, melakukan barter, dan hanya bisa memberikan slip gaji sederhana atau bahkan tidak bisa membuat slip gaji.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa definisi sektor informal cukup luas dan beragam. Konsep ini bahkan memperoleh berbagai kritik, seperti mengabaikan variasi pekerjaan dalam sektor informal sendiri dan cenderung melekatkan diri pada penduduk perkotaan. Seperti dikemukakan Suharto (2002), pekerja sektor informal umumnya adalah orang-orang miskin. Menurutnya, adanya resesi membuat pekerja sektor informal dari rumah tangga (RT) miskin tersebut semakin rentan dalam menghadapi kesulitan, terutama akibat daya beli yang menurun, harga yang meningkat, dan penghapusan subsidi. Pertanyaannya, bagaimana variasi pekerjaan dalam sektor informal dari RT miskin, baik di perkotaan maupun perdesaan? Adakah persamaan ataupun perbedaannya? Bagaimana kerentanan sosial dari RT miskin yang menggantungkan hidupnya dari sektor informal?

Serang dan Yogyakarta merupakan kota sekaligus ibu kota Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Seiring terbentuknya Provinsi Banten pada 2000, Serang yang semula kabupaten mengalami pemekaran menjadi kota sekaligus ibu kota provinsi. Sebagai kota yang baru tumbuh, Serang mengalami pembangunan dan perkembangan yang sangat cepat. Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi salah satu penanda perkembangan Kota Serang. Penanda lain adalah tumbuhnya berbagai pusat perbelanjaan, seperti Mall of Serang dan Giant. Selain itu, pemukiman-pemukiman baru juga mulai berkembang di Kota Serang, seperti Perumahan Kota Serang Baru, Perumahan Puri Banjarsari, dan Perumahan Permata Banjar Asri. Sementara itu, Kota Yogyakarta yang merupakan kota lama juga tumbuh tidak kalah pesatnya. Belakangan, isu kepemilikan tanah dan undang-undang keistimewaan DIY sedang hangat dibicarakan. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan pembangunan di DIY. Buktinya, semakin banyak hotel dan hunian di sana.

Pembangunan di Kota Serang dan Kota Yogyakarta memikat penduduk perkotaannya dan pendatang dari daerah-daerah di sekitarnya untuk datang dan bekerja. Ketika para pekerja tersebut memiliki pendidikan dan keterampilan yang terbatas, terjun ke sektor informal menjadi pilihan paling menjanjikan demi bertahan hidup dan berkembang—jika memungkinkan. Di balik pusat-pusat perbelanjaan, seperti Giant, banyak ditemukan rumah-rumah petak yang dihuni oleh pedagang keliling. Para pedagang keliling tersebut umumnya tinggal berkelompok sesuai dengan bahan dagangannya, seperti pedagang tahu gejrot dan pedagang rujak buah. Mereka kebanyakan menjajakan barang dagangannya di mall dan perumahan sekitarnya yang dianggap sebagai pusat perekonomian baru. Sementara itu, banyaknya perumahan memberikan kesempatan bagi para tukang atau pembantu tukang (*kenek*) untuk bekerja pada pengembang atau pemilik rumah secara langsung. Selain itu, kemunculan perumahan juga menunjukkan adanya kelas menengah baru yang umumnya membutuhkan jasa asisten rumah tangga (ART) untuk melakukan berbagai pekerjaan

domestik, mulai dari menyapu, mengepel, mencuci, menyetrিকা, hingga memasak.

Hasil *life history* yang dilakukan di perkotaan menunjukkan bahwa kebanyakan RT miskin di Kota Serang (9 dari 10) dan RT miskin di Kota Yogyakarta (10 dari 10) menggantungkan hidup dari sektor informal. Pekerjaan sektor informal yang digeluti sembilan RT miskin tersebut cukup beragam dengan upah yang juga sangat bervariasi. Pekerjaan formal yang bersifat *outsourcing*, seperti petugas keamanan, ternyata menjadi ancaman tersendiri bagi RT miskin perkotaan. Pekerjaan ini bisa dikategorikan informal karena pekerjanya hanya memperoleh slip gaji sederhana, tanpa mengetahui besaran potongan yang diambil oleh perusahaan *outsourcing* dari tempatnya bekerja. Secara umum, pendapatan satpam *outsourcing* cukup tinggi, mencapai Rp2,4 juta/bulan atau sekitar Rp120.000,-/hari. Status *outsourcing* menjadikan RT miskin ini rentan karena pekerja bisa mengalami kekosongan pekerjaan sewaktu-waktu tanpa adanya pendapatan. Sebagai contoh, pekerja memperoleh janji untuk dipekerjakan hingga Desember 2016, namun ia terpaksa “libur” karena perusahaannya sudah bangkrut pada April 2016. Pada masa “libur” inilah, kepala rumah tangga (KRT) miskin bekerja serabutan di berbagai sektor informal lain, seperti tukang bengkel dan tukang bangunan.

Tukang bangunan menjadi pekerjaan sektor informal dengan penghasilan yang cukup tinggi, yaitu sekitar Rp80.000,00/hari di Kota Serang dan Rp100.000,-/hari di Kota Yogyakarta. Selain pendapatan tersebut, tukang umumnya memperoleh jatah konsumsi setiap harinya, termasuk makan siang, kopi, dan rokok. Sementara itu, *kenek* yang merupakan asisten tukang memperoleh upah sedikit lebih rendah, yaitu Rp50.000,-/hari di Kota Serang dan Rp65.000,-/hari di Kota Yogyakarta. Baik tukang maupun *kenek* rata-rata bekerja dari pukul tujuh pagi hingga pukul empat sore,

dengan waktu istirahat selama satu jam saat makan siang. Namun pekerjaan tukang ini tidak menentu. Mereka harus menabung untuk mempersiapkan masa paceklik, umumnya saat tidak ada pekerjaan tukang ataupun *kenek* yang datang menghampiri.

Sektor informal lain di perkotaan adalah pemilik warung sedang. Ragam usaha para pemilik warung ini adalah berdagang kelontong, seperti bahan-bahan pokok, makanan, dan minuman kemasan. Mereka mengeluarkan modal sebesar Rp300.000–Rp500.000,- setiap harinya dengan rata-rata keuntungan sekitar Rp100.000,-. Warung ini umumnya dibuka mulai dari pagi hingga malam hari. Jika dihitung secara rinci, masa kerja pemilik warung ini sekitar 12 jam setiap harinya. Berbeda dengan pemilik warung sedang yang memiliki banyak modal, pemilik warung kecil umumnya berdagang benar-benar hanya untuk bertahan hidup, terlebih ketika KRT tak memiliki pekerjaan. Pemilik warung kecil ini hanya memiliki modal Rp50.000,-/hari atau bahkan berutang dari pemilik warung sedang untuk memperoleh bahan-bahan jualannya. Barang yang dijual pun seadanya, seperti telur cubit atau jajanan kecil lainnya. Kendala yang dihadapi pemilik warung (baik sedang maupun kecil) adalah konsumsi barang dagangan oleh anggota rumah tangga sendiri dan tetangga yang membeli dengan berutang. Jika kendala ini dihadapi oleh pemilik warung kecil, dapat dipastikan warungnya segera gulung tikar.

Perajin ternyata masih dapat dijumpai di perkotaan. Perajin ini membantu proses perdagangan di kota. Dari *life history*, dijumpai sebuah RT miskin di Kota Serang yang menekuni pekerjaan sebagai pembuat peti telur. Sehari-hari, suami istri dari RT miskin ini membuat sekitar 100 buah peti telur dengan upah sebesar Rp80.000,-/hari.

Beberapa pekerjaan sektor informal di perkotaan, seperti pedagang keliling, buruh cuci, asisten rumah tangga (ART),

penjaga toko, dan tukang pijat, memiliki upah yang sama, yaitu Rp50.000,-. Pedagang keliling mayoritas berjualan makanan, seperti pedagang sayur dan gorengan yang menjajakan barang dagangannya dari rumah ke rumah ataupun pedagang makanan anak-anak yang berkeliling dari sekolah ke sekolah. Pedagang keliling mengeluarkan modal sekitar Rp80.000–Rp100.000,- dengan keuntungan dagang sekitar Rp50.000,-/hari. Pedagang keliling ini kebanyakan menggunakan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sementara itu, penjaga toko, buruh cuci, dan ART umumnya memperoleh penghasilan bulanan, yaitu sekitar Rp1.200.000,-. Jika penjaga toko harus bekerja dari pagi hingga sore, buruh cuci ataupun ART bisa bekerja di dua RT masing-masing pada pagi dan siang hari. Pekerjaan tukang pijat jelas memiliki waktu kerja yang tidak menentu karena ditentukan oleh panggilan dari para pengguna jasa. Dalam sehari, tukang pijat rata-rata mendapatkan dua pelanggan.

Profesi sektor informal dengan upah Rp45.000,-, namun hanya dijumpai di Kota Yogyakarta adalah aktivis kampung. Mereka kebanyakan menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk melakukan pekerjaan di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Contoh pekerjaannya adalah pendataan RT miskin yang berhak mendapatkan kartu keluarga menuju sejahtera (KMS), penggerak pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pengatur pendatang, termasuk pendatang dengan berbagai permasalahan sosialnya, seperti pengamen dan wanita pria (waria). Para aktivis ini umumnya mendapatkan penghasilan setara upah minimum kota (UMK) setiap bulannya, namun tidak rutin.

Buruh pabrik kecil dan tukang becak di Kota Serang dan Kota Yogyakarta menerima pendapatan yang kurang lebih sama, yaitu Rp40.000–Rp45.000,-/hari. Buruh pabrik kecil tidak perlu mengeluarkan modal untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik,

seperti pabrik roti dan pabrik sarung tangan. Namun tukang becak membutuhkan modal untuk membeli becak sebagai alat usahanya. Harga becak kini bisa mencapai Rp800.000,-. Jika tidak memiliki alat usaha sendiri, para tukang becak ini menyewa dengan ongkos sewa sekitar Rp10.000,-/hari.

Berbeda dengan buruh pabrik kecil (Rp45.000,-/hari), buruh *outsourcing* dan buruh usaha kecil memiliki penghasilan yang lebih rendah (Rp30.000,-/hari). Buruh yang belakangan memperoleh penghasilan lebih rendah karena umumnya pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, tamatan sekolah dasar (SD), seperti tukang kebun atau pekerja usia lanjut, seperti buruh es serut. Saat ini, tukang kebun sudah menjadi bentuk pekerjaan *outsourcing* yang tampaknya meningkatkan status sosial dari pekerjanya. Jika tukang kebun memiliki waktu kerja tetap dari pukul lima pagi hingga pukul dua siang, buruh es serut bisa menyelesaikan pekerjaannya di rumah dengan waktu kerja yang sangat cepat, yakni sekitar empat jam.

Pekerjaan sektor informal yang masih tersisa masuk ke dalam pekerjaan sektor informal yang sangat rentan karena penghasilannya sangat tidak memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan sangat tidak menentu. Penjaga warung makanan dan tukang masak kebanyakan hanya dibayar sebesar Rp20.000–Rp25.000,- setiap harinya. Namun, pemilik warung makanan atau pemilik usaha katering biasanya memberikan jatah makan siang secara gratis. Kondisi yang sama juga dialami oleh para penjaga bayi. Penjaga bayi umumnya ibu rumah tangga yang membantu bayi atau anak kecil dari tetangganya yang juga RT miskin. Sementara itu, tukang batu, pemulung atau tukang rongsokan, buruh panggul kayu, dan pengupas bawang hanya memperoleh upah sebesar Rp10.000–Rp15.000,-/hari. Upah itu tentu saja sangat rendah jika digunakan untuk membiayai kebutuhan seluruh anggota rumah tangga. Upah

itu sangat tidak cukup untuk membiayai kebutuhan primer, seperti pangan, sandang, dan papan, terlebih kebutuhan sekunder, seperti pendidikan. Konsekuensinya, RT miskin dengan profesi sektor informal ini umumnya sangat rentan.

Uraian bagian ini, seperti terangkum pada Tabel 5, menunjukkan variasi pekerjaan sektor informal di perkotaan, baik di Kota Serang maupun Kota Yogyakarta. Dari variasi pekerjaan sektor informal di perkotaan, RT miskin dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu (1) RT miskin yang tidak rentan, biasanya dengan penghasilan Rp80.000–Rp120.000,-/hari dan bekerja sebagai satpam, pemilik warung sedang, tukang bangunan, dan perajin; (2) RT miskin cukup rentan dengan pendapatan Rp45.000–Rp65.000,-/hari dan menggeluti pekerjaan sebagai buruh pabrik kecil, aktivis kampung, tukang pijat, penjaga toko, buruh cuci, ART, pedagang keliling, dan *kenek*; (3) RT miskin rentan dengan upah Rp20.000–Rp40.000,-, seperti tukang masak, penjaga warung makanan, penjaga bayi, pengamen, buruh es serut, buruh las, tukang kebun, dan tukang becak; serta (4) RT miskin sangat rentan, biasanya KRT bekerja sebagai tukang batu, pemulung, buruh panggul kayu, dan pengupas bawang, dengan upah Rp10.000–Rp15.000,-.

Variasi pekerjaan sektor informal di perdesaan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Gunungkidul tidak sebanyak di perkotaan Kota Serang dan Kota Yogyakarta. Hasil *Life History* menunjukkan bahwa hanya sedikit RT miskin di Kabupaten Pandeglang (5 dari 10 RT miskin) dan di Kabupaten Gunungkidul (2 dari 10 RT miskin) yang menjadikan sektor informal sebagai sumber pendapatan utama untuk menafkahi keluarganya.

Kendati bekerja di sektor informal, yaitu pembuat perahu, sebuah RT di Pandeglang memiliki penghasilan yang cukup besar. Pembuatan kapal dipatok seharga Rp20.000.000,--Rp25.000.000,-.

Tabel 5. Sektor Informal di Kota Serang dan Kota Yogyakarta

Pekerjaan Sektor Informal	Pendapatan/ Hari (Rp)		Waktu Kerja/ Hari (Jam)	Fasilitas Lain yang Diterima
	Serang	Yogyakarta		
Satpam (<i>outsourcing</i>)	120.000	-	8	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk pekerja dan keluarga
Pemilik Warung Sedang	-	100.000	12	-
Tukang Bangunan	80.000	100.000	8	Makan siang, kopi, dan rokok
Pengrajin	80.000	-	8	-
<i>Kenek</i>	50.000	65.000	8	Makan siang, kopi, dan rokok
Pedagang Keliling	50.000	-	12	Pedagang keliling tidak hanya menghabiskan waktu kerja untuk berjualan keliling, tetapi juga untuk memasak dan menyiapkan dagangannya
Buruh Cuci (ART)	50.000	50.000	8	Biasanya bekerja 4 jam untuk setiap RT
Penjaga Toko	50.000	-	8	-
Tukang Pijat	-	50.000	-	Waktu kerja tergantung panggilan dari pengguna jasa
Aktivis Kampung	-	45.000	-	-
Buruh Pabrik Kecil	45.000	45.000	8	-
Tukang Becak	40.000	40.000	8	Waktu kerja termasuk waktu tunggu penumpang
Tukang Kebun (<i>outsourcing</i>)	-	35.000	8	-
Buruh Las	-	30.000	8	-
Buruh Es Serut	-	30.000	4	Dikerjakan di rumah
Pengamen	-	30.000		
Pemilik Warung Kecil	20.000	30.000	12	-

Pekerjaan Sektor Informal	Pendapatan/ Hari (Rp)		Waktu Kerja/ Hari (Jam)	Fasilitas Lain yang Diterima
	Serang	Yogyakarta		
Penjaga Warung Makanan	-	25.000	8	Makan siang
Penjaga Bayi	-	25.000	8	-
Tukang Masak	-	20.000	8	Makan siang
Pengupas Bawang	15.000	-	-	-
Buruh Panggul Kayu	12.000	-	-	-
Pemulung	10.000	10.000	-	-
Tukang Batu	-	10.000	-	-

Harga tersebut menjadi hak pembuat perahu yang dibantu beberapa anak buahnya. Bahan untuk membuat kapal sepenuhnya ditanggung oleh pemesan. Pembuatan sebuah perahu membutuhkan waktu sekitar 5–6 bulan. Jika seorang pembuat perahu bisa menghasilkan dua perahu dalam setahun, setiap harinya ia bisa memperoleh Rp100.000–Rp200.000,-. Kendati penghasilan pembuat perahu sangat besar, pesanan perahu tentu tidak datang setiap hari. Oleh karena itu, pembuat perahu harus pandai-pandai mengatur keuangannya pada masa sulit.

Pandeglang yang memiliki kawasan pantai menjadi lahan subur bagi para pedagang ikan di tempat pelelangan ikan (TPI). Salah satu pedagang yang diwawancarai menyatakan bahwa ia harus mengeluarkan modal besar, yaitu Rp1.000.000–Rp2.000.000,- per hari. Dari modal yang cukup besar tersebut, ia hanya bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp100.000,- setiap harinya. Jika ikan tidak laku terjual, ia terpaksa membawanya pulang untuk dikeringkan dan diasinkan. Harga ikan asin ini biasanya Rp20.000–Rp25.000,-/kg. Pedagang ikan ini mulai

meninggalkan rumah pada pukul lima pagi untuk membeli ikan dari nelayan secara langsung di pantai ataupun para pelelang ikan. Setelahnya, mereka mulai membuka lapak dari pukul tujuh pagi hingga pukul dua siang. Untuk menambah pemasukan, RT miskin yang berdagang ikan ini juga membuka warung sedang di halaman rumahnya. Dengan modal sebesar Rp1.000.000,-/hari, pemilik warung sedang ini mendapatkan keuntungan Rp100.000,- setiap harinya. Keberadaan warung memudahkan konsumsi RT, seperti gula, kopi, dan rokok. Menyadari lingkungannya yang semakin penuh sampah, RT ini bahkan mau menggeluti pekerjaan sebagai pemulung. Sebagai penghasilan tambahan, RT miskin ini setidaknya bisa memperoleh Rp30.000,-/bulan dari hasil barang rongsokan yang dikumpulkan.

Seperti halnya di perkotaan, tukang bangunan juga menjadi pekerjaan sektor informal yang cukup populer bagi RT miskin di perdesaan. Meski tinggal di Pandeglang, tukang bangunan umumnya pekerja migran dari Kota Serang. Selain kurang tersedianya pekerjaan tukang bangunan di Kabupaten Pandeglang, alasan tukang bangunan bekerja di Kota Serang adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar, yaitu Rp100.000,-/hari tidak termasuk makan, kopi, dan rokok. Sementara itu, upah tukang bangunan di Kabupaten Gunungkidul lebih rendah, yaitu Rp70.000,-. Meskipun penghasilannya rendah, biaya makan siang, kopi, dan rokok dari tukang bangunan di Gunungkidul umumnya sudah ditanggung pemberi kerja.

Berbeda dengan pedagang keliling di perkotaan, keuntungan yang diterima pedagang keliling di perdesaan ternyata jauh lebih besar. Dengan jumlah modal yang lebih kecil, yaitu sekitar Rp50.000–Rp60.000,-, pedagang keliling di perdesaan bisa meraih keuntungan hingga Rp100.000,- setiap harinya. Hal ini terjadi karena area jualan yang lebih luas, jumlah pelanggan yang lebih

banyak, dan harga dagangan yang lebih murah. Jika gorengan di Kota Serang dijual Rp1.000,-/buah, sebutir bakso di Kabupaten Gunungkidul hanya dijual seharga Rp500,-.

Tukang becak, pemilik warung kecil, penjaga toko, penjaga bayi, pedagang asongan, dan pemulung menjadi variasi pekerjaan sektor informal yang mulai tersedia di perdesaan. Hal yang membedakan adalah lebih rendahnya pendapatan pekerja-pekerja di sektor informal tersebut dibandingkan dengan mereka yang bekerja di perkotaan.

Tabel 6. Sektor Informal di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Gunungkidul

Pekerjaan Sektor Informal	Pendapatan/ Hari (Rp)		Waktu Kerja/ Hari (Jam)	Fasilitas Lain yang Diterima
	Pandeglang	Gunungkidul		
Pembuat Perahu	200.000	-	8	Harga sebuah perahu adalah Rp25.000.000,-.
Pedagang TPI	100.000	-	8	-
Pemilik Warung Sedang	100.000	-	12	-
Pedagang Keliling	-	100.000	12	-
Tukang Bangunan	100.000	70.000	8	-
Tukang Becak	30.000	-	8	Waktu kerja termasuk waktu tunggu penumpang
Pemilik Warung Kecil	30.000	-	12	-
Penjaga Bayi		25.000	8	-
Pedagang Asongan	20.000	-	8	-
Penjaga Toko	15.000	-	8	-
Pemulung	1.000	-	-	Barang rongsokan baru dijual setiap bulan dengan hasil Rp.30.000/bulan

Seperti terangkum pada Tabel 6, uraian pada bagian ini menunjukkan variasi pekerjaan sektor informal di perdesaan, baik di Kabupaten Pandeglang maupun Kabupaten Gunungkidul. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa sektor informal hanya menjadi pilihan bagi sebagian RT di perdesaan. Namun, wilayah perdesaan yang sebagian memiliki laut dan pantai memunculkan variasi pekerjaan sektor informal khas pendukung sektor perikanan, seperti pembuat perahu atau pedagang ikan di TPI. Dari variasi pekerjaan sektor informal yang ada di perdesaan, RT miskin dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu (1) RT miskin yang tidak rentan, biasanya dengan penghasilan Rp70.000–Rp200.000,-/hari dan bekerja sebagai pembuat perahu, pedagang ikan, pemilik warung sedang, tukang bangunan, dan pedagang keliling; (2) RT miskin rentan dengan upah Rp20.000–Rp30.000,-, seperti pedagang asongan, penjaga bayi, tukang becak, dan pemilik warung kecil; serta (4) RT miskin sangat rentan, biasanya bekerja sebagai pemulung dan penjaga toko, dengan upah Rp1.000–Rp15.000,-.

Dari sebelas karakteristik sektor informal yang dikemukakan oleh Hidayat (1978), setidaknya enam karakteristik ditunjukkan oleh sektor informal yang ada dalam *life history* buku ini, yaitu (1) tidak terorganisasi dengan baik, seperti tidak adanya waktu kerja dan sumber daya yang pasti; (2) penggunaan teknologi tradisional, misalnya membersihkan dan menjemur ikan hanya dengan sinar matahari; (3) kebanyakan pekerjaannya menjadi terampil karena pengalaman bekerjanya dan bukan karena pendidikan formal, terbukti dengan mayoritas pendidikannya sekolah dasar (SD); (4) umumnya mengerjakan sendiri atau menggunakan pekerja keluarga yang tidak dibayar, seperti anggota rumah tangga yang diminta bantuannya untuk memasak barang dagangan; (5) memperoleh modal usaha dari rentenir, seperti pedagang ikan yang meminjam dari bank keliling; serta (6) mayoritas produksinya dikonsumsi oleh

kelompok berpenghasilan rendah, seperti pedagang keliling yang menjajakan barang dagangannya di sekitar rumahnya yang berarti penduduk dengan kelas sosial yang hampir sama.

Sektor informal yang digeluti oleh RT miskin di perkotaan lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan RT miskin di perdesaan. Seperti yang sudah dipaparkan, jumlah ragam pekerjaan sektor informal di perkotaan bisa mencapai 24, sedangkan di perdesaan jumlahnya hanya setengahnya. Kondisi ini tampaknya dilatarbelakangi oleh posisi sektor informal sebagai sumber pendapatan RT miskin. Di perkotaan, sektor informal menjadi tumpuan utama bagi kebanyakan RT miskin sehingga mereka mencari variasi untuk berkompetisi dengan yang lain. Di perdesaan, sektor informal biasanya menjadi sumber pendapatan tambahan karena mayoritas RT miskin masih menggantungkan hidup dari pertanian subsisten ataupun sistem ternak bagi hasil.

Sektor informal bukanlah sebuah spektrum yang homogen. Menjawab kritik terhadap konsep sektor informal, buku ini menggambarkan variasi pekerjaan dalam sektor informal. Variasi pekerjaan dalam sektor informal tersebut menunjukkan tingkat pendapatan yang berbeda sekaligus tingkat kerentanan sosial RT miskin.

G. Kemiskinan Desa dan Kemiskinan Kota: Temuan Sementara

Membandingkan Kota Yogyakarta dengan Kota Serang, dan Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Pandeglang, secara garis besar kita bisa melihat perbedaan antara kemiskinan kota dengan kemiskinan desa. Kemiskinan kota selalu terkait dengan pendatang dan perkembangan kota itu sendiri. Kemiskinan kota selalu bisa diidentifikasi sebagai daerah kumuh di kota karena

penduduk miskin selalu menempati ruang yang marginal, yaitu ruang yang dekat dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti pasar, terminal, atau pertokoan. Ruang tersebut sesungguhnya bukan ruang yang layak ditempati karena ruang yang sudah berpenduduk itu harus dibagi lagi dengan mereka yang bekerja di pusat-pusat kegiatan ekonomi itu—namun berasal dari tempat lain yang jauh sehingga memerlukan tempat tinggal sementara (ikut/menumpang di keluarga, atau kost/sewa kamar). Sementara itu, kemiskinan desa lebih banyak terkait dengan masalah prasarana dan sarana atau infrastruktur, terutama jalan, yang tidak memadai. Kemiskinan desa juga cenderung terkonsentrasi pada mereka yang bekerja atau menjual jasa di bidang pertanian sebagai tenaga/buruh harian karena tidak banyak jenis pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan di desa.

Perbedaan ini diperkuat hasil penelitian memakai kuesioner (lihat Bab III). Jika dilihat dari dimensi pendidikan, tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga miskin di pedesaan lebih rendah daripada mereka yang ada di kota. Rendahnya tingkat pendidikan ini bisa dikaitkan dengan kurangnya prasarana dan sarana pendidikan di desa. Seperti kita tahu, fasilitas pendidikan berupa sekolah di desa hanya ada untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dan seringkali lokasinya pada satu desa, tetapi melayani kebutuhan beberapa desa yang berdekatan sekaligus. Sekolah menengah atas umumnya terdapat di ibu kota kecamatan dan seringkali jarak tempuhnya cukup jauh dengan kondisi jalan yang buruk. Kondisi ini pula yang kami temui di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Pandeglang.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Kota Yogyakarta khususnya terpola sebagai sebuah keterbatasan ruang. Hal ini sepertinya terkait dengan struktur kota yang secara tradisional terbagi atas Kraton dan Nogoro atau *capital city*/ibukota

negara (*in fact, a roughly rectangular area of 1,135 hectares*). Kita tahu bahwa lokasi Kraton dan area yang dicakupnya masih jelas batas-batasnya melalui keberadaan alun-alun utara dan alun-alun selatan (alun-alun Kidul /Alkid) yang letaknya di depan dan di belakang Kraton. Wilayah Nagoro pada masa kolonial menjadi tempat kediaman tiga kelompok yang terbagi atas dasar profesi, okupasi, dan etnis (1. *Princes and high nobles*; 2. *Colonialists, non-Javanese subjects, foreign traders, emissaries, and visitors*; 3. *Artisans, laborers, gardeners, artists, soldiers, holymen, lamplighters, ostlers, scribes, and so on*). Kini masyarakat miskin hidup terimbit gedung-gedung pemerintahan, hotel-hotel, bank-bank, dan pertokoan. Mereka terjepit sehingga hanya dapat menempati bantaran-bantaran kali.

Gunungkidul memperlihatkan posisinya sebagai *nagaragung* Kesultanan Yogyakarta, yang *rural area*. Jika dulu terbagi atas *lungguh* dan *kabekelan* yang bertugas mengatur warganya yang disebut *patuh*, saat ini lebih dikenal sebagai kecamatan dan desa. Pola kemiskinan di sini pada dasarnya terkait kurangnya infrastruktur yang memadai karena kondisi geografisnya terbagi atas tiga kawasan, yaitu kawasan Gunungkidul Utara (kondisi pertanian padi gogo), Gunungkidul Tengah (aksesibilitas perekonomian), dan Gunungkidul Selatan (kekurangan air). Terbukanya akses jalan di Gunungkidul menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk membangun wilayah ini. Namun, kenyataan bahwa angka kemiskinan di Gunungkidul masih tinggi mengharuskan kita mempertanyakan kembali apa yang salah dengan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan di Gunungkidul. Terlebih lagi, menurut Sutarmi (2017), ketika para pejabat pemerintahan Kabupaten Gunungkidul sudah berupaya keras membangun daerahnya melalui pembukaan tempat-tempat wisata yang

diharapkan bisa menjadi penggerak perekonomian masyarakat Gunungkidul.

Untuk Kota Serang, perlu dipertanyakan sejauh mana keterputusan penguasaan ruang sosial dari masa kolonial ke masa republik telah memunculkan kantong kemiskinan di Banten Lama. Perlu juga dipertanyakan sejauh mana pembelahan antara jawara dan ulama, antara etnis Sunda dan orang Banten, khususnya Jaseng (Jawa Serang) berpengaruh terhadap pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Banten, termasuk penanggulangan kemiskinan di Kota Serang dan di Kabupaten Pandeglang.

BAB III

INDEKS KERENTANAN⁶

Jika kriteria sangat rentan, rentan, dan hampir rentan yang dipakai pemerintah (dalam hal ini TNP2K) didasarkan atas status kesejahteraan yang diukur dari garis kemiskinan, buku ini mengusulkan indeks kerentanan sebagai indikator bagi kategori-kategori rumah tangga miskin yang sangat rentan, rentan, cukup rentan, dan tidak rentan. Indeks disusun dari 1.200 kuesioner yang diisi dengan bantuan petugas lapangan yang melakukan *door-to-door interview* dengan panduan data *by name by address* yang dimintakan dari TKSK tingkat kecamatan. Penyusunan indeks kerentanan dari data lapangan yang sudah dimasukkan ke dalam program SPSS dilakukan secara bertahap (tahapan *data pre-processing*, tahapan analisis faktor, dan tahapan analisis sensitivitas) melalui serangkaian diskusi dan kerja sama dengan pakar-pakar statistik dan mereka yang berpengalaman menyusun indeks, seperti indeks demokrasi.

⁶ Uraian yang lebih mendetail tentang proses penyusunan indeks kerentanan ada pada laporan terpisah yang ditulis Mia Amelia, Irene Muflikh Nadhiroh, dan Aulia Hadi.

Perlu dicatat bahwa dalam tahapan *data pre-processing* ditemukan sebanyak 65 data rumah tangga yang dinyatakan tidak dapat digunakan dalam penyusunan indeks kerentanan kemiskinan. Hal ini karena sebanyak 10 data rumah tangga tidak lengkap dan tidak konsisten. Sementara itu, 55 data rumah tangga dikeluarkan dari penyusunan indeks kerentanan kemiskinan karena rumah tangga tersebut memiliki karakteristik tidak ada anggota rumah tangga yang memiliki pekerjaan dan sudah lanjut usia (di atas 65 tahun). Oleh karena itu, data yang digunakan untuk menyusun indeks kerentanan kemiskinan hanya data valid yang berasal dari 1.134 rumah tangga.

Dari hasil tabulasi kuesioner, dimensi kerentanan di Kota Yogya dan Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 7. Dimensi kerentanan di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Tabel 8.

Hasil survei Provinsi DIY menunjukkan bahwa ada beberapa variabel kerentanan yang lebih menonjol di perkotaan (Kota Yogyakarta) dan ada beberapa variabel yang lebih menonjol di perdesaan (Kabupaten Gunungkidul). Dari 12 variabel yang digunakan, ada sembilan variabel (beban rumah tangga, produktivitas, kesehatan, pendapatan, migrasi, kepemilikan aset, pengeluaran, berutang, dan persepsi menghadapi kesulitan) yang menjadi karakteristik RT miskin perkotaan Yogyakarta. Di perdesaan Gunungkidul, hanya ada enam variabel (pendidikan, pendapatan, pengeluaran, berutang, menjual aset, dan persepsi tentang hidup). Artinya, RT miskin perkotaan Yogyakarta lebih rentan keberlangsungan hidupnya sebagai konsekuensi dari keterpaparan berbagai variabel yang diteliti. Hal tersebut mengindikasikan kompleksitas kemiskinan pada tingkat lokal yang perlu diperhitungkan dalam upaya pemerintah menanggulangi masalah kemiskinan.

Tabel 7. Temuan Variabel Kerentanan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul

NO.	VARIABEL	TEMUAN Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul
1.	<i>Tingkat Beban Rumah Tangga</i>	Sangat rentan (Jumlah ART lebih dari empat, jenis kelamin KRT perempuan, dan usia KRT nonproduktif ≥ 60 tahun, skor 3–4): Kota Yogya 53 (17,7%); Gunungkidul 44 (14,7%).
2.	<i>Tingkat Pendidikan</i>	Sangat rentan (Tidak pernah sekolah, putus sekolah dan lulus SD): Kota Yogya 203 (67,6%); Gunungkidul 238 (79,3%).
3.	<i>Tingkat Produktivitas</i>	Sangat rentan (Jumlah pencari nafkah dibagi jumlah ART, skor $\leq 0,25$, nilai minimal 0, nilai maksimal 1): Kota Yogya 53 (17,3%); Gunungkidul 30 (10%).
4.	<i>Tingkat Kesehatan</i>	Sangat rentan (ada ART sakit dan wafat): Kota Yogya 11 (3,7%); Gunungkidul 3 (1%).
5.	<i>Tingkat Pendapatan</i>	Sangat rentan (pendapatan per minggu \leq Rp100.000,00 + Remitansi Rp0,00): Kota Yogya 161 (53, 7%) + 272 (90,7%); Gunungkidul 238 (79,3%) +242 (80,7%).
6.	<i>Efektivitas Migrasi</i>	Sangat rentan (tidak ada perantau + perantau tanpa remitansi): Kota Yogya 241 (80,3%) + 31 (10,3%); Gunungkidul 223 (74,3%) + 19 (6,3%).
7.	<i>Tingkat Kepemilikan Aset</i>	Sangat rentan (tidak memiliki rumah): Kota Yogya 55 (18,3%) ; Gunungkidul 3 (1%). Rumah hadiah/warisan Kota Yogya 197 (65,67%); Gunungkidul 174 (58%).
8.	<i>Tingkat Pengeluaran</i>	Sangat rentan (pengeluaran rutin per minggu \leq Rp5.000,00 + rutin per bulan \leq Rp100.000,00 + tidak rutin per tahun \leq Rp200.000,00): Kota Yogya 77 (25,7%) + 93 (31%) + 124 (41,4%); Gunungkidul 21 (7%) + 145 (48,4%) + 154 (51,4%).
9.	<i>Pengalaman Berutang</i>	Sangat rentan (berutang dan tidak bisa membayar + berutang dan membayar melalui cicilan): Kota Yogya 4 (1,3%) + 38 (12,7%); Gunungkidul 2 (0,7%) + 167 (55,7%).
10.	<i>Pengalaman Menjual Aset</i>	Sangat rentan (pernah menjual dan tidak mampu membeli kembali + pernah menjual dan mampu membeli kembali sebagian): Kota Yogya 4 (1,3%) + 2 (0,7%); Gunungkidul 45 (15,3%) + 39 (13%).
11.	<i>Persepsi Menghadapi Kesulitan</i>	Sangat rentan (tidak mampu+ mampu dengan perubahan sumber makanan): Kota Yogya: 36 (12%) + 207 (69%); Gunungkidul 1 (0,3%) + 215 (71,7%).
12.	<i>Persepsi tentang Hidup: Takdir vs Usaha</i>	Sangat rentan (hidup adalah takdir): Kota Yogya: 31 (10,3%); Gunungkidul 51 (17%).

Tabel 8. Temuan Variabel Kerentanan Di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang

No.	Variabel	Temuan Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang
1.	<i>Tingkat Beban Rumah Tangga</i>	Sangat rentan (Jumlah ART lebih dari 4, jenis kelamin KRT perempuan, dan usia KRT nonproduktif \geq 60 tahun, skor 3–4): Kota Serang 27 (8,9%); Pandeglang 15 (5,1%) .
2.	<i>Tingkat Pendidikan</i>	Sangat rentan (Belum/tidak pernah sekolah dan tamat SD): Kota Serang 253 (83,8%); Pandeglang 266 (89,6%).
3.	<i>Tingkat Produktivitas</i>	Sangat rentan (Jumlah pencari nafkah dibagi jumlah ART, skor \leq 0,25, nilai minimal 0, nilai maksimal 1): Kota Serang 38 (12,6%); Pandeglang 20 (6,7%).
4.	<i>Tingkat Kesehatan</i>	Sangat rentan (ada ART sakit dan wafat): Kota Serang 8 (2,7%); Pandeglang 6 (2%).
5.	<i>Tingkat Pendapatan</i>	Sangat rentan (pendapatan per minggu \leq Rp100.000,00 + Remitansi Rp0,00): Kota Serang 94 (31,1%) + 302 (100%); Pandeglang 143 (48,1%) + 289 (97,3%).
6.	<i>Efektivitas Migrasi</i>	Sangat rentan (tidak ada perantau + perantau tanpa remitansi): Kota Serang 302 (100%); Pandeglang 288 (96,9%).
7.	<i>Tingkat Kepemilikan Aset</i>	Sangat rentan (tidak memiliki rumah): Kota Serang 3 (1%); Pandeglang 1 (0,3%). Rentan (Rumah hadiah/warisan): Kota Serang 132 (44%); Pandeglang 193 (65%).
8.	<i>Tingkat Pengeluaran</i>	Sangat rentan (pengeluaran rutin per minggu \leq Rp12.500,00 + rutin per bulan \leq Rp100.000,00 + tidak rutin per tahun \leq Rp200.000,00): Kota Serang 130 (43,1%) + 179 (59,3%) + 107 (35,5%); Pandeglang 31 (10,4%) + 147 (49,5%) + 120 (40,4%).
9.	<i>Pengalaman Berutang</i>	Sangat rentan (berutang dan tidak bisa membayar + berutang dan membayar melalui cicilan): Kota Serang 1 (0,3%) + 138 (45,7%); Pandeglang 0 + 8 (2,7%). Rentan (berutang dan membayar sekaligus dalam satu waktu): Kota Serang 10 (3,3%); Pandeglang 203 (68,3%).
10.	<i>Pengalaman Menjual Aset</i>	Sangat rentan (pernah menjual dan tidak mampu membeli kembali + pernah menjual dan mampu membeli kembali sebagian): Kota Serang 0 + 1 (0,3%); Pandeglang 5 (1,7%) + 5 (1,7%).
11.	<i>Persepsi Menghadapi Kesulitan</i>	Sangat rentan (tidak mampu menghadapi + mampu menghadapi dengan perubahan pendapatan atau sumber makanan): Kota Serang 84 (27,8%) + 214 (70,9%); Pandeglang 12 (4%) + 259 (87,2%).
12.	<i>Persepsi Tantang Hidup: Takdir vs Usaha</i>	Sangat rentan (hidup adalah takdir): Kota Serang 26 (8,6%); Pandeglang 23 (7,7%).

Hal yang kurang lebih sama dapat ditemukan di Provinsi Banten. Beberapa variabel kerentanan lebih menonjol di perkotaan (Kota Serang), sedangkan beberapa variabel lebih menonjol di perdesaan (Kabupaten Pandeglang). Dari 12 variabel yang digunakan, ada sepuluh variabel (beban rumah tangga, produktivitas, kesehatan, pendapatan, migrasi, kepemilikan aset, pengeluaran, berutang, persepsi menghadapi kesulitan, dan persepsi tentang hidup) yang menjadi karakteristik RT miskin perkotaan di Kota Serang. Di perdesaan Kabupaten Pandeglang, ada tujuh variabel (pendidikan, pendapatan, kepemilikan aset, pengeluaran, berutang, menjual aset, dan persepsi menghadapi kesulitan). Dengan kata lain, di Provinsi Banten, sama seperti di Provinsi DIY, RT miskin perkotaan lebih rentan keberlangsungan hidupnya dibandingkan dengan RT miskin perdesaan.

Walaupun ada kesamaan antara kota di Provinsi DIY dan Provinsi Banten, tampak bahwa kota di Provinsi Banten lebih rentan daripada kota di Provinsi DIY. Jika dilihat dari tingkat keterpaparan pada variabel-variabel yang diteliti, Kota Yogyakarta dan Kota Serang masing-masing terpapar oleh sembilan dan sepuluh variabel. Perbedaannya terletak pada satu variabel, yaitu variabel ke-12 terkait “persepsi tentang hidup adalah takdir” yang lebih banyak ditemukan di perkotaan Serang daripada di perkotaan Yogyakarta. Begitu pula dengan kasus perdesaan. Perdesaan di Provinsi Banten lebih rentan daripada perdesaan di Provinsi DIY karena terpapar pada variabel-variabel yang lebih banyak. Dalam kasus perdesaan ini, pembedanya terletak pada variabel tingkat kepemilikan aset, di mana lebih banyak “rumah yang merupakan warisan atau hadiah” di perdesaan Kabupaten Pandeglang daripada di perdesaan Kabupaten Gunungkidul. Perlu dicatat pula bahwa dalam hal “menghadapi kesulitan” lebih banyak ditemukan di perdesaan Kabupaten Pandeglang daripada di perdesaan Kabupaten

Tabel 9. Variabel Kerentanan di Provisin DIY dan Banten

No.	Variabel	Kerentanan di			
		Provinsi DIY		Provinsi Banten	
		Kota Yogya- karta	Kabu- paten Gunung- kidul	Kota Serang	Kabupaten Pandeglang
1.	<i>Tingkat Beban Rumah Tangga</i>	√		√	
2.	<i>Tingkat Pendidikan</i>		√		√
3.	<i>Tingkat Produktivitas</i>	√		√	
4.	<i>Tingkat Kesehatan</i>	√		√	
5.	<i>Tingkat Pendapatan</i>				
	▪ <i>Per minggu</i>		√		√
	▪ <i>No Remitansi</i>	√		√	
6.	<i>Efektivitas Migrasi</i>	√		√	
7.	<i>Tingkat Kepemilikan Aset (rumah)</i>				
	▪ <i>Tidak punya rumah</i>	√		√	
	▪ <i>Memiliki rumah warisan/hadiah</i>	√			√
8.	<i>Tingkat Pengeluaran</i>				
	▪ <i>Rutin per minggu</i>	√		√	
	▪ <i>Rutin per bulan</i>		√	√	
	▪ <i>Tidak rutin per tahun</i>		√		√
9.	<i>Pengalaman Berutang</i>				
	▪ <i>Berutang dan tidak bisa membayar</i>	√		√	
	▪ <i>Berutang dan membayar melalui cicilan</i>		√	√	
	▪ <i>Berutang dan membayar sekaligus dalam satu waktu</i>				√
10.	<i>Pengalaman Menjual Aset</i>				
	▪ <i>Menjual dan tidak mampu membeli kembali</i>		√		√
	▪ <i>Menjual dan mampu membeli kembali sebagian</i>		√		√
11.	<i>Persepsi Menghadapi Kesulitan</i>				
	▪ <i>Tidak mampu menghadapi</i>	√		√	
	▪ <i>Mampu dengan melakukan perubahan</i>	√			√
12.	<i>Persepsi tentang Hidup: Takdir vs Usaha</i>		√	√	

Gunungkidul. Sementara di perdesaan Kabupaten Gunungkidul lebih terfokus pada “hidup adalah takdir.”

Berdasarkan hasil diskusi dengan para pakar (*expert judgement*), dari 12 variabel kerentanan yang ada dalam kuesioner, disepakati delapan variabel yang dinilai cukup relevan untuk menyusun indeks kerentanan. Kedelapan variabel tersebut, yaitu

- 1) **Tingkat beban RT:** *Dependency ratio* (yang menunjukkan jumlah ART usia tidak produktif dibagi dengan ART produktif) dikurangi jumlah ART berusia produktif yang tidak bekerja.
- 2) **Nilai International Socio-Economic Index (ISEI) RT berdasarkan klasifikasi jenis pekerjaan:** Dalam penyusunan indeks kerentanan sosial masyarakat miskin, beragam pekerjaan responden diklasifikasikan berdasarkan *International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) with ISEI-08 scores*. ISEI scores diperoleh dari masing-masing jenis pekerjaan responden, kemudian dijumlahkan untuk suatu rumah tangga. ISEI scores suatu rumah tangga diperoleh dengan cara membagi jumlah ISEI scores suatu rumah tangga dengan total ART produktif di rumah tangga tersebut.
- 3) **Jumlah ART yang putus sekolah:** Jumlah seluruh ART yang putus sekolah dalam suatu RT. ART dikatakan putus sekolah apabila mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD)/sekolah menengah pertama (SMP)/sekolah menengah atas (SMA).
- 4) **Pendapatan per kapita keluarga:** (Jumlah pendapatan + jumlah remitansi)/Jumlah ART, di mana jumlah pendapatan merupakan seluruh pendapatan yang diterima dari seluruh ART yang bekerja setiap minggu. Sementara itu, jumlah

remitansi merupakan seluruh remitansi yang diterima dari ART yang merantau, baik di luar kota maupun luar negeri setiap bulan.

- 5) **Jumlah kepemilikan aset penting:** Seluruh aset penting yang dimiliki RT. Aset penting yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rumah, sawah/kebun, ternak, dan motor.
- 6) **Jumlah ART yang menderita sakit berat dan tidak bekerja:** Jumlah seluruh ART yang sedang sakit berat, seperti stroke, diabetes, dan kanker dalam sepuluh tahun terakhir tetapi berada dalam kelompok usia produktif.
- 7) **Jumlah ART merantau tanpa remitansi:** Seluruh ART yang merantau, tetapi tidak mengirimkan remitansi sehingga tidak dapat memberikan kontribusi nafkah bagi RT.
- 8) **Kemampuan melunasi utang:** Kemampuan sebuah RT dalam melunasi utangnya, mulai dari (a) tidak bisa membayar; (b) mencicil; hingga (c) membayar sekaligus dalam satu waktu.

Berdasarkan analisis faktor, kedelapan variabel tersebut dikelompokkan menjadi lima faktor utama sesuai dengan kemiripan dan nilai korelasi setiap variabel dengan faktor yang dibentuk. Kelima faktor utama tersebut adalah liabilitas, investasi sosial, nilai ekonomi, remitansi, dan kesehatan. Kelima faktor itu pada prinsipnya dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu liabilitas dan aset. Liabilitas adalah kewajiban. Aset adalah aktiva lancar yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban, terdiri atas investasi sosial, nilai ekonomi, remitansi, dan kesehatan. Jika liabilitas lebih besar daripada aset maka rumah tangga yang bersangkutan dapat dipastikan sangat rentan.

Bobot yang digunakan untuk masing-masing faktor, liabilitas, investasi sosial, nilai ekonomi, remitansi dan kesehatan, dalam menyusun indeks kerentanan kemiskinan adalah 0,25; 0,25; 0,25;

Tabel 10. Lima Faktor Kerentanan

LIABILITAS		ASET		
Liabilitas	Investasi sosial	Nilai Ekonomi	Remitansi	Kesehatan
Tingkat beban rumah tangga	Jumlah ART putus sekolah	Rata-rata pendapatan per kapita rumah tangga	Jumlah ART merantau tanpa remitansi	Jumlah ART usia produktif yang sakit keras sehingga tidak bekerja
Nilai ISEI rumah tangga	Kemampuan melunasi utang	Jumlah aset penting yang dimiliki		

0,10; 0,15. Penentuan bobot optimum untuk masing-masing faktor dalam menyusun indeks kerentanan kemiskinan diperoleh berdasarkan justifikasi para peneliti dan ahli. Hal ini karena peneliti dan para ahli telah memiliki pengalaman bertahun-tahun membahas objek penelitian, memiliki keterikatan terhadap objek, dan bisa memberikan pertimbangan yang lebih baik terhadap setiap variabel yang digunakan.

Proses penentuan bobot terhadap faktor berdasarkan justifikasi ahli ini juga disertai analisis sensitivitas faktor terhadap nilai indeks. Analisis sensitivitas berarti melihat pengaruh perubahan setiap faktor secara tunggal terhadap perubahan nilai indeks. Dengan melakukan analisis sensitivitas ini, diharapkan para ahli bisa dapat memahami dengan lebih baik bagaimana pengaruh setiap faktor terhadap nilai indeks. Analisis sensitivitas juga menjadi dasar pertimbangan para ahli dalam memberikan penentuan nilai bobot untuk setiap faktor, selain pertimbangan subjektif berdasarkan pengalaman. Tiga faktor pertama (liabilitas, investasi sosial, dan nilai ekonomi) masing-masing disusun oleh dua variabel dan dianggap memiliki signifikansi yang setara dalam menggambarkan kerentanan masyarakat miskin sehingga masing-masing diberi bobot yang sama, yaitu sebesar 0,25. Sementara itu, faktor kesehatan



Gambar 9. Skema Lima Faktor Kerentanan dari Indeks Kerentanan Sosial (*Social Vulnerability Index*)

dan remitansi masing-masing disusun oleh satu variabel. Faktor kesehatan dinilai lebih signifikan daripada faktor remitansi karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kesehatan mempunyai bobot lebih besar dari remitansi sehingga diberi bobot 0,15, sementara remitansi 0,10. Adapun komposit indeks yang digunakan dalam membangun indeks kerentanan kemiskinan dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut:

$$\text{Penyusun Indeks (Composite Index)}_{\text{Kerentanan}} = \\ 0,25 \text{ Liabilitas} + 0,25 \text{ Investasi Sosial} + 0,25 \text{ Nilai Ekonomi} + \\ 0,10 \text{ Remitansi} + 0,15 \text{ Kesehatan}$$

Liabilitas, Investasi Sosial, Nilai Ekonomi, Remitansi, dan Kesehatan berupa skor yang merupakan fungsi linear dari variabel-variabel penyusunnya. Koefisien (*loading-factor*)-nya tercantum dalam Tabel 11.

Berdasarkan *loading-factor matrix*, untuk setiap individu rumah tangga akan dihasilkan skor pada masing-masing faktor. Skor ini selanjutnya digunakan untuk perhitungan nilai indeks. Tabel 12 menunjukkan skor minimum dan maksimum dari masing-masing faktor. Setelah komposit indeks kerentanan kemiskinan diperoleh maka langkah selanjutnya membuat histogram dari indeks yang dihasilkan. Dengan menggunakan histogram, dapat diperoleh informasi sebaran dari indeks kerentanan kemiskinan yang dihasilkan.

Histogram tersebut menggambarkan sebaran frekuensi indeks kerentanan rumah tangga. Frekuensi yang tinggi menunjukkan puncak sebaran. Dalam satu histogram, bisa terdapat lebih dari satu puncak yang menandakan terdapat beberapa kelompok. Berdasarkan histogram indeks kerentanan kemiskinan, rumah tangga miskin terbagi ke dalam empat kategori, yaitu rumah tangga dengan indeks kerentanan $< 0,4$; rumah tangga dengan

Tabel 11. *Factor Loading Matrix*

Variabel	Faktor				
	1	2	3	4	5
	Liabilitas	Investasi Sosial	Nilai Ekonomi	Remitansi	Kesehatan
Tingkat Beban RT	-.576	.071	.006	.016	.014
ISEI Score per ART Produktif	.582	-.015	.051	.004	-.074
Jumlah ART Putus Sekolah	-.026	.638	.051	.013	.078
Pendapatan Per kapita	.040	.073	.757	.220	.187
Jumlah Aset Penting Dimiliki	.009	.029	-.587	.318	.249
Jumlah Sakit Keras Tidak Bekerja	-.050	.002	.023	-.073	.931
Jumlah ART Tanpa Remitansi	-.006	-.012	.021	.904	-.078
Kemampuan Melunasi	.064	-.635	-.025	.014	.059

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Tabel 12. Batas Minimum dan Maksimum Skor Setiap Faktor

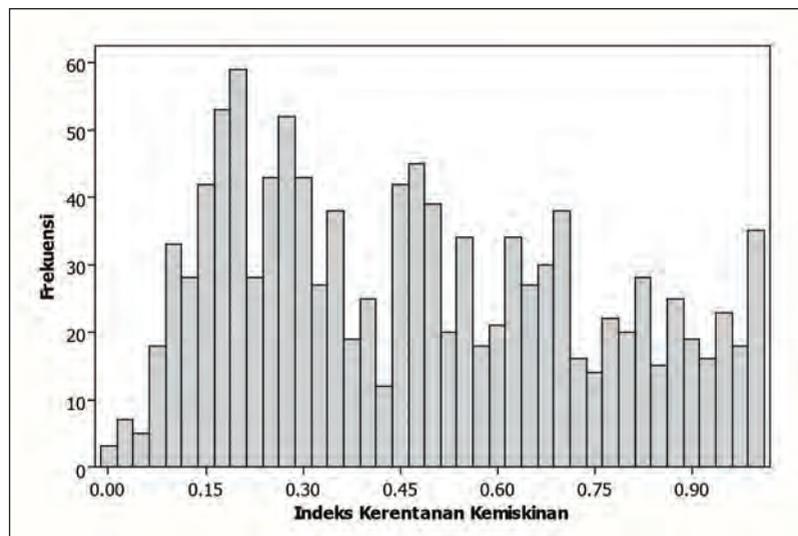
	Liabilitas	Investasi Sosial	Nilai Ekonomi	Remitansi	Kesehatan
Minimum	-2,78	-2,26	-1,33	-0,05	0,07
Maksimum	4,44	6,60	6,60	6,60	6,60

indeks kerentanan antara 0,4–0,6; rumah tangga dengan indeks kerentanan 0,6–0,8; dan rumah tangga dengan indeks kerentanan > 0,8. Semakin besar indeks menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut semakin rentan. Matriks sebaran responden rumah tangga miskin berdasarkan indeks kerentanan dapat dilihat pada Tabel 13.

Kategorisasi dari tidak rentan sampai sangat rentan yang didasarkan atas distribusi hasil penghitungan sampel ini sulit diterapkan di daerah lain karena profil atau distribusi frekuensinya akan berbeda. Jika pada Gambar 7 terlihat ada kecenderungan momen *skewness* ke kiri, di daerah lain mungkin akan ke kanan atau bahkan berdistribusi normal. Dalam buku ini—karena bersifat *exploratory*—fakta lapangan dijadikan pertimbangan utama dalam penentuan *cut off* kelompok RT tidak rentan sampai sangat rentan. Berikut adalah statistika deskriptif keempat kelompok tersebut.

Tabel 13. Matriks Sebaran Responden Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Indeks Kerentanan

	TIDAK RENTAN < 0,4 (1)	CUKUP RENTAN 0,4-0,6 (2)	RENTAN 0,6-0,8 (3)	SANGAT RENTAN >0,8 (4)
Jumlah	514 RT	229 RT	201 RT	190 RT
Liabilitas	-	-	+	++
Investasi Sosial	-	+	++	+++
Nilai Ekonomi	-	+	+	+
Remitansi	-	+	+	++
Kesehatan	-	-	+	++



Gambar 10. Grafik Frekuensi Sebaran dari Indeks Kerentanan Kemiskinan

Tabel 14. Klasifikasi RT Miskin berdasarkan Indeks Kerentanan Sosial

Indikator	Kelompok			
	Tidak Rentan	Cukup Rentan	Rentan	Sangat Rentan
Nilai indeks	< 0,4	0,4–0,6	0,6–0,8	>0,8
Σ dalam sampel	514 RT	229 RT	201 RT	190 RT
Σ ART	4	4	5	6
Σ pencari nafkah	2	2	2	2
Σ ART produktif tidak bekerja	1	1	1	2
Nilai <i>dependency ratio</i>	0,57	0,44	0,32	0,25
Variasi Pekerjaan	Buruh Tani Buruh Serabutan Petani Subsisten Tukang Ban- gunan Pramuniaga	Buruh Tani Petani Subsisten Buruh Serabutan Buruh Konstruksi Tukang Ban- gunan	Buruh Tani Petani Subsisten <i>Kenek</i> Buruh Serabutan Buruh Harian Toko	Petani Subsisten Buruh Tani Asisten RT Buruh Serabutan <i>Kenek</i>
Σ ART putus sekolah	0	0	0	2
Kemampuan Melunasi Utang:	89%	39%	17%	9%
Tidak pernah berutang	5%	50%	73%	87%
Berutang & mencicil	6%	11%	10%	4%
Berutang & membayar sekaligus dalam satu waktu				
Pendapatan per kapita RT	Rp126.443,00	Rp109.377,00	Rp127.908,00	Rp110.491,00
Aset penting yang dimiliki	Rumah Motor	Rumah Sawah/Kebun Ternak Motor	Rumah Sawah/Kebun Ternak Motor	Rumah Motor
Σ ART perantau	1–3	1–3		
Remitansi	Rp390.359,00	Rp471.053,00	Rp528.571,00	Rp1.000.000,00
Σ RT dalam sampel dengan ART usia produktif yang sakit dan tidak bekerja	1	7	8	5

1. Kelompok Tidak Rentan

Kelompok tidak rentan terdiri atas 514 RT. Dilihat dari liabilitasnya, kelompok ini tidak rentan, baik dari sisi tingkat beban RT maupun *ISEI score* per ART produktif. Rumah tangga yang masuk ke dalam kelompok ini memiliki rata-rata jumlah ART sebanyak empat orang. Kelompok ini juga memiliki nilai *dependency ratio* paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam kelompok ini, suatu rumah tangga cenderung memiliki jumlah ART berusia tidak produktif yang lebih banyak dibandingkan jumlah ART berusia produktif. Namun RT yang masuk dalam kelompok ini juga memiliki jumlah ART produktif yang tidak bekerja lebih sedikit dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini sejalan dengan tingkat beban RT yang dimiliki RT yang masuk ke dalam kelompok RT tidak rentan. RT yang masuk dalam kelompok ini memiliki tingkat beban rumah tangga yang lebih kecil dibandingkan kelompok lainnya jika dilihat dari nilai rasio dependensi dan jumlah ART produktif yang tidak bekerja yang dimiliki.

Jika dilihat dari jenis pekerjaan, rumah tangga dalam kelompok tidak rentan memiliki rata-rata *ISEI score* lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga dalam kelompok ini lebih baik dibandingkan kelompok lainnya. Mayoritas ART dari RT yang ada dalam kelompok ini bekerja sebagai buruh tani, buruh serabutan, petani subsisten, tukang bangunan, dan pramuniaga.

Dari dimensi utama investasi sosial, dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah ART putus sekolah yang dimiliki RT dalam kelompok tidak rentan ini lebih kecil dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, berdasarkan kemampuan melunasi utang, sebanyak 89% dari 514 RT yang berada dalam kelompok ini tidak pernah berutang kepada RT lain. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang berada

Tabel 14a. Indikator Rumah Tangga Miskin (RTM) Tidak Rentan

Indikator	Tidak Rentan
Nilai indeks	< 0,4
Σ dalam sampel	514 RT
Σ ART	4
Σ pencari nafkah	2
Σ ART produktif tidak bekerja	1
Nilai <i>dependency ratio</i>	0,57
Variasi Pekerjaan	Buruh Tani Buruh Serabutan Petani Subsisten Tukang Bangunan Pramuniaga
Σ ART putus sekolah	0
Kemampuan Melunasi Utang:	
Tidak pernah berutang	89%
Berutang & mencicil	5%
Berutang & membayar sekaligus dalam satu waktu	6%
Pendapatan per kapita RT	Rp126.443,00
Aset penting yang dimiliki	Rumah Motor
Σ ART perantau	1-3
Remitansi	Rp390.359,00
Σ RT dalam sampel dengan ART usia produktif yang sakit dan tidak bekerja	1

dalam kelompok ini mampu memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya dari pendapatan dan aset yang dimiliki. Sementara itu, sebanyak 11% dari jumlah RT yang ada dalam kelompok ini pernah berutang kepada RT lain. Mereka menggunakan cara mencicil dan membayar sekaligus dalam satu waktu untuk melunasi utangnya ke RT lain.

Kelompok ini memiliki kisaran rata-rata pendapatan per kapita yang diperoleh setiap minggunya sebesar Rp126.000,-. Nilai pendapatan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Sementara itu, rata-rata aset penting yang

dimiliki oleh RT dalam kelompok tidak rentan ini adalah rumah dan motor yang tidak jauh berbeda dengan RT di kelompok lainnya. Perbedaan mungkin terjadi jika dilihat dari luas dan kondisi fisik bangunan rumah.

Rumah tangga yang masuk ke dalam kelompok ini memiliki ART yang merantau antara satu sampai tiga orang. Adanya ART yang merantau diikuti juga dengan adanya remitansi yang dikirim untuk rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi salah satu sumber pendapatan tambahan yang dapat membantu perekonomian keluarga. Realita ini sejalan dengan rata-rata jumlah ART yang merantau, tetapi tidak mengirimkan remitansi. Rumah tangga yang termasuk dalam kelompok ini memiliki nilai rata-rata jumlah ART yang merantau tanpa remitansi paling kecil dibandingkan kelompok yang lainnya.

Jika dilihat dari sisi kesehatan, kelompok tidak rentan ini memiliki rata-rata jumlah ART sakit keras yang tidak bekerja paling kecil dibandingkan kelompok yang lain. Pada kelompok ini, jumlah ART usia produktif yang sakit dan tidak bekerja adalah satu orang.

2. Kelompok Cukup Rentan

Kelompok ini terdiri atas 229 RT. Jumlah RT yang masuk ke dalam kelompok ini hanya setengah dari jumlah RT yang masuk ke dalam kelompok tidak rentan. Pada dasarnya, RT yang ada dalam kelompok ini memiliki pola jumlah ART (produktif dan tidak produktif), *dependency ratio*, jumlah ART usia produktif yang tidak bekerja, dan tingkat beban rumah tangga mirip dengan kelompok tidak rentan. Artinya, liabilitas kelompok kedua ini tidak jauh berbeda dari kelompok tidak rentan. Namun, tingkat beban rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga ini lebih banyak dibandingkan tingkat beban rumah tangga yang masuk pada kelompok tidak rentan.

Tabel 14b. Indikator RTM Cukup Rentan

Indikator	Cukup Rentan
Nilai indeks	0,4–0,6
Σ dalam sampel	229 RT
Σ ART	4
Σ pencari nafkah	2
Σ ART produktif tidak bekerja	1
Nilai <i>dependency ratio</i>	0,44
Variasi Pekerjaan	Buruh Tani Petani Subsisten Buruh Serabutan Buruh Konstruksi Tukang Bangunan
Σ ART putus sekolah	0
Kemampuan Melunasi Utang:	
Tidak pernah berutang	39%
Berutang & mencicil	50%
Berutang & membayar sekaligus dalam satu waktu	11%
Pendapatan per kapita RT	Rp109.377,00
Aset penting yang dimiliki	Rumah Sawah/Kebun Ternak Motor
Σ ART perantau	1–3
Remitansi	Rp471.053,00
Σ RT dalam sampel dengan ART usia produktif yang sakit dan tidak bekerja	7

Berdasarkan jenis pekerjaan, RT dalam kelompok cukup rentan memiliki rata-rata ISEI *score* sedikit lebih kecil dibandingkan kelompok tidak rentan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh anggota rumah tangga dalam kelompok ini tidak jauh berbeda dengan kelompok tidak rentan. ART dalam kelompok ini umumnya bekerja sebagai buruh tani, petani subsisten, buruh serabutan, buruh konstruksi, dan tukang bangunan.

Selain itu, rata-rata jumlah ART putus sekolah yang dimiliki oleh rumah tangga yang berada dalam kelompok ini lebih banyak dibandingkan kelompok tidak rentan. Jika dilihat dari kemampuan melunasi utang, sebanyak 39% dari 229 rumah tangga yang berada dalam kelompok ini tidak pernah berutang kepada rumah tangga lain. Sementara sisanya sebesar 61% pernah berutang kepada rumah tangga lain. Mayoritas rumah tangga yang memiliki utang kepada rumah tangga lain mencicil utangnya agar dapat lunas. Hanya sedikit dari mereka yang membayar sekaligus dalam satu waktu untuk melunasi utangnya ke rumah tangga lain.

Kelompok ini memiliki kisaran rata-rata pendapatan per kapita yang diperoleh setiap minggunya sebesar Rp109.000,-. Nilai pendapatan tersebut lebih kecil jika dibandingkan kelompok tidak rentan. Berbeda dengan kelompok tidak rentan, kelompok ini memiliki aset penting berupa rumah, motor, ternak, dan juga sawah atau kebun.

Jumlah ART yang merantau dalam kelompok ini memiliki pola yang sama dengan kelompok tidak rentan, yaitu antara satu sampai tiga orang. Namun, rata-rata jumlah ART yang merantau tanpa remitansi dalam kelompok ini dua kali lipat dari kelompok tidak rentan. Rata-rata remitansi yang diterima RT ini adalah Rp471.053,-.

Pada kelompok ini, jumlah ART usia produktif yang sakit dan tidak bekerja adalah tujuh orang.

3. Kelompok Rentan

Kelompok ini terdiri atas 201 RT. Tingkat beban rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga ini lebih banyak dibandingkan kelompok tidak rentan ataupun cukup rentan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ART produktif yang dimiliki oleh suatu rumah tangga dalam kelompok ini lebih sedikit dibandingkan jumlah ART yang tidak produktif. Selain itu, jumlah ART usia produktif yang tidak bekerja dalam kelompok ini juga lebih banyak dibandingkan dua kelompok sebelumnya.

Rumah tangga dalam kelompok rentan memiliki rata-rata ISEI *score* yang tidak jauh berbeda dibandingkan kelompok cukup rentan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh RT dalam kelompok ini tidak jauh berbeda dengan kelompok cukup rentan. Kebanyakan ART dalam kelompok ini bekerja sebagai buruh tani, petani subsisten, pembantu tukang (*kenek*), buruh serabutan, dan buruh harian toko.

Jika dilihat dari pendapatan per kapita keluarga, kisaran rata-rata pendapatan per kapita keluarga yang diperoleh setiap minggu Rp127.000,-. Nilai rata-rata ini lebih besar dibandingkan dua kelompok sebelumnya. Namun, besarnya pendapatan ini tidak dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Hal ini terlihat dari kemampuan melunasi utang. Mayoritas rumah tangga dalam kelompok ini pernah berutang kepada rumah tangga lain. Sebanyak 83% rumah tangga dalam kelompok ini berutang dan mereka paling banyak memilih cara mencicil dalam melunasinya. Sementara itu, hanya 17% dari 201 rumah tangga yang ada dalam kelompok ini yang tidak pernah berutang kepada rumah tangga lain.

Rata-rata remitansi yang diterima RT ini adalah Rp528.571,-. Pada kelompok ini, jumlah ART usia produktif yang sakit dan tidak bekerja adalah delapan orang.

Tabel 14c. Indikator RTM Rentan

Indikator	Rentan
Nilai indeks	0,6–0,8
Σ dalam sampel	201 RT
Σ ART	5
Σ pencari nafkah	2
Σ ART produktif tidak bekerja	1
Nilai <i>dependency ratio</i>	0,32
Variasi Pekerjaan	Buruh Tani Petani Subsisten <i>Kenek</i> Buruh Serabutan Buruh Harian Toko
Σ ART putus sekolah	0
Kemampuan Melunasi Utang:	
Tidak pernah berutang	17%
Berutang & mencicil	73%
Berutang & membayar sekaligus dalam satu waktu	10%
Pendapatan per kapita RT	Rp127.908,-
Aset penting yang dimiliki	Rumah Sawah/Kebun Ternak Motor
Σ ART perantau	
Remitansi	Rp528.571,-
Σ RT dalam sampel dengan ART usia produktif yang sakit dan tidak bekerja	8

4. Kelompok Sangat Rentan

Kelompok ini terdiri dari 190 rumah tangga dengan rata-rata ART berjumlah enam orang. Kelompok ini memiliki nilai *dependency ratio* yang paling kecil dibandingkan kelompok lainnya. Nilai tersebut menunjukkan bahwa suatu rumah tangga yang berada dalam kelompok ini cenderung memiliki jumlah ART produktif yang lebih sedikit dibandingkan jumlah ART tidak produktif. Selain itu, jumlah ART produktif yang tidak bekerja dalam kelompok ini lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini sejalan dengan tingkat beban rumah tangga dalam kelompok ini yang nilainya lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.

Berdasarkan jenis pekerjaan, rumah tangga dalam kelompok sangat rentan memiliki rata-rata ISEI *score* paling kecil dibandingkan kelompok lainnya. ART di kelompok ini umumnya bekerja sebagai petani subsisten, buruh tani, asisten rumah tangga (ART), buruh serabutan, dan pembantu tukang (*kenek*).

Selain itu, rata-rata jumlah ART putus sekolah yang dimiliki rumah tangga yang berada dalam kelompok ini paling besar dibandingkan kelompok lainnya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa jumlah ART putus sekolah di kelompok ini mencapai rata-rata dua ART di setiap RT.

Kelompok ini memiliki kisaran rata-rata pendapatan per kapita yang diperoleh setiap minggunya sebesar Rp110.000,-. Rumah tangga yang masuk ke dalam kelompok ini mayoritas tidak memiliki ART yang merantau. Jika dilihat berdasarkan kemampuan melunasi utang, kelompok ini memiliki persentase rumah tangga yang tidak pernah berutang kepada rumah tangga lain paling kecil dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga dalam kelompok ini pernah berutang kepada rumah tangga lain. Sebanyak 91% rumah tangga dalam

Tabel 14d. Indikator RTM Sangat Rentan

Indikator	Sangat Rentan
Nilai indeks	>0,8
Σ dalam sampel	190 RT
Σ ART	6
Σ pencari nafkah	2
Σ ART produktif tidak bekerja	2
Nilai <i>dependency ratio</i>	0,25
Variasi Pekerjaan	Petani Subsisten Buruh Tani Asisten RT Buruh Serabutan <i>Kenek</i>
Σ ART putus sekolah	2
Kemampuan Melunasi Utang:	
Tidak pernah berutang	9%
Berutang & mencicil	87%
Berutang & membayar sekaligus dalam satu waktu	4%
Pendapatan per kapita RT	Rp110.491
Aset penting yang dimiliki	Rumah Motor
Σ ART perantau	
Remitansi	Rp1.000.000
Σ RT dalam sampel dengan ART usia produktif yang sakit dan tidak bekerja	5

kelompok ini berutang dan mereka paling banyak memilih cara mencicil untuk melunasinya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi kesehatan, kelompok ini memiliki jumlah ART sakit keras yang tidak bekerja sebanyak lima orang.

Pengukuran indeks kerentanan sosial ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam melihat dan menyelesaikan isu kemiskinan di Indonesia. Melalui pengukuran ini, dapat dilihat bahwa jumlah RT miskin yang sangat rentan adalah 190 dari total sampel sebanyak 1.134 RT miskin. Artinya, dari seluruh RT

responden yang menerima bantuan sosial dari pemerintah, ada 17% RT yang seharusnya menjadi prioritas utama karena sangat rentan terhadap kemiskinan, dan pada hakikatnya mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan. Upaya yang perlu dilakukan bukan pengentasan kemiskinan, melainkan pemeliharaan fakir miskin sebagaimana dicanangkan dalam konstitusi kita. Namun, tentu saja upaya pemberdayaan secara bertahap—terutama pada anak-anak mereka—harus terus dilakukan agar suatu saat mereka dapat keluar dari kemiskinan.

BAB IV

***LIFE HISTORY*—PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN**

Untuk memahami kondisi kerentanan sebuah rumah tangga secara kualitatif, buku ini melakukan *life history* terhadap 40 keluarga yang dipilih secara acak dan purposif di empat lokasi penelitian, yaitu di Kota Yogyakarta dan Kota Serang sebagai representasi daerah perkotaan, dan di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Pandeglang sebagai representasi daerah perdesaan. Pengambilan sampel *life history* ini tidak mengikuti kategori RTM yang diperoleh dari hasil kuesioner. Hal ini karena dua alasan. Pertama, tidak ada data di lapangan yang menunjukkan adanya kategori keluarga tidak rentan sampai sangat rentan. Kedua, penelitian *life history* dilakukan sebelum kategori RTM tidak rentan sampai sangat rentan diperoleh dari hasil pengolahan kuesioner. Oleh karena itu, pemilihan 10 keluarga di setiap lokasi ditentukan oleh jenis-jenis pekerjaan yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, jika di lokasi yang ditetapkan (pada tingkat kecamatan dan kelurahan), pekerjaan sebagai nelayan/buruh nelayan dan petani/buruh tani cukup mendominasi, dipilih beberapa responden yang

bekerja sebagai nelayan/buruh nelayan dan petani/buruh tani. Syarat lainnya, keluarga tersebut mempunyai anggota keluarga lebih dari dua orang atau sedikitnya ada empat anggota keluarga yang tinggal bersama pada waktu penelitian dilakukan. Selanjutnya, petugas lapangan diminta melihat kondisi kehidupan mereka yang kurang mampu ketika menentukan anggota rumah tangga tertentu sebagai calon responden. Dalam metode *life history* ini, kecuali balita dan anak SD, hampir seluruh anggota rumah tangga diwawancarai. Wawancara dilakukan oleh tim peneliti, bukan oleh petugas lapangan karena dengan waktu di lapangan yang terbatas (7–10 hari untuk satu lokasi), tim peneliti tidak mempunyai kesempatan melatih petugas lapangan untuk membantu wawancara. Selain dinarasikan,⁷ data yang diperoleh juga dikategorikan berdasarkan kriteria yang hampir sama dengan kriteria yang dipakai untuk menyusun indeks kerentanan (seperti kondisi tempat tinggal, jenis pekerjaan, jumlah ART dibandingkan jumlah pencari nafkah, dan lain-lain). Namun, penetapan ranking bergantung penilaian tim peneliti yang disepakati secara bersama-sama. Hasil pemetaan *Life History* di Banten dan DIY, masing-masing dengan ranking kemiskinan mulai dari yang tidak rentan (ranking 1) sampai yang paling rentan (ranking 20) dapat dilihat pada Tabel 15.

Secara kualitatif, sulit untuk menentukan batas sangat rentan, rentan, cukup rentan, dan tidak rentan. Penilaian ranking kemiskinan yang dibuat peneliti cenderung subjektif berdasarkan observasi dan hasil wawancara. Walaupun penilaian berdasarkan fisik rumah menentukan, ada hal lain yang menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan ranking kemiskinan setiap responden. Hal tersebut adalah cerita beberapa anggota rumah tangga yang diwawancarai dalam menggambarkan kehidupan mereka sebagai

⁷ Narasi disusun dalam laporan terpisah dengan judul “Life History 40 Rumah Tangga Miskin di Provinsi DIY dan Banten.”

Tabel 15. Life History Mapping di Provinsi DIY dan Banten

Provinsi DIY (merah muda= Kota Yogyakarta; hijau muda = desa di Kabupaten Gunungkidul)										
Ranking kemiskinan	Nama KRT	Gender	Lokasi	Pekerjaan KRT	Jumlah ART yang tinggal	Jumlah Pencari Nafkah	Jumlah ART bersekolah	Jumlah ART Balita/lansia	Jumlah ART putus sekolah	Kepemilikan dan kondisi tempat tinggal
1	Mujiono	Pria	Jogja	Tukang Becak / Aktifis	4 (anak pertama baru saja menikah & tinggal di rumah mertua)	3 (istri berjualan)	1 SMK	_____	_____	Rumah berstatus sewa tahunan, tetapi sudah punya rumah sendiri di pinggir sungai
2	Supardi	Pria	Jogja	Aktifis	7	4 pencari nafkah (suami aktifis, istri juga aktifis berpenghasilan tidak tetap, satu anak asisten dosen, satu anak guru, menantu bekerja serabutan)	1 SD 1 TK	_____	_____	Rumah berantai ke-ramik kecuali dapur, berstatus hak milik
3	Suwardi	Pria	GK	Petani Tembaku / menanam di sela-sela perkebunan kayu putih pemerintah tanpa sewa	4	2 pencari nafkah (istri membantu suami bertani)	1 SMA Kelas 3 1 SD Kelas 2	_____	_____	Rumah sendiri di tanah mertua, adik ipar istri yang sudah menikah juga membangun rumah yang lebih bagus di pekarangan yang sama

Provinsi DIY (merah muda= Kota Yogyakarta; hijau muda = desa di Kabupaten Gunungkidul)

Ranking kemiskinan	Nama KRT	Gender	Lokasi	Pekerjaan KRT	Jumlah ART yang tinggal	Jumlah Pencari Nafkah	Jumlah ART bersekolah	Jumlah Balita/lansia	Jumlah ART putus sekolah	Kepemilikan dan kondisi tempat tinggal
4	Sunarto	Pria	GK	Tukang Bakso Tusuk	9 (kakak ipar dan dua anaknya tinggal bersama)	1 orang	2 SD	2 lansia	_____	rumah mertua cukup besar
5	Parman	Pria	GK	Buruh Tani / Petani Gurem	5	2 Pencari nafkah (istri ikut berladang)	1 SD 1 SMK	_____	1 lansia	Rumah milik mertua
6	Nanang	Pria	Jogja	Buruh Las	4	2 (ayah tukang becak)	1 SD	1 balita	1 lansia	Rumah sewa tahunan
7	Tati	Wanita	Jogja	Ojek Jemputan Anak Sekolah	4	2 (suami, rongsokan)	1 SMK 1 SD	_____	_____	Rumah milik sendiri, tapi berlokasi di kawasan wedi gengser
8	Sugito	Pria	Jogja	Tukang Pijat	10	4 pencari nafkah (menantu pertama buruh bangunan, menantu ke-2 ART, anak ke-3 tukang pijat)	1 SMK 2 SD	2 balita	_____	Rumah milik sendiri

Provinsi DIY (merah muda= Kota Yogyakarta; hijau muda = desa di Kabupaten Gunungkidul)										
Ranking kemiskinan	Nama KRT	Gender	Lokasi	Pekerjaan KRT	Jumlah ART yang tinggal	Jumlah Pencari Nafkah	Jumlah ART bersekolah	Jumlah Balita/lansia	Jumlah ART putus sekolah	Kepemilikan dan kondisi tempat tinggal
9	Sutopo	Pria	Jogja	Buruh Es Serut	10	7 pencari nafkah (istri & anak ke-3 bekerja di warung, membantu pertama buruh bangunan, anak kedua buruh es serut, membantu buruh katering, anak keempat bekerja sebagai OB, cucu membantu buruh searabutan)	1 SMP (cucu)	_____	1 balita	Rumah sewa
10	Wasono	Pria	GK	Buruh Tani	5	2 pencari nafkah (istri buruh tani dan serabutan)	1 SMK	_____	2 lansia	Rumah warisan orang tua sudah menjadi hak milik dari hasil pembagian dengan seluruh saudara kandung
11	Wagiman	Pria	GK	Buruh Bangunan	4	2 pencari nafkah (istri jadi pengasuh anak)	1 SMP 1 SD	_____	_____	Rumah sendiri dari hasil tanah warisan dari orang tua Wagiman

Provinsi DIY (merah muda= Kota Yogyakarta; hijau muda = desa di Kabupaten Gunungkidul)

Ranking kemiskinan	Nama KRT	Gender	Lokasi	Pekerjaan KRT	Jumlah ART yang tinggal	Jumlah Pencari Nafkah	Jumlah ART ber-sekolah	Jumlah Balita/lansia	Jumlah ART putus sekolah	Kepemilikan dan kondisi tempat tinggal
12	Rugayati	Wanita	GK	Buruh Tani / pembuat sapu lidi pesenan	4	2 pencari nafkah (anak lulus SMP sebagai penebang kayu)	1 SMP kelas 2	1 lansia	_____	Rumah warisan orang tua
13	Wage	Pria	GK	Buruh Nelayan / Pencari Rumput	6	3 pencari nafkah (menantu buruh bangunan & istri buruh pencari rumput)	_____	1 balita 1 lansia	_____	Rumah warisan orang tua
14	Marji-nem	Wanita	GK	Buruh Tani	4	2 pencari nafkah (istri juga buruh tani)	1 SMP (diffabel)	1 lansia	_____	Rumah masih milik orang tua (ibu)
15	Mur-siyem	Wanita	GK	Buruh Tani	3	2 (1 anak buruh pabrik roti)	1 SD kelas 5	_____	1 lansia	Rumah warisan orang tua
16	Lamini	Wanita	GK	Buruh Tani	3	1 (anak laki-laki di surabaya tidak memberi remi-tansi)	2 SMP kelas 1	_____	_____	Rumah warisan almarhum suami
17	Murti-nem	Wanita	Jogja	Pedagang Warung	5	2 pencari nafkah (menantu buruh bangunan/ serabutan).	1 SD (cucu)	1 balita (cucu)	_____	Rumah belum lunas, sertifikat masih di Bank

Provinsi DIY (merah muda= Kota Yogyakarta; hijau muda = desa di Kabupaten Gunungkidul)										
Ranking kemiskinan	Nama KRT	Gender	Lokasi	Pekerjaan KRT	Jumlah ART yang tinggal	Jumlah Pencari Nafkah	Jumlah ART bersekolah	Jumlah Balita/lansia	Jumlah ART putus sekolah	Kepemilikan dan kondisi tempat tinggal
18	Sathyem	Wanita	Jogja	Asisten Rumah Tangga	6	3 pencari nafkah (anak tukang kebun, menantu buruh pabrik)	1 SMP (cucu)	1 balita (cucu)	Satu anak kurang waras tidak bekerja	Rumah membangun sendiri di tanah sewa <i>wedi gengser</i>
19	Ngati-man	Pria	Jogja	Rongsokan / Tukang Becak	4	2 pencari nafkah (dua anak sudah bekerja tapi jarang memberi uang, istri buruh rumah makan)	_____	_____	_____	Rumah dibuat sendiri di kawasan <i>wedi gengser</i>
20	Kirjo	Pria	Jogja	Pengamen	7	3 pencari nafkah (istri mengamen dan anak ikut mengamen)	2 SMK 2 SD (1 cucu, ibu merantau ke Bali)	1 balita	_____	Rumah sedang dibuatkan dengan dana bantuan, menumpang di belakng Balai Warga.

Provinsi Banten (merah muda = Kota Serang; hijau muda = desa di Kabupaten Pandeglang)

Ranking kemiskinan	Nama KRT	Gender	Lokasi	Pekerjaan KRT	Jumlah ART	Jumlah Pencari Nafkah	Jumlah ART bersekolah	Jumlah ART balita / lansia	Jumlah ART putus sekolah	Kepemilikan dan kondisi tempat tinggal
1	Mustakim	Pria	Pandeglang	Pembuat Perahu	4	3 (istri penjual ikan / agen nelayan, anak ke-2 karyawan pabrik mengirim remintansi)	Dua anak baru lulus SMK, SMK,	_____	Satu anak dg keterbelakangan mental tinggal dengan nenek	Rumah berlantai keramik
2	Jamratun	Wanita	Pandeglang	Penjual Ikan / Warung	6 (dua anak tinggal di pekarangan sama, ikut makan, 1 cerai dengan satu anak)	1 pencari nafkah (anak bantu jaga warung)	1 SMK 1 SD Kelas 5 (cucu)	_____	1 anak putus sekolah SMA (tidak bekerja)	Rumah masih sewa Rp Rp750.000,00 per tahun untuk tiga rumah
3	Saad	Pria	Serang	Tukang Becak	5	4 pencari nafkah (istri ART, anak ke-2 buruh toko di Pasar Rau, menantu salesman kopi)	_____	1 balita (cucu)	_____	Rumah berlantai semi keramik bantuan menantu
4	Jono	Pria	Serang	Buruh Bangunan	5	3 pencari nafkah (2 anak lulus SMK, karyawan pabrik & SPBU, anak per-tama buruh pabrik sudah menikah, tetapi masih membantu)	1SD	1 balita (cucu)	_____	Rumah dapat dana bantuan, rumah anak lebih bagus di sebelah rumah
5	Ramlan	Pria	Serang	Satpam Outsourcing	4	1 pencari nafkah	1 SD	1 balita	_____	Rumah sendiri tapi berbentuk rumah petakan

Provinsi Banten (merah muda = Kota Serang, hijau muda = desa di Kabupaten Pandeglang)										
Ranking kemiskinan	Nama KRT	Gender	Lokasi	Pekerjaan KRT	Jumlah ART	Jumlah Pencari Nafkah	Jumlah ART bersekolah	Jumlah ART balita / lansia	Jumlah ART putus sekolah	Kepemilikan dan kondisi tempat tinggal
6	Nurhasanah	Wanita	Serang	Tukang Sayur / penjaja gorengan keliling	6	4 pencari nafkah (suami membantu jualan sayur, dua anak sudah bekerja = 1 pegawai honorer BPBD, 1 buruh bangunan)	1 SD, 1 lulus SMA	_____	_____	Rumah sendiri
7	Jajuli	Pria	Serang	Penjual Keliling Jajanan Anak	5	2 pencari nafkah (adik bekerja ?)	_____	2 balita	_____	Rumah di kompleks, warisan almarhum ayahnya ditinggali bersama adik yang juga sudah berkeluarga
8	Halimi	Pria	Pandeglang	Tukang Becak	6	4 pencari nafkah (istri pengayam bambu, dua anak bekerja di Jakarta & Bekasi rutin kirim remitanansi)	1 SD kelas 5.	_____	1 anak putus sekolah SMP	Rumah sendiri belum bersertifikat
9	Madari	Pria	Pandeglang	Pedagang Makanan	10	4 pencari nafkah (suami-istri bekerja, dua menantu bekerja, 1 buruh bangunan)	_____	3 balita	1 anak putus sekolah STM, pernah bekerja sekarang menganggur	Rumah sendiri
10	Maryani	Pria	Serang	Pembuat Peti Telur	5	4 (istri membantu membuat peti telur, 2 anak karyawan pabrik)	1 SD	_____	_____	Rumah dibuat sendiri di tanah wazir, berlantai semen.

Provinsi Banten (merah muda = Kota Serang; hijau muda = desa di Kabupaten Pandeglang)										
Ranking kemiskinan	Nama KRT	Gender	Lokasi	Pekerjaan KRT	Jumlah ART	Jumlah Pencari Nafkah	Jumlah ART bersekolah	Jumlah ART balita / lansia	Jumlah ART putus sekolah	Kepemilikan dan kondisi tempat tinggal
11	Nadmu-din	Pria	Serang	Buruh Tani / Buruh Penggilingan Beras	7	4 pencari nafkah (ayah & ibu buruh tani, menantu salesman)	1 SD (cucu)	—	2 adik putus di SD (terkadang bantu di sawah)	Rumah sendiri, berlantai keramik di ruang tamu saja.
12	Joni	Pria	Serang	Buruh <i>Panglong</i>	8	Dua pencari nafkah (anak kelima putus di SMP juga buruh <i>panglong</i>)	1 SD 1 SMP	1 balita (cucu)	—	Rumah dibuatkah oleh anak yang tinggal di sebelah rumah
13	Yasrib	Pria	Pandeglang	Buruh Nelayan	4 (1 anak sudah menikah ikut makan & cuci)	2 pencari nafkah (satu anak putus di SD bantu ayahnya)	1 SMP kelas 2	—	—	Rumah sewa
14	Marman	Pria	Pandeglang	Buruh Tani	8 (anak tertua sudah menikah ikut cuci & makan)	1 pencari nafkah (anak yang sudah menikah terkadang kasih uang)	1 TK 1 SD 1 SMK	—	—	Rumah sendiri dengan model panggung
15	Toni	Pria	Pandeglang	Buruh Nelayan	7	2 pencari nafkah, (anak kedua putus di SMP membantu ayah melaut, 4 anak bekerja di Tangerang, tanpa remitansi)	1 SMP 1 SD	—	—	Rumah berstatus sewa 300 ribu per tahun
16	Asko	Pria	Pandeglang	Buruh Tani	4	2 pencari nafkah (anak putus SMK bekerja sebagai ker-net di Tangerang)	1 SMP	—	—	Rumah sendiri di tanah warisan dr keluarga istri

Provinsi Banten (merah muda = Kota Serang, hijau muda = desa di Kabupaten Pandeglang)										
Ranking kemiskinan	Nama KRT	Gender	Lokasi	Pekerjaan KRT	Jumlah ART	Jumlah Pencari Nafkah	Jumlah ART bersekolah	Jumlah ART balita / lansia	Jumlah ART putus sekolah	Kepermilikan dan kondisi tempat tinggal
17	Ami	Wanita	Pandeglang	Buruh Tani	3	3 (Suami buruh serabutan, anak pertama bekerja di tempat sampah, terkadang mengirim uang)	1 SMP Madrasah	_____	_____	Rumah sendiri tapi <i>bilik</i>
18	Emi	Wanita	Pandeglang	Buruh Cuci / Buruh UKM Kerupuk	4	1 (suami sudah setahun sakit)	2 anak kembar baru lulus SMP madrasah dan sedang cari kerja	_____	_____	Rumah bantuan sosial di atas tanah hibah, tidak bersertifikat
19	Mursanah	Wanita	Serang	Buruh Cuci	6	4 pencari nafkah (2 anak penjual makanan kecil dan buruh, menantu salesman)	_____	1 balita	1 anak putus di SD (pernah bekerja di <i>Steam</i> , sekarang menganggur)	Rumah berlantai tanah, warisan almarhum suaminya.
20	Marsani	Pria	Serang	Pemulung / Tukang Bersih Pemasakan	7	2 pencari nafkah (anak putus di SD kerja serabutan)	2 SD	2 balita	_____	Rumah warisan orang tua dibagi 4, dapat bagian dapur

satu unit keluarga atau rumah tangga dan kesan yang didapatkan peneliti tentang kesulitan hidup mereka. Oleh sebab itu, jika kita memperhatikan secara teliti, ranking yang tersusun tidak selalu didasarkan pola yang sama. Misalnya, pekerjaan yang sama (tukang becak) bisa menempatkan dua rumah tangga pada kelompok yang berbeda. Begitu juga jumlah ART (4 orang) ataupun jumlah pencari nafkah yang sama (3–4 orang) tidak selalu menempatkan rumah-rumah tangga tersebut dalam satu kelompok.

Secara umum, *life history* menunjukkan semakin banyak anggota sebuah rumah tangga (ART), semakin berat beban yang ditanggung rumah tangga tersebut. Mereka yang berada di ranking termiskin (ranking 20), baik Kirjo di Yogyakarta, maupun Marsani di Serang, mempunyai anggota keluarga yang cukup besar (7 orang). Namun, ternyata jumlah pencari nafkah (2–3 orang) dan jenis pekerjaan yang mereka tekuni (pengamen dan pemulung/pembersih makam) menentukan apakah rumah tangga tersebut sangat rentan atau tidak rentan. Selain itu, keberadaan balita/anak SD juga sangat menentukan kerentanan suatu rumah tangga. Baik Kirjo ataupun Marsani mempunyai 3–4 anak balita/SD. Data tentang balita dan lansia ini tidak tergambarkan di data kuesioner. Hal ini karena untuk menghasilkan indeks kerentanan, banyak data yang disederhanakan. Pekerjaan sebagai buruh cuci di Serang dan Pandeglang atau asisten rumah tangga di Yogyakarta menempatkan Mursanah, Emi dan Satiyem di **ranking bawah** (ranking 18–19). Sepertinya posisi ini diperoleh mereka juga karena suami mereka telah meninggal atau sakit berat sehingga tidak lagi berfungsi sebagai pencari nafkah. Anggota rumah tangga mereka juga tidak sedikit, yaitu 6 orang untuk keluarga Mursanah dan Satiyem, dengan pencari nafkah 3–4 orang. Mereka juga mempunyai anggota keluarga balita dan anak putus sekolah/tidak waras dan manganggur.

Data *life history* juga menunjukkan bahwa ranking terbawah berada di perkotaan (Yogyakarta dan Serang). Artinya, sama dengan data kuesioner, kemiskinan lebih parah di perkotaan daripada di perdesaan. Buruh tani dan buruh nelayan di perdesaan berada pada posisi **rentan** karena mereka berada pada ranking 12–16 di Gunungkidul dan ranking 13–17 di Pandeglang. Pekerjaan sebagai buruh panglong dan pembuat peti telur di Serang (khususnya daerah Kasemen) juga bisa digolongkan rentan sebagaimana buruh tani dan buruh nelayan (ranking 10–12). Sebaliknya, petani di Gunungkidul (Suwardi dan Parman) mempunyai penghidupan yang lebih baik. Kehidupan mereka bisa digolongkan **tidak rentan** (ranking 3 dan 5) karena mereka mempunyai rumah sendiri (rumah mertua) dan masih mempunyai tanah untuk ditanami—walau tidak banyak. Hal serupa dialami Sunarto yang berprofesi sebagai tukang bakso tusuk. Pada hakikatnya, penghidupan rumah tangganya tidak rentan karena punya rumah sendiri (rumah mertua) dan masih ada tanah yang ditanami, digarap oleh kedua mertuanya yang sudah lansia jika mereka dalam keadaan sehat (waktu penelitian ibu mertuanya sedang sakit karena tertabrak motor).

Posisi **cukup rentan** (ranking 4–7) bisa ditemukan di Serang untuk pekerjaan yang bervariasi, mulai dari penjual makanan keliling, tukang becak, satpam, sampai buruh bangunan. Posisi ini juga ditempati oleh pedagang makanan dan tukang becak di Pandeglang (ranking 8–9). Posisi ini ditemukan pula di Yogyakarta (ranking 6–9) untuk pekerjaan bervariasi, dari buruh es serut, tukang pijat, ojek jempunan anak sekolah, dan buruh las.

Yang menarik, di kota Yogyakarta, kegiatan sebagai aktivitis bisa meningkatkan kehidupan rumah tangga miskin, seperti yang terjadi pada rumah tangga Mujiono dan Supardi (ranking 1–2). Di kabupaten Pandeglang, ranking 1–2 ditempati oleh tukang pembuat perahu dan penjual ikan (Mustakim dan Jamrotun). Sepertinya

ikan merupakan komoditas yang cukup menguntungkan karena sebenarnya rumah tangga Mustakim terbantu oleh istrinya yang berjualan ikan—walaupun tidak seperti Jamrotun yang sehari-harinya berdagang ikan. Istri Mustakim menjual ikan kepada pedagang besar, dan ikan yang dijualnya didapat dari nelayan-nelayan Tegal yang tinggal di rumahnya selama musim ikan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, jaringan etnis/keadaerahan Mustakim yang berasal dari Tegal telah membantu memperbaiki kehidupan rumah tangganya.

Berbicara tentang jumlah pencari nafkah, penting untuk dicatat bahwa jumlah pencari nafkah tidak selalu berkorelasi positif dengan perbaikan kehidupan rumah tangga miskin—jika jenis pekerjaan yang dilakukan para pencari nafkah tambahan (terutama anak) itu tidak meningkat secara kualitas. Misalnya, dari buruh menjadi karyawan pabrik. Contoh yang jelas adalah Kirjo, pengamen di Kota Yogyakarta. Istri dan anaknya yang membantunya mencari nafkah juga bekerja sebagai pengamen. Walaupun ada tiga orang pencari nafkah, kehidupan mereka tidak membaik (ranking 20). Hal ini terutama karena ada tujuh orang anggota rumah tangga yang ditanggung oleh tiga orang pencari nafkah. Begitu juga dengan Mursanah, buruh cuci di kota Serang. Walaupun di rumah tangganya ada empat pencari nafkah yang menanggung enam anggota rumah tangga, kehidupannya masih tidak membaik (ranking 19). Hal ini karena dua orang anaknya hanya menjual makanan kecil dan menjadi buruh, sekalipun menantunya seorang salesman. Berbeda dengan Pak Saad, tukang becak di Kota Serang. Di rumah tangganya ada empat pencari nafkah untuk menanggung lima anggota rumah tangga. Kehidupannya cukup baik (ranking 3). Hal ini karena selain kedua anaknya buruh toko, menantunya salesman kopi perusahaan yang lumayan besar.

Dari gambaran tersebut, bisa disimpulkan bahwa data *life history* tidak bertentangan dengan data kuesioner, bahkan memperkuat elemen-elemen pembentuk indeks kerentanan yang ditetapkan atas dasar data kuantitatif tersebut. Perbedaan antara perkotaan dan perdesaan diperjelas oleh perbedaan jenis pekerjaan/sumber pendapatan dan kepemilikan aset rumah (bervariasi karena ada bantuan anak yang sudah menikah dan tinggal terpisah, bantuan pemerintah, atau harta warisan dari orang tua atau mertua). Kondisi rumah juga menentukan. Rumah berlantai tanah di perdesaan tidak selalu lebih buruk daripada rumah di perkotaan yang sebagian berlantai keramik. Hal ini terlihat pada kasus Sunarto, penjual bakso tusuk di Gunungkidul. Menarik pula untuk dicatat bahwa rumah tangga yang kehilangan kepala rumah tangga atau kepala rumahnya sedang sakit parah adalah rumah tangga yang ada di perkotaan, bukan di perdesaan. Perlu juga digarisbawahi bahwa buruh nelayan di Pandeglang tidak mempunyai aset rumah karena masih membayar sewa.

BAB V

PENUTUP:

MODEL TENTATIF MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA

Dengan mempertimbangkan kondisi di ruang sosial perkotaan dan perdesaan yang dipaparkan di Bab II, hasil penyusunan Indeks Kerentanan di Bab III, serta data *Life History* yang memperlihatkan profil rumah tangga miskin di Bab IV, kita perlu mengacu kembali pada kerangka pemikiran (Gambar 3) yang telah dioperasionalkan ke dalam skema operasional pada Gambar 5.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, ketahanan sosial budaya yang terdiri atas daya lenting keluarga dan daya lenting komunitas—dengan unsur-unsurnya, yaitu *cultural capital* (modal kultural), *social capital* (modal sosial), *effective risk calculation capacity* (kapasitas mengalkulasikan risiko yang efektif dan *social connectedness* (konektivitas sosial)— perlu dijaga agar tidak rentan. Dalam hal ini, pasar dan penguasaan ruang sosial, bersama-sama dengan kebijakan pemerintah, memberikan pengaruh terhadap kerentanan sosial (mengurangi daya lenting keluarga dan komunitas). Indeks kerentanan yang tersusun menunjukkan adanya tiga kategori rumah tangga miskin yang mempunyai tingkat

kerentanan yang berbeda-beda, atau dengan kata lain, mempunyai daya lenting yang berbeda-beda pula. Intervensi yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan pengentasan kemiskinan pada tingkat pusat sampai daerah mempunyai dampak mengurangi kemiskinan, namun pada waktu yang sama juga menyebabkan ketergantungan orang miskin terhadap bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan ketiga kategori keluarga miskin ini perlu dirangkai sebagai suatu strategi mengurangi kerentanan dan sekaligus memperkuat daya lenting.

Daya lenting atau *resilience* dalam skema operasional diartikan sebagai mandiri dan berdaya agar dapat keluar dari kemiskinan, atau lebih tepatnya perangkap kemiskinan. Untuk memperkuat daya lenting, pertama-tama perlu dilihat unsur-unsur yang membentuk daya lenting sebuah rumah tangga. Artinya, perlu terlebih dahulu dilakukan survei untuk melihat sejauh mana unsur-unsur yang diperlukan (modal kultural: pengetahuan, keterampilan, dan nilai; modal sosial: hubungan, kepercayaan, dan timbal-balik; kemampuan mengalkulasikan risiko yang efektif, dan konektivitas sosial: jejaring, pertukaran sumber daya, kohesi, respons, pemulihan dan jaring pengaman sosial) sebagai daya lenting dimiliki oleh anggota rumah tangga miskin yang bersangkutan. Survei motivasi adalah salah satu survei yang dapat digunakan untuk melihat apa yang melatarbelakangi anggota rumah tangga bekerja mencari nafkah, dan sejauh mana keyakinan yang bersangkutan melakukan pekerjaan tersebut. Sayangnya, contoh survei motivasi yang ditemukan sejauh ini lebih menyangkut motivasi pegawai di tempat kerjanya. Oleh sebab itu, tim peneliti perlu memikirkan bagaimana menyusun survei motivasi yang sesuai dengan kebutuhan buku ini. Secara tentatif, tim peneliti telah menyusun survei motivasi (Tabel 16) yang terbagi atas pandangan terhadap kehidupan saat ini, motivasi bekerja, keyakinan dalam bekerja, dan ketakutan. Tentu

saja survei ini masih perlu diuji kelayakan dan kevalidannya di lapangan.

Tabel 16. Survei Motivasi

Karakteristik Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Umur : Tahun
 Pendidikan terakhir :
 Keahlian:
 Tanda tangan:

Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu/Kakak/Adik selama ini, isilah lajur Motivasi kerja sesuai dengan kenyataan Bapak/Ibu/Kakak/Adik, dengan memberi tanda (x) pada kolom yang dipilih.

Skala Jawaban:

1. Selalu/sangat setuju (SS)
2. Sering /setuju (S)
3. Netral (N)
4. Jarang /tidak setuju (TS)
5. Tidak pernah/tidak sangat setuju (TSS)

KATEGORI	NO	BUTIR KUESIONER	SKALA JAWABAN				
			1	2	3	4	5
			SS	S	N	TS	TSS
Pandangan terhadap kehidupan saat ini	1.	Bagaimana perasaan Anda tentang hidup Anda pada umumnya, apakah sering berubah dari sangat bersemangat hingga sangat tertekan?					
	2.	Apakah Anda merasa tertekan di rumah?					
	3.	Apakah Anda murung karena tidak bekerja?					
	4.	Apakah Anda tidak tertarik oleh masa depan Anda?					
	5.	Apakah Anda mempunyai perasaan tidak berkeinginan mencapai sesuatu yang penting dalam minggu depan, bulan depan atau tahun depan?					
	6.	Apakah Anda setiap pagi semakin malas untuk bangun daripada sebelumnya?					

Motivasi bekerja	7.	Saya ingin bekerja umumnya disebabkan oleh tuntutan kebutuhan ekonomi.
	8.	Saya akan mengerjakan pekerjaan karena saya merasa bertanggung jawab.
	9.	Saya menyukai pekerjaan yang menantang.
	10.	Meskipun saya tahu risiko kegagalan itu ada, saya tidak takut memperjuangkan cita-cita/keinginan saya.
Keyakinan dalam bekerja	11.	Saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan.
	12.	Saya selalu teliti dalam menyelesaikan pekerjaan.
	13.	Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.
	14.	Saya terdorong untuk selalu mengembangkan kemampuan/keahlian yang ada pada diri saya.
	15.	Bila menghadapi kesulitan dalam mengerjakan sesuatu, saya berusaha menemukan cara pemecahannya.
	16.	Saya telah membuat jadwal kegiatan di rumah.
	17.	Saya selalu berusaha untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki.
Ketakutan	18.	Saya ragu dengan kemampuan/keahlian yang saya miliki.
	19.	Saya malas bertanya kalau ada hal yang tidak saya mengerti.
	20.	Saya acuh tak acuh untuk memperbaiki pekerjaan saya yang salah.
	21.	Saya takut mencoba sesuatu karena pikiran saya dibayang-bayangi oleh kegagalan.
	22.	Saya menghindari pekerjaan yang saya anggap sulit.
	23.	Saya merasa putus asa bila menghadapi kesulitan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

Alat yang lain adalah KK *template*. KK *template* diperlukan untuk memberikan data-data dasar rumah tangga miskin yang diperlukan guna menentukan rumah tangga miskin yang akan dibantu termasuk pada kategori 1, kategori 2, atau kategori 3 berdasarkan indeks kerentanan pada Bab II. Dalam pembuatan KK *template* yang bisa membantu mengidentifikasi rumah tangga miskin di lapangan, tim peneliti melakukan modifikasi Kartu Keluarga yang saat ini berlaku. Jika kita perhatikan, KK yang berlaku hanya mencantumkan nama dan alamat kepala keluarga (termasuk RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, dan provinsi), nama-nama anggota keluarga yang tinggal bersama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan (terakhir), (jenis) pekerjaan, status perkawinan, hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dan nama orang tua (ayah dan ibu). Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Desa Purwosari II ditambahkan dengan data golongan darah, kelainan mental/fisik, baca tulis, jenis akseptor, jenis layanan reg/rentan. Artinya, sangat memungkinkan untuk menambahkan data tentang kemiskinan atau kerentanan rumah tangga pada kartu keluarga.

Nama Kepala Keluarga:.....
 Jenis Kelamin L/P
 Alamat:..... RT/RW.....
 Jumlah Anggota Keluarga:..... orang
 Status rumah: milik/sewa
 Biaya rutin (listrik & air): Rp.....
 Kabupaten.....Kecamatan.....Kelurahan/Desa.....

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin L/P	Jenis Kelamin L/P	Tempat Lahir	Tgl lahir	Hubungan Keluarga	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Agama	Status Rentan (balita/lansia)	Cacat fisik
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

No	Kepemilikan tipe & tahun kendaraan	Askes/BPJS Kelas I/II/III	Kartu Pintar/Beasiswa	Kartu Keluarga Sejahtera	Keanggotaan organisasi	Pernah merantau, kemana, berapa lama	Jenis Pelatihan/Lama/Tahun	Bantuan Modal/Jenis/Jumlah	Kredit terutang/Jenis/Jumlah
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

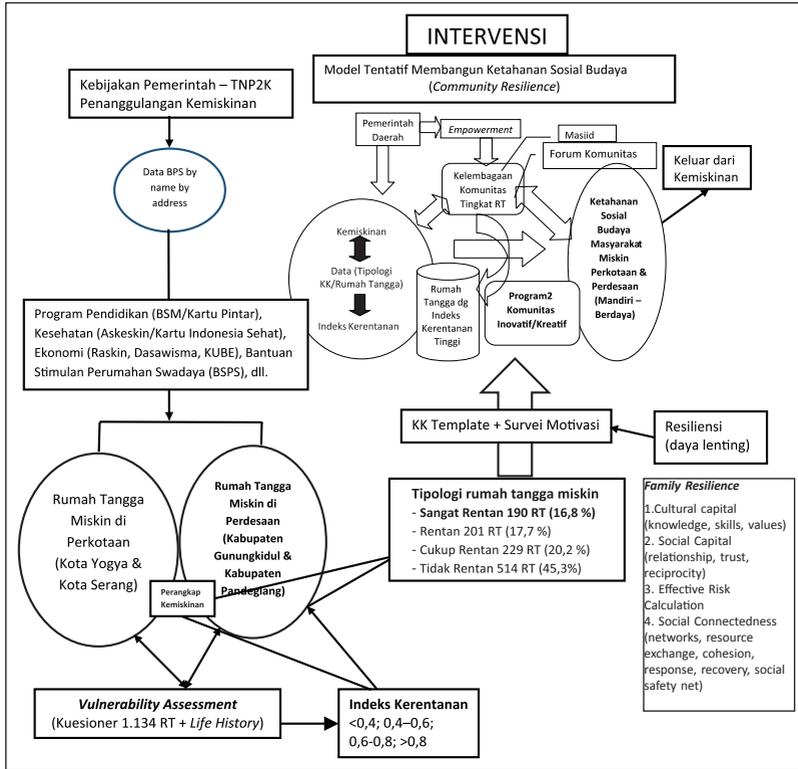
Ketua RT :.....
 Ketua RW :.....
 Lurah/Kepala Desa:.....

KK *template* tersebut bukan alat ukur yang dapat langsung menentukan tingkat kerentanan sebuah rumah tangga. Kita perlu menentukan beberapa kriteria dasar agar dapat teridentifikasi rumah tangga rentan, dan kriteria ini disusun berdasarkan hasil penelitian kuesioner serta *life history* yang telah dipaparkan pada bab III dan IV.

- 1) Jika anggota keluarga melebihi empat orang, terdapat anggota balita dan atau lansia dan atau cacat fisik, rumah sewa, tidak mempunyai kendaraan, mendapat kartu akses atau membayar BPJS kelas terendah, menerima beasiswa/kartu pintar, menerima kartu keluarga sejahtera atau sejenisnya, pencari nafkah hanya satu orang, pendidikan kepala keluarga SD/SMP, jenis pekerjaan buruh serabutan, maka tipe rumah tangga ini jelas merupakan tipe rumah tangga sangat rentan.
- 2) Jika anggota keluarga melebihi empat orang dan mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan di atas, namun bervariasi pada jumlah pencari nafkah yang lebih banyak, kepemilikan rumah tanpa kepemilikan kendaraan, namun masih dibebani oleh balita dan/atau lansia dan/atau cacat fisik, maka tipe rumah tangga ini bisa digolongkan sebagai tipe rumah tangga yang rentan.
- 3) Jika anggota keluarga melebihi empat orang dan mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan kategori No.2, namun bervariasi pada jumlah pencari nafkah yang lebih banyak, kepemilikan rumah, disertai kepemilikan kendaraan, dan tidak dibebani oleh balita dan atau lansia dan atau cacat fisik, maka tipe rumah tangga ini bisa digolongkan sebagai tipe rumah tangga yang tidak rentan.

Baik KK *template* maupun survei motivasi, masih perlu diuji kelayakannya di lapangan. Secara garis besar, model strategi

mengurangi kerentanan dan sekaligus memperkuat daya lenting dapat digambarkan pada Gambar 11.



Gambar 11. Posisi Hasil Penelitian dalam Konteks Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Model strategi ini diharapkan bisa menjawab persoalan kerentanan rumah tangga miskin yang tergambar melalui indeks kerentanan dan data *life history*. Namun seperti telah dikemukakan, model strategi ini belum menjadi model yang utuh karena masih ada sejumlah ukuran yang perlu diuji di lapangan. Dengan kata lain, model strategi ini adalah sebuah tawaran untuk melakukan penelitian tahap berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Felecia P. 2016. "Tren Urbanisasi di Indonesia." Program Studi Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. Diakses pada 18 Agustus 2016 dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/viewFile/2998/2156>.
- Adhieyatm. 2016. "Pertumbuhan Supermarket di Kota Serang Menjanjikan." Terakhir dimodifikasi pada 1 Januari 2016. Diakses pada 13 Agustus 2016 dari <http://kotaserang.com/2016/01/pertumbuhan-supermarket-di-kota-serang-menjanjikan.html>.
- Ahmad Yani, Kabid Data dan Informasi BPTPM Kota Serang, "Tugas Saya Mengundang Investor ke Kota Serang. 2015. Terakhir dimodifikasi pada 4 Maret 2015. Diakses pada 16 Agustus 2016 dari <http://majalahpeluang.com/ahmad-yani-kabid-data-informasi-bptpm-kota-serang-tugas-saya-mengundang-investor-ke-kota-serang/>.
- Amin, Samir. 2013. "China 2013." *Monthly Review* 64: hlm.14–33. Diakses pada 30 Desember 2016 dari <http://monthlyreview.org/2013/03/01/china-2013>.
- Angka Kemiskinan Pemerintahan SBY Fluktuatif. 2008. Terakhir dimodifikasi pada 29 Desember 2008. Diakses pada 2 November 2016 dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/12/29/16072210/Angka.Kemiskinan.Pemerintahan.SBY.Fluktuatif>. Kompas.com.

- Ibah dan Tohir. 2014. "Banten Waspada Urbanisasi." *Banten Raya*, 5 Agustus 2014. Diakses pada tanggal 7 Desember 2017 dari <http://www.bantenraya.com/metropolis/7086-banten-waspada-urbanisasi>.
- Badan Pusat Statistik. 2016. "Penduduk Kota Serang Hasil Sensus Tahun 2000 dan 2010." BPS Kota Serang. Diakses pada 13 Agustus 2016 dari <https://serangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/2>.
- Broer, Ahmad. 2012. "Kota Serang, dari Kota Berkembang Menjadi Kota Maju." *Kompasiana*, 8 September 2012. Diakses pada 16 Agustus dari http://www.kompasiana.com/albrurkample/kota-serang-dari-kota-berkembang-menjadi-kota-maju_55177f65a333115107b65e09.
- Chambers, Robert. 2006. "Poverty Unperceived: Traps, Biases and Agenda." *Working Paper 270*, Institute of Development Studies. Diakses pada 3 November 2016 dari <https://www.ids.ac.uk/files/Wp270.pdf>.
- Chaudhuri, Shubham, Jyotsna Jalan, dan Asep Suryahadi. 2002. "Assesing Household Vulnerability to Poverty from Cross-sectional Data: A Methodology and Estimates from Indonesia." *Discussion Paper #:0102-52* Department of Economics Columbia University New York. Diakses pada 2 November 2016 dari http://academiccommons.columbia.edu/download/fedora_content/download/ac:112940/CONTENT/econ_
- Chaudhuri, Shubham. 2003. "Assessing Vulnerability to Poverty: Concepts, Empirical Methods and Illustrative Examples.". Diakses pada 2 November dari <http://econdse.org/wp-content/uploads/2012/02/vulnerability-assessment.pdf>.
- Damayanti, Meutia Irma, Noni Setianingsih, dan Sigit Aji Pambudi. 2016. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010–2011." Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah, Jakarta, t.t. Diakses pada 13 Agustus 2016 dari <https://www.scribd.com/doc/192713209/Analisis-Pengaruh-Jumlah-Penduduk-terhadap-tingkat-kemiskinan-di-Provinsi-Banten-Tahun-2010-2012>.
- Dewi, Rina Eviana. 2012. "Yogya Bukan Daerah Tujuan Urbanisasi." *Tribun Jogja*, 28 Agustus, 2012. Diakses pada 13 Agustus 2016 dari <http://jogja.tribunnews.com/2012/08/28/yogya-bukan-daerah-tujuan-urbanisasi>.

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. 2015. "Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta." *Kesempatan Berinvestasi di Yogyakarta*, 5 November 2015. Diakses pada 13 Agustus 2016 dari <http://investasi.jogjakota.go.id/id/more/page/23/Jumlah-Penduduk>.
- Faturochman. 1990. "Pertumbuhan Kota Yogyakarta: Kondisi Sosio-Psikologis Yogya Unik." *Yogya Post*, 30–31 Mei 1990. Diakses pada 14 Agustus 2016 dari <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Pertumbuhan%20Kota%20Yogyakarta.pdf>.
- Ferri, Rendika. 2016. "Bappeda Susun Peta Geospasial untuk Rumah Tak Layak Huni." Diakses pada tanggal 7 Desember 2017. <http://jogja.tribunnews.com/2016/03/07/bappeda-susun-peta-geospasial-untuk-rumah-tak-layak-huni>.
- Fikri, Aula Ahmad Hafidh Saiful, Maimun Sholeh, dan Kiromim Baroroh. 2016. "Fenomena Kemiskinan Perkotaan (Urban Poverty) di Yogyakarta: Suatu Kajian Struktur dan Respons Kebijakan." Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, t.t. Diakses pada 16 Agustus 2016 dari <http://eprints.uny.ac.id/30973/1/Artikel%20Urban%20Poverty%20Dikti%20Aula%20dkk%20FE.pdf>.
- Ganet, ed. 2015. "Pemerintah Pusat Membantu Perbaikan Irigasi di Pandeglang." Diakses pada 29 Oktober 2015 dari <http://www.antarabanten.com/berita/22498/pemerintah-pusat-membantu-perbaikan-irigasi-di-pandeglang>.
- Guillot, Claude. 1994. "Banten in 1678." *Indonesia* 57: 89–114.
- Hanafi, Imam. 2010. "Urbanisasi, Masalah bagi Penduduk Kota." *Okezone Kampus*, 24 September 2010. Diakses pada 16 Agustus 2016 dari <http://news.okezone.com/read/2010/09/24/367/375452/urbanisasi-masalah-bagi-penduduk-kota>.
- Hart, Keith. 1973. "Informal Income Opportunities and Urban Employment di Ghana". *The Journal of Modern African Studies* 11 No. 1 (Mar.,1973): hal. 61–89. <http://www.jstor.org/stable/159873>.
- Hidayat, Rachmat. 2015. "Pandeglang Harus Segera Lepas Predikat Kabupaten Tertinggal." Diakses pada 23 Oktober 2015 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/28/pandeglang-harus-segera-lepas-predikat-kabupaten-tertinggal>.

- Humaspdg. "Catatan Sejarah Kesultanan Banten." 20 April 2010. Diakses pada 30 Desember dari <https://humaspdg.wordpress.com/2010/04/20/catatan-sejarah-kesultanan-banten/>.
- Ini Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2015. 2016. Terakhir dimodifikasi pada 19 Juli 2016. Diakses pada 13 Agustus 2016 dari <http://bukabantennews.com/ini-jumlah-penduduk-warga-banten-semester-ii-tahun-2015/>.
- Kemacetan di Kota Serang Jadi Sorotan. 2017. Terakhir dimodifikasi pada 12 September 2017. <https://www.kabar-banten.com/kemacetan-di-kota-serang-jadi-sorotan/>.
- Kota Madya Yogyakarta. 2016. Diakses pada 13 Agustus 2016. <https://gudeg.net/direktori/74/kota-madya-yogyakarta.html>.
- Lewis, Oscar. 1959. *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty With a New Introduction by Margaret Mead*. The United States of America: Basic Books Inc.
- Lembaga Penelitian SMERU. 2000. "Peta Kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta". Diakses pada 24 Desember 2017 dari <http://povertymap2000.smeru.or.id/PETA34/pb/34b.htm>.
- Martin-Breen, Patrick, dan J. Marty Anderies. 2011. "Background Paper Resilience: A Literature Review." The Bellagio Initiative The Future of Philanthropy and Development in the Pursuit of Human Wellbeing, draft by IDS (Institute of Development Studies), the resource alliance, the Rockefeller Foundation. Diakses pada 2 November 2016 dari <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/3692/Bellagio-Rockefeller%20bp.pdf?sequence=1m>.
- Murti, Tri. 2014. "Penduduk Jabotabek Tembus 30 Juta." *Investor Daily*, 2 Agustus 2014. Diakses pada 5 April 2017 dari <http://id.beritasatu.com/cosmopolitan/penduduk-jabodetabek-tembus-30-juta/90941>.
- Okamoto, Masaaki, dan Abdul Hamid. 2008. "Jawara in Power 1999–2007." *Indonesia* 86: 109–138. Diakses pada 5 April 2017 dari https://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1227644180#.
- Pembangunan Kota Serang Semakin Tidak Jelas dan Berpotensi Jadi Kota Gagal. 2015. *Fesbukbanten.news*, 14 Juli 2015. Diakses pada 16 Agustus

- 2016 dari <http://fesbukbantennews.com/pembangunan-kota-serang-semakin-tidak-jelas-dan-berpotensi-jadi-kota-gagal/>.
- Purwosari II. 2016. "Pengantar Membuat Kartu Keluarga. Diakses pada 1 November 2016 dari <http://link-purwosari2tamban.blogspot.co.id/2014/06/pengantar-membuat-kartu-keluarga.html>.
- Putra, Erik Purnama, ed. 2015. "Pandeglang Harus Segera Lepas Predikat Kabupaten Tertinggal. *Republika Online*, 1 Maret 2015. Diakses pada 23 Oktober 2015 dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/01/nki92w-pandeglang-harus-lepas-status-kabupaten-tertinggal>.
- Ruslan, Kadir. 2016. "Menyoal Garis Kemiskinan BPS." Diakses pada 2 November 2016 dari <http://povertyinindonesia.blogspot.co.id/2012/06/menyoal-garis-kemiskinan-bps.html>.
- Safrezi, Fitra. 2014. "Tren Kemiskinan Indonesia Terus Menurun." Terakhir dimodifikasi pada 1 Juli 2014. Diakses pada 2 November 2016. <http://katadata.co.id/berita/2014/07/01/tren-kemiskinan-indonesia-terus-menurun>.
- Setiawan, Nugraha. 2016. "Perubahan Konsep Perkotaan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Analisis Urbanisasi." t.t. Diakses pada 18 Agustus 2016 dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/perubahan_konsep_perkotaan_di_indonesia.pdf.
- Sullivan, John. 1986. "Kampung and State: The Role of Government in the Development of Urban Community in Yogyakarta." *Indonesia 41*: hlm. 63–88
- Supartoyo, Yesi Hendriani. 2015. "Kunjungan Lapang Tim Staf Ahli Dewan Bidang Pertanian ke Pandeglang-Banten." Diakses pada 23 Oktober 2015 dari http://www.kompasiana.com/yesisupartoyo/kunjungan-lapang-tim-staf-ahli-dewan-bidang-pertanian-ke-pandeglang-banten_55599f76b67e617777d366ac.
- Sutarmi. 2017. "Pemkab Gunungkidul Prioritaskan Pengembangan Sektor Pariwisata." *AntaraYogya.com*, 1 April 2017. Diakses pada 11 Agustus 2017 dari <http://jogja.antaranews.com/berita/345747/pemkab-gunungkidul-prioritaskan-pengembangan-sektor-pariwisata>.

- Tim Ekspedisi Kompas 200 Taoen Taoen Anjer Panaroekan. 2008. *Ekspedisi Anjer-Panaroekan Laporan Jurnalistik Kompas 200 Tahun Anjer-Panaroekan, Jalan (untuk) Perubahan*. Jakarta: Kompas.
- TNP2K. 2016. "Basis Data Terpadu." Diakses pada 1 November 2016 dari <http://bdt.tnp2k.go.id/>.
- Thung, Ju Lan, Soewarsono, Aulia Had, dan Wasisto Raharjo Jati. 2015. *Strategi Membangun Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Miskin Perkotaan & Perdesaan*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Utami, Tri Woro Yogi. 2011. "Tingkat Perkembangan Wilayah Terbangun Kota Serang." *Skripsi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Sarjana Geografi, Universitas Indonesia. Diakses pada tanggal 7 Desember 2017 dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20291214-S973-Tingkat%20perkembangan.pdf>.
- Zan dan Yul. 2015. 2015. "Kota Serang lolos dari Serbuan Urbanisasi." Terakhir dimodifikasi pada 24 Juli 2015. Diakses pada 13 Agustus 2016 dari <http://tangselpos.co.id/2015/07/24/kota-serang-lolos-dari-serbuan-urbanisasi/>.

INDEKS

- Added value, 49
Aktiva lancar, 78
Analisis faktor, 71, 78
Angsana, 27
Asep Suryahadi, 122
Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, 47
Aza, 38
Azacho, 38
Badan Urusan logistik (Bulog), 52
Banten Lama, 32, 70
Basis data terpadu (BDT), 18
Batu bertanah, 39
BPJS Kesehatan, 62
BPS, 2, 3, 7, 18, 23, 24, 25, 54, 122
BPTPM, 45, 121
Bulaksumur, 44
By name by address, 3, 4, 18, 71
Carrefour, 42, 44
Cekap, 49
Cibaliung, 35
Cikeusik, 27
Cilowong, 32
Ciomas, 34
Cipare, 33
Cirebon, 48, 50
Cluster purposive sampling, 47
Cohesion, 14
Community resilience, 14
Concentric zone, 44
Cultural capital, 14, 111
Curug, 46
Daerah aliran sungai (DAS), 46, 47
Daerah Irigasi Cibaliung, 35
Daerah Irigasi Ciliman, 35
Daerah Irigasi Cisata, 35
Daerah Irigasi Pasir Eurih, 35
Danurejan, 47
Data pre-processing, 71, 72
Dependency ratio, 77
Desa Purwosari II, 115, 116

Dewan Perwakilan Rakyat Haminte Kota, 38
 DIY, 23, 26, 27, 48, 50, 55, 56, 72, 75, 76, 96, 97
 Door-to-door interview, 71
 Effective risk calculation, 111
 Effective risk communication, 14
 Europeesche Wijk, 37
 Fakultas Psikologi UGM, 44
 Family resilience, 14, 16, 29
 Farmer, 49
 Faturochman, 44, 123
 Galengan, 50
 Garis Kemiskinan Makanan (GKM), 1
 Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), 1
 Garut, 33
 Gedangsari, 27
 Gedongtengen, 47
 Ghana Utara, 52
 Giant, 32, 42, 56
 Gondokusuman, 47
 Gondomanan, 47, 48
 Gudeg.net, 43
 Hypermart, 42
 IKIP Sanata Dharma, 44
 Indramayu, 50, 116
 Industrialisasi, 52
 Informalitas, 53
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 56
 Instruksi Presiden (Inpres) 7/2014, 10
 International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), 77
 Irigasi desa, 35
 Irigasi semi teknis, 35
 Irigasi teknis, 35
 ISEI score, 77, 85, 86, 88, 91, 93
 Jakarta, 23, 31, 103, 122, 126, 135
 Jaseng, 33
 Javanese, 34, 69
 Jawara, 34, 70
 Jawa Tengah, 33, 48
 Joko Widodo (Jokowi), 10
 Jyotsna Jalan, 122
 Kabekelan, 69
 Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Serang, 43
 Kabupaten Gunungkidul, 23, 26, 27, 39, 40, 50, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 95, 97
 Kabupaten Lebak, 25, 34
 Kabupaten Pandeglang, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 50, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 95, 102
 Kabupaten Tangerang, 25, 42
 Kali Code, 32, 35, 36, 47
 Kaligandu, Kecamatan Serang, 32
 Kaliurang, 44
 Kali Winongo, 35, 36, 47
 Kantong kemiskinan, 35, 70
 Karawang, 50
 Karesidenan Banten, 34
 Kartu Indonesia Pintar (KIP), 10
 Kartu Indonesia Sehat (KIS), 10
 Kartu keluarga menuju sejahtera (KMS), 59
 Kasemen, 27, 32, 107
 Keith Hart, 52
 Kemantren, 37, 38, 39

- Kenek, 56, 57, 58, 61, 91, 93
 Kepala Seksi Perpindahan Pen-
 duduk Disdukcapil Yogya-
 karta, 43
 Keputusan Presidium Kabinet No-
 mor 114/Kep/1967, 52
 Kesultanan Yogyakarta, 69
 KK template, 115, 118
 Knowledge, 14
 Kompasiana, 122
 koridor kawasan cepat tumbuh, 46
 Kota Baru Sukajaya Banten Mas, 45
 Kota Cilegon, 24, 25, 42
 Kotagede, 27, 38, 47, 48
 Kota Serang, 24, 25, 26, 27, 32, 33,
 40, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 57,
 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 70,
 72, 74, 75, 95, 102, 121, 122,
 124, 125, 126
 Kota Tangerang Selatan, 24, 25
 Kota Yogyakarta, 23, 26, 27, 32, 36,
 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47,
 56, 57, 59, 61, 62, 67, 68, 72,
 73, 75, 76, 95, 97, 123
 KPS, 26, 27
 Liabilitas, 78, 79, 87
 Life History, 61, 95, 96, 97, 111
 Lotte Mart, 42
 Lower income, 30
 LPND, 52
 LSM, xix, 12
 Malioboro, 48
 Mall of Serang, 42, 56
 Maro, 49
 MCK, 47
 Meksiko, 18, 29, 30, 31
 Menteri Koordinator Kesejahteraan
 Rakyat (Menko Kesra), 8
 Mergangsan, 47
 Meutia Irma Damayanti, 46
 Mexico city, 30
 Multiple issues, 17
 Multiple levels, 17
 Nagragung, 69
 Networks, 14
 Ngampilan, 47
 Ngoro, 68
 Noni Setianingsih, 122
 Nouveau riche, 30
 Oscar Lewis, 18, 29, 30, 31
 Outsourcing, 57, 60, 62
 Overlapping, 9, 12
 Overlaying, 9, 12
 Pabuaran, 34
 Pakualaman, 36, 37
 pasar Rau, 44
 Patrick Martin-Breen dan J. Marty
 Anderies, 14
 Patuh, 69
 Peasants, 30
 Pendataan program perlindungan
 sosial, 18
 Pendidikan anak usia dini (PAUD),
 59
 Peraturan Presiden (PP) 54/2005, 5
 Perumahan Kota Serang Baru, 56
 Perumahan Permata Banjar Asri,
 56
 Perumahan Puri Banjarsari, 56
 PHK, 52
 Pocis, 32
 Pongsomlee & Ross, 40
 poverty trap, 16
 PP 13/2009, 6
 PP 15/2010, 6, 7

PP 54/2005, 5
 PPLS 2011, 18
 Program penanggulangan kemiskinan pemerintah, 1
 Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), 10
 Provinsi Banten, 23, 24, 25, 26, 34, 42, 46, 55, 70, 75, 76, 102, 122
 PTN, 56
 Ramayana, 44
 Reciprocity, 14
 Recovery, 14
 Relationships, 14
 Remitansi, 20, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 87, 89, 91, 100, 103, 104
 Resilience, 15, 124
 Resource exchange, 14
 Response, 14
 Rongkop, 27
 Rumah Dunia, Cilang, Kota Serang, 44
 SBY, 5, 8, 10, 11, 121
 Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang, 35
 Sekretaris Disdukcapil Kota Serang, 42
 Sektor usaha formal, 54, 55
 Sektor usaha informal, 54
 Shubham Chaudhuri, 17
 Sigit Aji Pambudi, 122
 Skills, 14
 Slum area, 31, 32, 35
 Slums, 31, 34, 37
 Social capital, 14, 111
 Social connectedness, 14, 111
 Social resilience, 12, 14
 Social safety net, 14
 Social Vulnerability Index, 80
 SPSS, 71
 Statistika Deskriptif, 82
 Sukaresmi, 27
 Sultan Ageng, 56
 Sultan Ageng Tirtayasa, 56
 Sultan Ground, 37
 Sultan Maulana Hasanuddin, 56
 Sumur, 4
 Sundanese, 34
 Survei motivasi, 112
 Survei Sektor Informal (SSI), 54
 Susenas, 2, 3, 18
 Susilo Bambang Yudhoyono, 5
 Tak-takan, 32
 Targeted groups, 6
 Tegalrejo, 27
 Tempat pelelangan ikan (TPI), 63
 The communist uprising in 1926, 34
 The Dutch 'Newtown', 37, 39
 Theoretical construct, 14
 The third world, 31
 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 5
 Tiongkok, 31
 TKPK, 7, 8
 TKPKD, 11, 12
 TKSK, 71
 TNP2K, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 24, 71, 126
 Tonarigumi, 38
 Tonarigumiyo, 38
 Trust, 14
 UGM, 44, 133, 136
 UKM, 7, 9, 105

Ulama, 34, 70
Umbulharjo, 27, 38, 47
Underdeveloped nations, 31
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
55
Upah minimum kota (UMK), 59
Urban dwellers, 30
Urbanisasi Perdesaan, 40
Urban Rural Growth Difference/
URGD, 41
Uripsumoharjo, 44
Values, 14
Vulnerability assessment, 16, 17
Wedi gengser, 36, 98, 101
Wedono kota, 37

BIOGRAFI PENULIS

Aulia Hadi adalah peneliti muda di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI). Ia menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia memperoleh gelar M.Sc. dari University of Twente, Belanda, di bidang New Media and Communication Studies dengan tesis yang berjudul “Interactive Communications for Bonding and Bridging Communities: The Experiences of Indonesian Migrants in the Netherlands.” Perempuan asal Surabaya ini memiliki ketertarikan dengan penelitian sejak duduk di bangku universitas. Ia melakukan berbagai penelitian terkait media dan konstruksi identitas. Pada 2005, ia terlibat dalam penelitian monitoring dan evaluasi kinerja surat kabar dan majalah di Indonesia. Ia juga pernah terlibat dalam penelitian Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diadakan di sepuluh provinsi di Indonesia. Bekerja di P2KK-LIPI memberinya kesempatan mengembangkan ketertarikan dan keterampilannya dalam dunia penelitian. Selama beberapa tahun, ia melakukan penelitian Transformasi Sosial di Perkotaan Pantai Utara Jawa (Pantura). Dalam penelitian tersebut, ia mencoba memahami cara warga

kota mengonstruksi makna simbolik dari kotanya, cara kelompok etnis Arab di Pekalongan dan Jepara merepresentasikan identitasnya dalam kota sebagai sebuah ruang, serta gerakan buruh pada era digital. Saat ini, ia sedang mengerjakan penelitian “Media Baru dan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Pascaorde Baru” serta “Strategi Membangun Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Miskin di Perkotaan dan Perdesaan.”

Azzahra Ulya, alumnus Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini memiliki ketertarikan di bidang riset dan pengabdian masyarakat. Di sela-sela kesibukannya sebagai peneliti di Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Terorisme, Universitas Indonesia, ia juga bekerja lepas sebagai asisten peneliti untuk perorangan ataupun lembaga.

Irene Muflikh Nadhiroh, lahir di Padang, 3 Oktober 1986. Penulis menamatkan pendidikan sarjana dan pascasarjana di jurusan Statistika, Institut Pertanian Bogor. Saat ini penulis merupakan peneliti pertama di Kelompok Penelitian Kebijakan Iptek dan Inovasi dan Sistem Indikator Iptek, Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PAPPIPTEK-LIPI). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: irene.muflikh@gmail.com.

Mia Amelia, lahir di Bogor, 15 Mei 1990. Penulis menamatkan pendidikan sarjana di jurusan Statistika, Institut Pertanian Bogor pada 2012. Penulis merupakan peneliti pertama di Kelompok Penelitian Kebijakan Iptek dan Inovasi dan Sistem Indikator Iptek, Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PAPPIPTEK-LIPI). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: mieamelia@gmail.com.

Soewarsono, peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI). S-1 Sejarah FSUI 1988 dan M.A. Institut Etnologi Universitas Münster 2004. Minat mempelajari masalah-masalah kebangsaan dan keindonesiaan. Menulis beberapa karya, antara lain sebuah esai yang dimuat dalam buku *Utan Kayu: Tafsir dalam Permainan*, Jakarta: Yayasan Kalam, 1998; dua bab dalam buku *Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999; dan buku *Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaon*, Yogyakarta: LKiS, 2000. Publikasi yang terbaru adalah “Beberapa Acuan untuk Membaca ‘Ikatan Budaya’ dan ‘Nasionalisme Indonesia’ melalui Perspektif Regional atau Kedaerahan,” dalam Thung Ju Lan dan M. ‘Azzam Manan (penyunting), *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*, Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011; dan dua bab dalam buku *Jejak Kebangsaan: Kaum Nasionalis di Manokwari dan Boven Digoel*, Soewarsono, dan Thung Ju Lan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Thung Ju Lan adalah peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB LIPI). Ia mulai bekerja di LIPI sejak tahun 1983 setelah lulus dari Sinologi-UI. Dia mendapatkan gelar M.Sc. di bidang Sosiologi dari Purdue University, Indiana-USA pada tahun 1989. Di tahun 1998 ia mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang sosiologi dari La Trobe University, Melbourne – Australia, dengan thesis berjudul “Identities in Flux: Young Chinese in Jakarta”. Beberapa artikel terbaru yang telah dipublikasikan selama 7 (tujuh) tahun terakhir sejumlah 15 judul. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: thung_julan@yahoo.com.

Wasisto Raharjo Jati, menamatkan program sarjana (S-1) Sarjana ilmu Politik dari Departemen Politik dan Pemerintahan-FISIPOL UGM pada 2012. Ia bekerja sebagai staf peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) sejak 2014. Riset yang diminatinya adalah politik kelas menengah, gerakan politik, dan masyarakat sipil. Publikasi terbarunya adalah *Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia* (terbitan LP3ES, 2017). Korespondensi lebih lanjut bisa melalui *e-mail*: wasisto.raharjo.jati@gmail.com.

INDEKS KERENTANAN

& Profil Rumah Tangga Miskin

Persoalan kemiskinan bukan hal baru di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sebagai gambaran, di era pemerintahan SBY serangkaian kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan dilakukan serentak di Indonesia, di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Akan tetapi, bukannya melakukan inovasi di tingkat lokal, pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, cenderung hanya mengimitasi program-program yang ada untuk memperluas cakupan penerima bantuan.

Untuk itu, pembahasan buku ini menekankan perlunya penggunaan dan pemahaman konsep ketahanan sosial budaya untuk meningkatkan daya lenting masyarakat miskin sehingga mereka dapat bertahan atau bahkan keluar dari perangkap kemiskinan yang ada. Bila upaya yang selama ini ditekankan pada aspek ekonomi, buku ini mencoba menawarkan perspektif sosial-budaya sebagai alternatif dalam mengkaji kemiskinan di Indonesia.

Bagaimana penulis mengulas permasalahan dan konsep yang ditawarkan? Simak lebih jauh dalam buku ini.

Selamat membaca!



Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi
Jln. R.P. Suroso No. 39, Menteng,
Jakarta 10350
Telp. (+62 21) 314 0228, 314 6942
Faks.: (+62 21) 314 4591
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

ISBN 978-979-799-961-2



9 789797 999612